



CV. ARYANI
CAMPUS JOHANNES

PENDIDIKAN ISLAM NUSANTARA



Dr. H. Rumbang Sirojudin, M. A.

PENDIDIKAN ISLAM NUSANTARA

(PARADIGMA SEJARAH)

OLEH :

DR. H. RUMBANG SIROJUDIN, M.A

Penulis : Dr. H. Rumbang Sirojudin, M.A
Penyunting : Tim HESThetic
Desain Sampul : Khavifatul Fikriah
Tata Letak : Putri Losi

vi + 275 halaman, 14 x 20 cm
Cetakan Pertama, Januari 2022
ISBN : 978-623-09-1836-0
Diterbitkan oleh : CV. Aryani Cahaya Perdana



CV. ARYANI
CAHAYA PERDANA
WORK. ONLINE. PRIMARY

Redaksi :
Cikupa, RT 01/ RW 01
Email : hestheticofficial@gmail.com

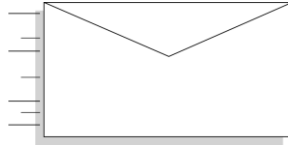


Telp. : 0838-1925-0884
Instagram : @hesthetic.official

Kutipan Pasal 72 terkait Ketentuan Pidana Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., Dzat Yang Maha Kuasa. Dengan anugrah Taufiq dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku Pendidikan Islam Nusantara (PIN) ini.

Shalawat dan salam-Nya senantiasa tercurah atas Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para shahabnya.

Buku ini terlahir karena adanya interaksi yang terbangun secara sistemik dalam khazanah formal

dalam bingkai akademik yaitu dalam membimbing perkuliahan Mahasiswa Program Pasacasarjana (S2) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri(UIN) Sulatan Maulana Hasanuddin Banten. Karena itu penulis sangat menghargai dan berterimakasih kepada komunitas calon intelektual muda yang terlibat dalam interaksi intruksional yang tergabung dalam kelas reguler 2 (dua) Program Pascasarjana dengan ketua kelasnya sudara Najmi Sakib dengan jumlah anggota kelasnya sebanyak 15 orang (8 perempuan 7 laki-laki). Juga penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Kaprodi. PAI, dan yang mulia Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Terakhir, panulis sadari akan keterbatasan yang dimiliki, pasti tulisan buku ini masih jauh dari harapan ideal. Namun, semoga ada manfaatnya khusus bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca buku ini. Amiin.

Serang, 10 November 2022

H. Rumbang Sirojudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia.....	7
BAB III Masa Kejayaan Dan Kemunduran Kerajaan Islam Di Indonesia	51
BAB IV Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Islam Di Indonesia	78
BAB V Periodesasi Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia	110
BAB VI Sistem Pendidikan Islam Dalam Organisasi Keagamaan Islam	140
BAB VII Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang.....	167
BAB VIII Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Dan Orde Baru.....	189
BAB IX Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi.....	212
BAB X Pendidikan Islam Dari Satu Dekade Pasca Reformasi	225
BAB XI Penutup	253
DAFTAR PUSTAKA	255

BAB I

PENDAHULUAN



Lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pada abad ke-7 M, menimbulkan suatu energy yang tek terbantakan sebagai tenaga penggerak yang luar biasa, yang pernah dialami oleh umat manusia. Islam merupakan gerakan raksasa yang telah berjalan sepanjang zaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dikatakan oleh M. Fuad Nasar¹, Ajaran Islam lahir memberikan cara pandang terhadap sesama manusia dalam perspektif persamaan derajat dan kemuliaan martabat

¹ M. Fuad Nasar, Al-Qur'an Tegaskan Persamaan Derajat Manusia, <https://www.kemenag.go.id/reed/al-uur-an-tegaskan-persamaan-derajat-manusia-orupy>

kemanusiaan. Selanjutnya dia menjelaskan, ajaran melahirkan prinsip-prinsip kemerdekaan, toleransi dan hak asasi manusia di atas landasan tauhid dan perlindungan martabat manusia. Masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak masalah, terutama tentang sejarah perkembangan awal masuk Islam itu sendiri. Ada perbedaan antara pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 M dan pendapat baru menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 M. Perbedaan awal masuk Islam ke Nusantara, didasarkan pada lima versi, yaitu bersumber dari teori Arab (timur tengah) teori cina, teori Gujarat, teori Persia dan teori maritim.² Namun Buya Hamka menolak anggapan bahwa islam masuk ke Nusantara

² <https://tirto.id/perbedaan-dan-ragam-versi-masuknya-islam-ke-nusantara.cq4R>.

pada abad ke 13 M, beliau menyatakan bahwa Agama Islam sudah di Nusantara sejak abad ke 7 M yakni tahun awal-awal hijriah.³

Tetapi dari perbedaan masuk islam tersebut, hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah daerah Aceh. Datangnya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, dapat dilihat melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, ajaran tasawuf dan tarekat, serta jalur kesenian dan pendidikan, yang semuanya mendukung proses cepatnya Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Azyumardi Azra, sangat setuju terhadap pendapat A.H. Johns, yang dikatakannya, bahwa perkembangan Islam di Nusantara dilakukan oleh pengembara para Sufi dan ini

³ <https://tirto.id/perbedaan-dan-ragam-versi-masuknya-islam-ke-nusantara.cq4R>.

berkembang pada abad ke 13 M⁴. Lalu bagaimana perkembangan pendidikan islam sejalan dengan masuk islam ke Nusantara, Sesuai dengan wilayah yang pertama disinggahi para pengembara dari timur tengah dalam mengembagkan Islam, yaitu dari Aceh (semudra pasai), maka Kegiatan pendidikan Islam juga tumbuh dan berkembang di Aceh bersamaan dengan berkembangnya Islam tersebut di pasai.

Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masa perdagangan disebabkan oleh Islam merupakan agama yang siap pakai, asosiasi Islam dengan kejayaan, kejayaan militer Islam, mengajarkan tulisan dan hapalan, kepandaian dalam penyembuhan dan pengajaran tentang moral.⁴Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masa kerajaan Islam di Aceh tidak lepas dari pengaruh penguasa kerajaan serta peran ulamadan pujangga. Aceh menjadi pusat pengkajian

⁴ <https://revository.uin-banten.ac.id>. Bab. IV Pandangan Azyumardi Azra Tentang Sejarah Islam Nusantara.

Islam sejak zaman Sultan Malik Az-Zahir berkuasa, dengan adanya sistem pendidikan informal berupa halaqoh. Yang pada kelanjutannya menjadi sistem pendidikan formal. Dalam konteks inilah, pemakalah akan membahas tentang pusat pengkajian Islam pada masa Kerajaan Islam dengan membatasi wilayah bahasan di daerah Aceh, dengan batasan masalah, pengertian pendidikan Islam, masuk dan berkembangnya Islam di Aceh, dan pusat pengkajian Islam pada masa tiga kerajaan besar Islam di Aceh. Buku meliputi tentang keberadaan Pendidikan Islam Nusantara (PIN) dalam penedekatan kesejarahan, yang terdiri dari..bab 11 bab mulai dari Bab (1) Pendahuluan yang berisi tentang dinamika Pendidikan Islam, (2) Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia, (3) Pendidikan Islam pada Masa Kejayaan dan Kemunduran kerajaan Islam di Indonesia, (4) Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Islam di Indonesia, (5) Priorisasi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (6) Sistem Pendidikan

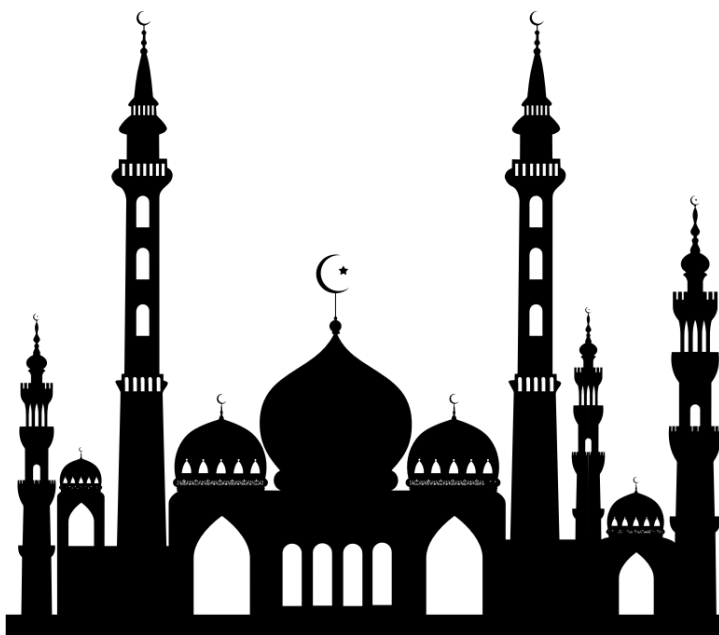
Islam dalam Organisasi Keagamaan Islam, (7) Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, (8) Pendidikan Islam pada masa Awal Kemerdekaan RI dan Masa Orde Baru, (9) Pendidikan Islam pada masa Reformasi, (10) Pendidikan Islam satu Dekade Pasca Reformasi. (11) Penutup.

BAB II

KERAJAAN-KERAJAAN

ISLAM DI PULAU SUMATRA,

JAWA, DAN MALUKU



A. Kerajaan-Kerajaan Islam di Sumatera

Banyak kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh dan berkembang di Sumatera. Beberapa kerajaan Islam tersebut antara lain:

1. Samudera Pasai

Dalam sejarah islam di nusantara, samudra pasai diakui sebagai kerajaan islam pertama. Tanggal tahun di batu nisan Malik al-shaleh 1297, diterima kalangan ahli sejarah sebagai waktu berdirinya samudera pasai menjadi sebuah kerajaan islam.⁵

Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.

⁵ Jajat Burhanudin, "*Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 1*" (Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2015) Hal. 174

Kerajaan ini terletak di pesisir Timur Laut Aceh. Kapan berdirinya Kesultanan Samudera Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, menurut Uka Tjandrasasmita (Ed) dalam buku Badri Yatim, menyatakan bahwa kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13, sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya.

Berdasarkan berita dari Ibnu Batutah, dikatakan bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik Al Saleh (1297), Raja pertama Samudra Pasai. Malik Al-Saleh, raja pertama kerajaan Samudera Pasai, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Dalam Hikayat Raja-raja Pasai disebutkan nama Malik Al-Saleh sebelum menjadi raja adalah Merah Sile atau Merah

Selu. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syaikh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekkah.⁶ Pendapat bahwa Islam sudah berkembang di sana sejak awal abad ke-13, didukung oleh berita China dan pendapat Ibn Battutah yang mengunjungi Samudera Pasai pada pertengahan abad ke-14 M (tahun 746 H/1345 M).

Dalam kisah perjalanannya ke Pasai, Ibnu Battutah menggambarkan Sultan Malikul Zhahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Malikul Zhahir tidak pernah bersikap sombong. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battutah. Samudera Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Selain itu, Sultan Malikul Zhahir juga

mengutus para ulama untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara.

Kehidupan masyarakat Samudera Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam, rakyatnya sebagian besar memeluk agama Islam. Raja-raja Pasai membina persahabatan dengan Campa, India, Tiongkok, Majapahit dan Malaka. Sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk.

Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Bukan hanya perdagangan ekspor impor yang maju. Sebagai bandar dagang yang maju, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai uang dirham.⁶

2. Kerajaan Aceh

⁶ Arki Auliahadi Dan Doni Nofra, "*Tumbuh Dan Berkembangnya Kerajaan Kerajaan Islam Di Sumatera Dan Jawa*", Majalah Ilmiah Tabuah, Vol. 23. No. 1(Januari-Juni 2019)Hal. 36

Kurang diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Machmud berpendapat, sebagaimana yang dikutip dalam buku Badri Yatim, bahwa Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15, di atas puing-puing kerajaan Lamuri, oleh Muzaffar Syah (1465-1497). Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam.

Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Syah. Ketika Mughayat Syah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai. Saat itu, sekitar tahun 1511, kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di Aceh dan pesisir timur Sumatera seperti Peurelak (di Aceh Timur), Pedir (di Pidie), Daya (Aceh Barat Daya) dan Aru (di Sumatera Utara) sudah berada di bawah pengaruh kolonial Portugis. Mughayat Syah dikenal sangat anti pada Portugis, karena itu, untuk menghambat pengaruh

Portugis, kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian ia taklukkan dan masukkan ke dalam wilayah kerajaannya.

Sejak saat itu, Kerajaan Aceh lebih dikenal dengan nama Aceh Darussalam dengan wilayah yang luas, hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Syah. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Aceh Darussalam semakin meluas sampai di Bengkulu di pantai Barat, seluruh Pantai Timur Sumatera, dan Tanah Batak di pedalaman. Kegiatan perdagangan berkembang dengan pesat, terutama dengan Gujarat, Arab, dan Turki.

Puncak kekuasaan kerajaan Aceh terletak pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1608-1637). Pada masa ini merupakan masa paling gemilang bagi Aceh, di mana kekuasaannya meluas dan terjadi penyebaran Islam hampir di seluruh Sumatera. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam

menjadi salah satu pusat pengembangan Islam di Indonesia. Di Aceh dibangun masjid Baiturrahman, rumah-rumah ibadah, dan lembaga-lembaga pengkajian Islam. Di sana tinggal ulama-ulama tasawuf yang terkenal, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syaikh Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdul Rauf As-Sinkili⁷

Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh Darussalam juga sangat memperhatikan pengembangan agama dengan mendirikan masjid-masjid seperti masjid Bait al Rahman di Banda Aceh dan pusat pendidikan Islam yang disebut dengan Dayah (dari bahasa Arab Zawiya)⁸

3. Kerajaan Minangkabau

Kerajaan Pagaruyung disebut juga sebagai Kerajaan Minangkabau, merupakan salah satu Kerajaan

⁷ Arki Auliahadi Dan Doni Nofra, "*Tumbuh Dan Berkembangnya Kerajaan Kerajaan Islam Di Sumatera Dan Jawa*", Majalah Ilmiah Tabuah, Vol. 23. No. 1 (Januari-Juni 2019) Hal. 37

⁸ Rohmadi, "*Lintasan Sejarah Islam Indonesia*", (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018) Hal. 7

Melayu yang pernah berdiri, meliputi provinsi Sumatra Barat sekarang dan daerahdaerah di sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Adityawarman sejak tahun 1347. Sekitar tahun 1600- an, kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam.

Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman, menunjukkan bahwa Adityawarman memang pernah menjadi raja di negeri tersebut.

Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal Syaikh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala), yaitu Syaikh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi kesultanan Islam. Raja Islam

yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang artinya adat Minangkabau bersandikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersandikan pada Al-Quran.⁹

B. Kerajaan Islam di Pulau Jawa

Jika kita berpegang kepada Teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 M, maka kerajaan Islam pertama bukan lagi Samudra Pasai, tetapi Kerajaan Jeumpa yang berdiri sejak abad ke-8 M., yang disusul oleh kerajaan Peurelak di abad ke-9, baru kemudian kerajaan Samudera Pasai. Hanya

⁹ Rohmadi, "*Lintasan Sejarah Islam Indonesia*", (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018) Hal. 38-39

saja, kerajaan Jeumpa dan Peurelak barangkali tidak terlalu populer dan bukan kerajaan besar. Di samping itu, bukti-bukti yang ilmiah yang menguatkannya belum dipandang cukup. Berikut adalah uraian singkat beberapa kerajaan Islam yang terkenal di Pulau Jawa:

- Kesultanan Cirebon (1430 - 1666)
- Kesultanan Demak (1475 - 1554)
- Kesultanan Banten (1524 - 1813)
- Kerajaan Kalinyamat (1527 – 1599)
- Kesultanan Pajang (1554 - 1568)
- Kesultanan Sumedang Larang (1585 - 1620)
- Kesultanan Mataram (1586 - 1755)
- Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (1755)

sampai sekarang.¹⁰

¹⁰ M. Rosyiq Daffa Haq, *Mengenal Perjalanan Islam Menjelajahi Tanah Jawa*, di akses dari <https://retizen.republika.co.id/posts/17016/mengenal-perjalanan-islam-menjelajahi-tanah-jawa>, diakses pada tanggal 26 November 2021, pukul 09.23.

1. Kesultanan Cirebon

Kasultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fatahillah, kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Kemenangan- kemenangan Fatahillah membuat Sunan Gunung Jati tertarik dan menjodohkan Fatahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean.

Sepeninggal Pangeran Pasarean, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sabakingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pada abad ke-17 terjadi perselisihan dalam keluarga, sehingga kesultanan Cirebon pecah menjadi dua yaitu Kasepuhan dan Kanoman.

2. Demak

Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis Armada Demak yang dipimpin Pati Unus (Putra Raden Patah) melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Unus diberi Gelar Pangeran Sabrang Lor yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah Utara kesultanan Demak.

Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus, selanjutnya Pati Unus diganti oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Seda ing Lepen (adik Trenggana) dengan Pangeran Prawoto (anak Trenggana). Pangeran Prawoto berhasil membunuh pangeran Sekar Seda Ing Lepen. Tetapi kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang (anak Pangeran Sekar Seda ing Lepen). Arya Penangsang kemudian tampil menjadi Sultan Demak ke-4. Pemerintahan Arya Penangsang dipenuhi

dengan kekacauan karena banyak orang yang tidak suka dengannya. Hingga pada akhirnya seorang adipati Pajang bernama Adiwijaya atau Jaka Tingkir atau Mas Karebet berhasil membunuhnya. Setelah kematian Arya Penangsang, kerajaan Demak berpindah ke tangan Jaka Tingkir.

3. Banten

Daerah Banten di-Islamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda.¹¹

4. Kalinyamat

¹¹ Sholeh Dimyathi dan Feisal Ghozali, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Hal. 192-197

Proses awal masuknya Islam di Jepara ialah melalui jalur perdagangan, yang mana di Jepara terdapat sebuah pelabuhan yang cukup besar pada masanya yaitu pada tahun 1470. Selain pedagang, peran Walisongo juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jepara. Pada awalnya kerajaan Kalinyamat hanyalah kerajaan kecil atau kadipaten bawahan Demak pada tahun 1527. Setelah terjadi konflik besar di kerajaan Demak tahun 1549 yang menimbulkan terbunuhnya saudara Ratu Kalinyamat yaitu Sunan Prawata dan suami Ratu Kalinyamat yaitu Sunan Hadiri, maka Ratu Kalinyamat mendeklarasikan kerajaan Kalinyamat menjadi kerajaan yang berdiri sendiri dan lepas dari kerajaan Demak, setelah itu Ratu Kalinyamat melakukan pertapaan. Setelah Arya penangsang meninggal, Ratu Kalinyamat menghentikan pertapaannya dan di lantik menjadi ratu di kerajaan Kalinyamat dengan julukan Ratu Kalinyamat. Sebenarnya sebutan Ratu Kalinyamat didapat beliau

setelah resmi menjadi ratu di kerajaan Kalinyamat, nama asli dari Ratu kalinyamat adalah Retna Kencana.

Peran kerajaan Kalinyamat dalam pengembangan Islam, bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan Kalinyamat yang sampai sekarang masih ada, yaitu masjid Mantingan. Masjid Mantingan merupakan salah satu bukti bahwa kerajaan Kalinyamat juga berperan dalam pengembangan Islam di Jepara. Selain masjid Mantingan, kesenian juga menjadi strategi untuk mengembangkan Islam di Jepara, contohnya ukiran-ukiran yang ada di masjid Mantingan dan makam Ratu Kalinyamat. Selain itu dalam segi pendidikan, pada masa Ratu Kalinyamat juga dibentuk sebuah komunitas untuk mengembangkan pendidikan Islam di Jawa.

5. Pajang

Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang, akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri (putra Pangeran

Prawata). Tindakan Arya Pangiri menimbulkan upaya-upaya perlawanan, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta Pajang. Karena itu, ia menjalin kerja sama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram sehingga berakhirilah kekuasaan Pajang.

6. Sumedang Larang

Kerajaan Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di tanah Sunda. Sejarah masa kejayaan kerajaan Islam penerus Pajajaran ini dicapai pada era pemerintahan Prabu Geusan Ulun yang bertakhta tahun 1579-1601 Masehi. Dari penelitian Euis Thresnawaty bertajuk “Sejarah Kerajaan Sumedang Larang” dalam jurnal Patanjala (2011) terungkap, ibu kota kerajaan yang semula bernama Tembong Agung atau Himbar Buana ini

terletak di Citembong Karang, kini termasuk wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejak awal berdirinya, Kerajaan Sumedang Larang sudah menjadi bawahan dari kerajaan lain, yakni kerajaan kembar pecahan Tarumanegara yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh antara abad ke-8 sampai abad ke-16Masehi.

Menjadi Kerajaan Islam Pada 1482, Kerajaan Sunda dan Galuh bersatu berkat peran Sri Baduga Maharaja (1482-1521) yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dengan bersatunya Sunda dan Galuh, Sumedang Larang otomatis beralih di bawah naungan Kerajaan Pajajaran. Dikutip dari buku Sejarah Daerah Jawa Barat (1984) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kerajaan Sumedang Larang yang semula menganut Hindu menjadi kerajaan bercorak Islam pada masa pemerintahan Pangeran Santri (1530-1578 M). Baca juga: Sejarah Kerajaan Sunda Galuh, Keruntuhan, & Peninggalan Pajajaran

Sejarah Tarumanegara, Purnawarman & Prasasti Peninggalannya Sejarah Sumedang Larang: Kerajaan Islam Sunda Pewaris Pajajaran Pangeran Santri merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Ia menjadi pemimpin Kerajaan Sumedang Larang setelah menikah dengan putri dari kerajaan tersebut, yakni Ratu Pucuk Umun. Apipudin S.M. dalam *Penyebaran Islam di Daerah Galuh sampai dengan Abad 17* (2010) menyebut, Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun dikaruniai anak laki-laki bernama Angkawijaya atau yang nantinya dikenal sebagai Prabu Geusan Ulun setelah naik takhta. Sumedang Larang menjadi kerajaan merdeka pada era pemerintahan Prabu Geusan Ulun yang bertakhta sejak tahun 1578 dan dilantik oleh Raja Pajajaran yakni Prabu Suryakencana (1567-1579 M). Baca juga: *Sejarah Sunan Gunung Jati: Ulama Wali Songo & Sultan Cirebon Sejarah Kerajaan Sunda Galuh, Keruntuhan, & Peninggalan Pajajaran Sejarah Singkat Kesultanan Cirebon: Kerajaan Islam*

Sunda Pertama Masa Jaya Sumedang Larang Baru setahun Prabu Geusan Ulun menjadi raja di Sumedang Larang, Kerajaan Pajajaran hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada 1579. Di tengah kekacauan itu, seperti tertulis dalam Widyasancaya suntingan Agus Arismunandar (2006), Prabu Geusan Ulun mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran. Selain itu, Prabu Geusan Ulun juga memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang dari Citembong Karang ke Kutamaya, masih wilayah Sumedang. Pendeklarasian Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran mendapat dukungan dari berbagai pihak mengingat Prabu Geusan Ulun adalah keturunan raja-raja di telatah Sunda.

Letak, Silsilah, Penerus Tarumanegara Sejarah Runtuhnya Tarumanegara: Sebab, Peninggalan, Raja Sejarah Masjid Agung Banten yang Dirancang Arsitek Cina & Belanda Terlebih, mahkota Pajajaran yang dapat diselamatkan dari serbuan Banten kemudian

diberikan kepada Prabu Geusan Ulun. Tak hanya itu, sejumlah atribut kebesaran kerajaan lainnya dan harta peninggalan Pajajaran diserahkan untuk Sumedang Larang. Maka, Kerajaan Sumedang Larang di bawah pemerintahan Prabu Geusan Ulun mencapai puncak kejayaannya. Selain memiliki legitimasi yang kuat, wilayah kekuasaan Sumedang Larang pun bertambah luas berkat hibah dari Kerajaan Pajajaran. Menurut Babad Sumedang, sebagaimana dinukil Abdurachman dalam Naskah Sunda Lama di Kabupaten Sumedang (1986), wilayah Sumedang Larang dibatasi oleh Laut Jawa di utara, Sungai Cipamugas di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Sungai Cipamali di timur.

7. Mataram

Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya, Sutawijaya. Sutawijaya

diangkat menjadi Adipati Mataram dan diberi gelar Senopati ing Alogo Sayidin Panatagama yang berarti panglima perang dan pembela agama. Sepeninggal Senopati, Tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya (Mas Jolang), tetapi Mas Jolang meninggal sebelum berhasil memadamkan banyak pemberontakan. Penggantinya adalah Raden Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai masa kejayaan. Akan tetapi Mataram mulai mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan pengganti-pengganti Sultan Agung. Kemunduran Mataram yang lebih utama karena aneksasi yang dilakukan Belanda. Setelah terjadinya Perjanjian Gianti, kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Lebih dari itu, dengan adanya Perjanjian Salatiga, Kerajaan Surakarta terpecah lagi menjadi dua yaitu Mangkunegaran dan Pakualaman/Kasunanan.

8. Kesultanan Yogyakarta

Nama Yogyakarta adalah perubahan bentuk dari Yodyakarta. Yodyakarta berasal dari kata Ayodya dan Karta. Ayodya diambil dari nama kerajaan dalam kisah Ramayana, sementara karta berarti damai. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) antara Pangeran Mangkubumi dan VOC dibawah Gubernur Jendral Jacob Mossel, maka Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah Kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwana III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta dan daerah pesisir tetap dikuasai VOC.

Sultan Hamengkubuwana I kemudian segera membuat ibu kota kerajaan beserta istananya yang baru dengan membuka daerah baru (jawa: babat alas) di Hutan Paberingan yang terletak antara aliran Sungai

Winongo dan Sungai Code. Ibu kota berikut istananya tersebut dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat dan lansekap utama berhasil diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756. Para penggantinya tetap mempertahankan gelar yang digunakan, Hamengku Buwono. Untuk membedakan antara sultan yang sedang bertahta dengan pendahulunya, secara umum, digunakan frasa "*ingkang jumeneng kaping...ing Ngayogyakarta Hadiningrat*" (bahasa Indonesia: "yang bertakhta ke di Yogyakarta"). Selain itu ada beberapa nama khusus atau gelar bagi Sultan, antara lain Sultan Sepuh (Sultan yang Sepuh/Tua) untuk Hamengkubuwana II, Sultan Mangkubumi (Sultan Mangkubumi) untuk Sultan Hamengkubuwana VI, atau Sultan Behi (Sultan Hanga[Behi]) untuk Sultan Hamengkubuwana VII¹²

¹² Nandy, *Sejarah Perkembangan Islam Indonesia*, diakses dari [https:// www .gramedia.com/literasi/sejarah-perkembangan-islam-di-indonesia](https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-perkembangan-islam-di-indonesia)

B. Kerajaan - Kerajaan Islam Selain Di Pulau Jawa Dan Sumatera

1. Kerajaan-Kerajaan Islam Di Maluku

Islam masuk ke daerah maluku secara resmi pada abad IX, pada waktu itu dibawa oleh orang-orang arab, persia dan juga melayu yang berdatangan sejak abad V-XI M. Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya, banyak orang asing tertarik datang kesana untuk berdagang. Bahkan orang-orang eropa berdatangan ingin menguasai wilayah tersebut. Selain itu, maluku juga dikenal dengan julukan negeri seribu pulau dan jazirah al-mulk (wilayah raja-raja). Pada awalnya yang disebut dengan maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian Dan Moki. Secara keseluruhan, keempat wilayah itu disebut dengan “*Moloku Kie Raha*” yang artinya “persatuan empat kolano (kerajaan).

Pada abad ke 13 M, dimaluku sudah muncul beberapa kolano (kerajaan) yang memainkan penting

dalam bidang perdagangan, yaitu: Ternate, Tidore, Makian Dan Moti. Pada perjalanan selajutnya, sudah terjadi perjanjian moti pada abad ke-14 M, kolano makian pindah ke bacan, dan kolano moti pindah ke jailolo. Sejak itulah, empat kolano di Maluku berubah nama menjadi: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, dan dari keempat itu, Kolono Ternate dan Tidorelah yang banyak mendapat perhatian dalam liputan sejarah Islam di Maluku¹³

Masuknya agama Islam di Maluku Utara menurut M.S.Putuhena dalam artikelnya berjudul “Sejarah Agama Islam Di Ternate”(1970 : 264) mengemukakan berdasarkan tradisi lisan setempat bahwa pada akhir abad ke-2 Hijriah (abad ke-8M) telah tiba di Maluku Utara empat orang syeh dari Irak (Persia). Kedatangan mereka dikaitkan dengan pergolakan politik di Irak yang mengakibatkan golongan Syiah dikejar-kejar oleh

¹³ Rusdiyanto, *Kesultanan Ternate Dan Tidore*, (Manado:Institut islam agama negeri IAIN Manado,Indonesia), hal. 45

penguasa, baik bani Umayyah maupun bani Abasiyah. Keempat orang yang membawa faham syiah itu lalu pergi menyelamatkan diri menuju ke dunia Timur dan akhirnya tiba di Maluku Utara. Mereka itu adalah Syeh Mansur yang mengajarkan agama Islam Di Ternate dan Halmahera Muka. Selanjutnya disebutkan bahwa setelah meninggal Ia dikuburkan di puncak Gamala Ternate. Kemudian Syeh Yakub mengajarkan agama Islam di Tidore dan Makian, dan setelah meninggal dikuburkan di puncak Kie Besi (gunung besi) di pulau Tidore. Sedangkan syeh Amin dan syeh Umar mengajarkan agama Islam di Halmahera Belakang, Maba, Patani dan sekitarnya. Kedua tokoh ini selanjutnya kembali ke Irak.¹⁴

Dua kerajaan besar yang pernah memerintah Wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate sendiri sudah berdiri

¹⁴ Usman Tholib, Sejarah Masuknya Islam Di Maluku,(Maluku Utara: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara,2011) Hal. 20

pada abad ke-13 dengan raja yang pertama adalah Sultan Marhum (1465-1495 M).

2. Kesultanan Ternate

Kata Ternate berasal dari tiga suku kata: Tara, No, dan Ate yang artinya “Turun ke bawah dan pikatlah”, bisa juga diartikan “(Turunlah dari dataran tinggi ke dataran rendah) atau (Dari Formadiyahi ke Limau Jore-Jore) untuk memikat para pendatang agar mau menetap di tempat negeri (pantai) ini”. Tara juga berarti Selatan yang mungkin dimaksudkan karena letak atau posisi kota Ternate berada di selatan pulau Ternate. Kota yang memiliki luas daratan sekitar 250,85 km² dan luas lautan 5.547,55 km² ini secara geograis berada pada posisi 0o -2o Lintang Utara dan 126o -128o Bujur Timur dengan semua wilayahnya berbatasan dengan laut (sebelah barat berbatasan dengan laut Maluku sebelah timur berbatasan dengan selat Halmahera - sebelah utara berbatasan dengan laut

Maluku - sebelah selatan berbatasan dengan laut Maluku).

Kota Ternate termasuk kota yang terhitung tua karena sudah berdiri sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat peradaban Islam terbesar di Nusantara Timur pada zamannya. Kota ternate juga pernah mendapatkan julukan “Al Mullukiah” karena selain menjadi pusat peradaban Islam juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Ternate juga dikenal sebagai kota penghasil rempahrempah. Para petani yang tinggal di kawasan perbukitan menanam cengkih, pala, kayu manis dan kenari, sementara yang tinggal di daerah yang agak rendah menanam kelapa. Adapun masyarakat yang bermukim dipinggir pantai sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan.

Nama sebenarnya dari Kerajaan Ternate, yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku, adalah Kerajaan Gapi, tapi kemudian berubah menjadi

Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kesultanan atau Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada 1257 dan memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17.

Masa kejayaan Kesultanan Ternate terjadi pada paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Ketika itu, kekuasaan Kerajaan membentang mulai wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di pasifik. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Ia adalah kerajaan yang raja dan rakyatnya belum diketahui dengan jelas agama dan kepercayaannya. Mereka diasumsikan beragama animisme atau percaya kepada kekuatan-kekuatan ghaib, terutama gunung berapi Gamalama yang berada di pulau Ternate. Hanya dapat

dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15¹⁵

Masyhur Mulamo adalah raja Ternate pertama yang memerintah pada tahun 1257-1272 M. Sekalipun diberbagai literatur disebutkan bahwa ia adalah putra Ja'far Shadiq, tidak ada keterangan jelas yang menyebutkan bahwa ia beragama Islam, begitupun dengan beberapa raja-raja penerusnya di antaranya Kaicil Yamin (1272-1284 M), Kaicil Siale (1284-1298 M), Kamalu (1298-1304 M), Kaicil Ngara Lamu (1304-1317 M), Patsyaranya Malamo (1317-1322 M), Sida Arif Malamo (1322- 1331 M). Pasca Sida Arif Molamo, kepemimpinan Ternate dilanjutkan oleh Bayanullah (1350-1375) dan Marhum (1465-1489 M).¹⁰ Marhum adalah Kolono Ternate yang pertama kali masuk Islam, setelah mendapat seruah dakwah dari pedagang asal Minangkabau yang juga murid Sunan

¹⁵ Binuko Amarseto, *Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Media, 2015). Hal. 235-237

Giri, yaitu Datu Maulana Husein yang datang ke Ternater pada tahun 1465 M.

Jika keterangan ini dijadikan patokan masuknya Islam di Ternate, maka Islam di Ternate ini dibawa dan disebarkan oleh ulama Melayu-Jawa. Tetapi, menurut M. Shaleh Putuhena, yang didasarkan pada tradisi lisan masyarakat, pedagang Arablah yang pertama kali memperkenalkan Islam di kawasan Maluku, mereka adalah Syeikh Mansur, Syekih Yakub, Syeikh Amin dan Syeikh Umar. Setelah Kolano Marhum Wafat pada tahun 1486, putranya Zanal Abidin menggantikannya (1486-1500 M). Zainal Abidin, adalah murid Sunan Ampel dan jebolan sekolah agama Islam Gresik asuhan Sunan Ampel. Kesultanan Ternate (1570-1610 M) juga menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Nusantara.

Setelah Kolano Marhum Wafat pada tahun 1486, putranya Zanal Abidin menggantikannya (1486-1500

M). Zainal Abidin, adalah murid Sunan Ampel dan jebolan sekolah agama Islam Gresik asuhan Sunan Ampel. Pada masa Zainal Abidin inilah, gelar kolano diganti menjadi Sultan, dengan begitu, Zainal Abidin merupakan penguasa Ternate pertama yang memakai gelar Sultan. Selain perubahan gelar, terdapat perubahan lain masa ini, yaitu: pertama, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan sejak itu menjadi kesultanan. Kedua, membentuk lembaga kesultanan yang baru, yaitu Jolebe atau Bobato Akhirat. Ketiga, menempatkan seorang sultan sebagai pembina agama Islam atau “Amir ad-Din” yang membawai Jobele. Perubahan yang dilakukan Sultan Zainal Abidin ini berikutnya juga diikuti oleh kesultanan-kesultanan lain yang ada di “Moloku Kie Raha”. Dengan demikian, pengaruh Islam sudah sangat kuat pada masa Sultan Zainal Abidin.

Dalam sejarah Nusantara, penguasa dari Kesultanan Ternate pada abad ke-16, seperti Sultan

Khairun dan Sultan Babullah dapat disejajarkan dengan para penguasa besar daerah lain di Nusantara seperti Sultan Trenggono di Kesultanan Demak, Fatahillah di Kesultanan Banten, Sultan Alauddin di Aceh, dan Sultan Abdul Jalil di Johor. Kesultanan Ternate (1570-1610 M) juga menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Nusantara. Pada waktu itu guru-guru agama banyak yang didatangkan dari Makkah dan telah menjalin erat dengan kerajaan Islam lain terutama dengan Demak, Banten, dan Melayu. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya.

Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini takhta kesultanan dijabat oleh Sultan Syarifuddin Bin Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang menjabat sejak tahun 2016 untuk menggantikan Sultan Mudaffar Syah II.¹⁶

Berikut ini adalah urutan dari beberapa kolano dan sultan yang pernah berkuasa di Ternate. Data berikut belum lengkap, karena masih banyak nama sultan yang belum tercantum. Penulisan nama-nama sultan ini diurutkan berdasarkan dengan urutan tahun dia menjadi sultan.

- a. Kolano Baab Mashur Malamo (1257-1272)
- b. Kolano Cili Aiya (1322-1331)
- c. Kolano Marhum (1465-1486)
- d. Sultan Zainal Abidin (1486-1500)

¹⁶ Di akses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Ternate, pada tanggal 13 februari 2022

- e. Sultan Bayanullah (1500-1521)
- f. Pangeran Taruwese
- g. Pangeran Tabarij
- h. Sultan Khairun (1534-1570)
- i. Sultan Baabullah (1570-1583)
- j. Sultan Mandar Syah (1648-1650)
- k. Sultan Manila (1650-1655)
- l. Sultan Mandar Syah (1655-1675)
- m. Sultan Sibori (1675-1691)
- n. Sultan Muhammad Usman (1896-1927)¹⁷

3. Kesultanan Tidore

Tidore merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat di gugusan kepulauan Maluku Utara, yang lokasi persisnya berada di sebelah barat pantai pulau Halmahera. Sebelum Islam datang ke bumi Nusantara, pulau Tidore dikenal dengan nama Limau Duko atau

¹⁷ Binuko Amarseto, *Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Media, 2015). Hal.255-256

Kie Duko yang berarti “pulau yang bergunung api.” Penamaan ini disesuaikan dengan kondisi topografi pulau Tidore yang memiliki gunung api—bahkan merupakan gunung tertinggi di gugusan kepulauan Maluku—yang oleh penduduk asli, gunung tersebut mereka namakan gunung Kie Marijang. Saat ini, gunung Marijang sudah tidak aktif lagi. Sedangkan untuk nama Tidore sendiri berasal dari gabungan dari tiga rangkaian kata bahasa Tidore, yaitu : To ado re (aku telah sampai).

Disebabkan karena letak geografisnya yang berada di antara pulau Sulawesi dan pulau Irian jaya, Kerajaan Tidore menjadi salah satu kerajaan besar yang berada di kepulauan Maluku sekaligus memiliki posisi yang sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Ditambah lagi bahwa kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga di juluki sebagai “the Spicy Island.” Pada saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia

perdagangan, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana akan melewati rute perdagangan tersebut. Para pedagang dari Arab dan India yang beragama Islam dan berperan dalam perdagangan internasional juga banyak yang berdagang dan menetap disana. Berawal dari situ, syiar agama Islam akhirnya sampai dan meluas di Maluku, seperti Ambon, Ternate, dan Tidore.

Agama Islam yang masuk ke Kerajaan Tidore dibawa oleh Ciriliati, Raja Tidore yang kesembilan. Ciriliati atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Keadaan seperti ini, telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesultanan Tidore merupakan satu dari empat kerajaan besar yang berada di Maluku, tiga lainnya adalah Ternate, Jajolo dan Bacan. Dari keempatnya, hanya Tidore dan Ternate-lah yang memiliki ketahanan politik, ekonomi dan militer.

Keduanya pun bersifat ekspansionis, di mana Ternate menguasai wilayah barat Maluku sedangkan Tidore mengarah ke timur yang wilayahnya meliputi Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Maba, Patani, Seram Timur, Rarakit, Werinamatu, Ulisiwa, Kepulauan Raja Empat, Papua daratan dan sekitarnya. Sejak awal berdirinya hingga raja yang ke-4, letak pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan berada di kota mana. Baru pada era Jou Kolano Balibunga, beberapa informasi mengenai pusat kerajaan Tidore mulai sedikit terkuak meski masih dalam perdebatan. Tempat yang menjadi pusat pemerintahan terdahulu Kerajaan Tidore tersebut adalah Balibunga. Namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana sebenarnya letak Balibunga ini. Ada yang mengatakannya di Utara Tidore dan ada pula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore selatan.

Pada tahun 1495 M, saat Kerajaan Tidore dipimpin oleh Sultan Ciriliati, letak pusat kerajaan berada di Gam Tina dan ketika Sultan Mansyur naik tahta pada tahun 1512 M, pusat kerajaan dipindahkan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Perpindahan posisi ibu kota baru ini berdekatan langsung dengan kerajaan Ternate dan hanya diapit oleh Tanjung Mafugogo dan pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang serta dekat dengan Kerajaan Ternate yang juga merupakan salah satu kerajaan besar, akhirnya lokasi ibukota yang baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.

Dalam sejarah kerajaan Tidore, tercatat sudah terjadi beberapa kali perpindahan ibukota karena sebab yang beraneka ragam. Tahun 1600 M misalnya, ibukota dipindahkan oleh Sultan ke 17 kerajaan Tidore yaitu Mole Majimu (Ala ud-din Syah) dari Rum ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan karena meruncingnya hubungan dengan Ternate, sementara

posisi ibukota sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa, perpindahan didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Toma Banga yang masih menjadi animis agar memeluk Islam. Perpindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan ke 33 yaitu Sultan Saif ud-din (1857 – 1865). Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soa-Sio hingga saat ini. Selain Kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore juga merupakan salah satu Kerajaan besar di jazirah Maluku Utara yang berhasil mengembangkan kekuasaannya terutama ke wilayah selatan pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian barat. Sejak 600 tahun yang lalu Kerajaan ini sudah mempunyai hubungan kekuasaan hingga sampai ke Irian Barat (Pesisir Tanah Papua).

Waktu itu, yang memegang kendali kekuasaan pemerintahan di Kerajaan Tidore adalah Sultan Mansyur, Sultan Tidore yang ke 12. Menurut

(almarhum) Sultan Zainal Abidin “Alting” Syah (Sultan Tidore yang ke 36) yang dinobatkan di Tidore pada 27 Februari 1947 / 26 Rabiulawal 1366 H, bahwa Kerajaan Tidore terdiri dari 2 bagian, yaitu:

- a. Nyili Gam
- b. Yade Soa-Sio se Sangadji se Gimelaha
- c. Nyili Gamtumdi
- d. Nyili Gamtufkange
- e. Nyili Lofu-Lofu
- f. Nyili Papua (Nyili Gulu-Gulu)
- g. Kolano Ngaruha (Raja Ampat)
- h. Papua Gam Sio
- i. Mavor Soa Raha

Disebutkan dalam catatan beliau, bahwa bukan Irian Barat melainkan Papua.

Masa Kejayaan Kerajaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku yang pada masa kekuasaannya antara tahun 1797 – 1805, Sultan Nuku memiliki nama lain seperti Sultan Said-ul Jihad

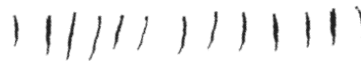
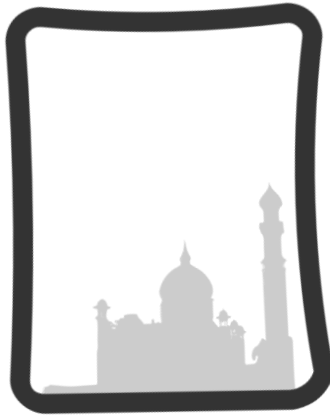
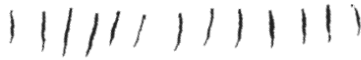
Muhammad al-Mabus Amir ud-din Syah alias Kaicil Paparangan yang oleh kawula Tidore dikenal dengan sebutan Jou Barakati. Pada masa pemerintahannya wilayah Kerajaan Tidore mencakup kawasan yang cukup luas bahkan mencapai Tanah Papua di selatan samudra pasifik. Wilayah sekitar pulau Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah Papua, gugusan pulau-pulau Raja Ampat dan pulau Seram Timur. Menurut beberapa tulisan di berbagai situs internet, dituliskan bahwa kekuasaan Tidore sampai ke beberapa kepulauan di pasifik selatan, diantaranya; Mikronesia, Melanesia, kepulauan Solomon, kepulauan Marianas, kepulauan Marshal, Ngulu, Fiji, Vanuatu dan kepulauan Kapita Gamrange. Disebutkan pula bahwa hingga hari ini beberapa pulau atau kota masih menggunakan identitas nama daerah dengan emblembel Nuku, antara lain; kepulauan Nuku Laelae, Nuku Alova, Nuku Fetau, Nuku Haifa, Nuku

Maboro, Nuku Wange, Nuku Nau, Nuku Oro dan Nuku Nono¹⁸

¹⁸ Binuko Amarseto, *Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Media, 2015). Hal. 258-261

BAB III

MASA KEJAYAAN DAN KEMUNDURAN KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA



A. Masa Kejayaan dan Kemunduran Kerajaan Islam di Indonesia

1. Masa Kejayaan Kerajaan Samudera Pasai

Berdirinya kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-13 M didukung oleh bukti adanya nisan-nisan kubur yang terbuat dari granit asal Samudera Pasai. Dari nisan itu, dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan ini meninggal pada bulan Ramadhan tahun 696 H, yang diperkirakan bertepatan tahun 1297 M.¹⁹ Puncak kejayaan Samudra Pasai ditandai dengan adanya perkembangan di bidang-bidang kehidupan kerajaan Samudra Pasai, salah satunya di bidang pendidikan.

Abu Abdullah ibn Batutah (1304-1368), seorang musafir asal Maroko yang singgah di Samudra Pasai dalam kitabnya berjudul *Rihlah ilah-Masyriq* (Pengembaraan ke Timur). Ibnu Batutah bercerita

¹⁹ Badri Yamin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 205.

bahwa Sultan Malik al-Zahir di Negeri Samatrah menyambutnya dengan penuh keramahan. Menurut Ibnu Batutah, penduduk Samatrah (Samudera) menganut mazhab Syafi'i.²⁰

Kerajaan Islam Samudera Pasai merupakan bukti sejarah perkembangan pendidikan Islam yang dilakukan oleh sebuah kerajaan Nusantara. Diantara bentuk Pendidikan Islam saat itu adalah melalui majelis *ta'lim* atau *halaqah*. Proses *halaqah* ajaran Islam yang dilakukan oleh kerajaan Samudera Pasai dilakukan di masjid istana bagi keluarga kerajaan di masjid-masjid lain, mengkaji di rumah-rumah guru, dari *halaqah* tersebut kemudian berkembang lembaga pendidikan Islam modern. Sementara itu, untuk luar kerajaan, *halaqah* ajaran Islam diduga sudah dilakukan di koloni-koloni tempat perdagangan Islam berdatangan

²⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Sejarah Nusantara Pada Era Kerajaan Islam*. https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_pada_era_kerajaan_Islam.

dipelabuhan-pelabuhan. Begitu juga para pedagang yang singgah di rumah-rumah penduduk mengajarkan agama Islam kepada pemilik rumah yang mereka singgahi.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat-pendapat Ibnu Batuthah dapat ditarik kepada system Pendidikan Islam pada masa kerajaan Samudera Pasai, yaitu: (1) Materi Pendidikan pengajaran agama bidang syariat ialah Fiqh mazhab Syafi'i. (2) Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis *ta'lim* dan *halaqah*. (3) Tokoh pemerintahannya merangkap sebagai tokoh agama. (4) Biaya Pendidikan bersumber dari Negara.²¹

Sebagai Kesultanan Islam, Samudera Pasai juga memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Tanah Jawa. Samudera Pasai banyak mengirimkan ulama serta muballigh untuk menyebarkan agama Allah SWT ke Pulau Jawa.

²¹ Rohmadi, *Lintas Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, cet. ke-1, (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018), 4-5.

Selain itu, banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Menurut tradisi, Wali Songo merupakan bukti eratnya hubungan antara Samudera Pasai dengan perkembangan Islam di Pulau Jawa. Konon, Sunan Kalijaga merupakan menantu Maulana Ishak, Sultan Pasai. Selain itu, Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon serta Banten, menurut tradisi putera daerah Pasai. Juga sejumlah bangsawan Aceh ikut pindah ke Majapahit (berdiri 1296 M) dan kelak menjadi penyebar agama Islam pertama di Jawa. Antara lain adik Putri Champa Bernama Pangeran Makhudum yang nantinya dikenal sebagai Sunan Ampel. Dengan izin kakak iparnya Raja Majapahit yang masih beragama Hindu, Makhudum diizinkan membuka pesantren. Izin tersebut diberikan agar dia bersedia menetap di Jawa dan kakaknya tidak merasa kesepian. Makhudum memilih Desa Ampel Gading di pinggir Sungai Mas, Surabaya, dan kemudian menjadi salah seorang Wali.

Kalau kita mendalami Serat Tajussalatin (kodifikasi hukum tata pemerintahan dan petunjuk memerintah dengan prinsip keadilan), kian jelas keterjalinan Samudera Pasai. Buku berbahasa dan berhuruf Jawa yang dipakai di Keraton Yogya tersebut merupakan salinan dari Kitab Tajussalatin, tulisan berhuruf Jawi berbahasa Pasai, berasal dari masa pemerintahan Sultan Alaud-Din Ri'ayat Syah (1589-1604). Syekh Yusuf-seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar, juga pernah menimba ilmu di Pasai. Data ini membuktikan bahwa meskipun zaman itu masih belum canggih, namun sudah terjalin jaringan intelektual antara Aceh dan Jawa dan juga dengan seluruh Nusantara.²² Dengan demikian, masa pemerintahan Malik as-Sholeh, Samudera Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di

²² Harian KOMPAS, “Teku Ibrahim Alfian, Keterikatan Samudera Pasai-Mataram”, 06 Mei 2003.

Tanah Air.

2. Masa Kemunduran Kerajaan Samudera Pasai

Kejayaan Kerajaan Samudera Pasai mulai mengalami ancaman dari Kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada sebagai mahapatih. Serangan Majapahit ke Samudera Pasai selain kepentingan politik, dipicu juga karena faktor kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan dan kemakmuran rakyat Kerajaan Samudera Pasai telah membuat Gajah Mada berkeinginan untuk dapat menguasai kejayaan itu. Ekspansi Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudera Pasai telah dilakukan berulang kali dan Kesultanan Samudera Pasai pun masih mampu bertahan sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka.

Kerajaan Samudera Pasai berlangsung sampai tahun 1524 M. Namun, pada tahun 1521 M, kerajaan

ini ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama tiga tahun, kemudian tahun 1524 M dianeksasi oleh raja Aceh, Ali Mughayatsyah. Selanjutnya, kerajaan Samudera Pasai berada di bawah pengaruh kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam.²³

3. Masa Kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam

Masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam yaitu bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan kerajaan Aceh adalah gampong (kampung) yang dikepalai oleh seorang keucik dan waki (wakil) dari keucik itu. Gampong-gampong yang letaknya berdekatan dan yang penduduknya melakukan ibadah bersama pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid, merupakan suatu kekuasaan wilayaji pula yang diberi nama mukim, yang memegang pimpinan mukim disebut imeum mukim. Dialah yang bertindak sebagai

²³ Taufik Abdullah (ed), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1992), 55.

imeum (imam) sembahyang pada setiap hari Jum'at yang diikuti sekurang-kurangnya oleh 40 orang laki-laki dewasa. Pada mulanya tiap-tiap mukim, ditetapkan harus berpenduduk 1.000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata. Hal ini tentunya dimaksud untuk kepentingan politis, sehingga mukim ini selain bersifat teokratis juga politis. Dalam perkembangannya, fungsi dari imeum mukim berubah menjadi kepala pemerintahan disebuah mukim yang mengkoordinasi kepala-kepala gampong atau keucik-keucik. Dengan berubahnya fungsi imeum mukim, berubah pula nama panggilannya yakni kepala mukim. Untuk pengganti sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut imeum mesjid (imam mesjid).²⁴

Jenang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah Meunasah

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Proyek IDSN, 1991), h.75-76.

(Madrasah) yang berarti tempat belajar atau sekolah, terdapat di setiap gampong dan mempunyai multi fungsi antara lain:

- a. Sebagai tempat belajar Al-Qur'an.
- b. Sebagai Sekolah Dasar, dengan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, Ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam.

Fungsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu untuk kampung itu.
- b. Sebagai tempat sholat tarawih dan tempat membaca Alquran di bulan puasa.
- c. Tempat kenduri Maulud pada bulan Mauludan.
- d. Tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idhul Fitri / bulan puasa.
- e. Tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung.

- f. Tempat bermusyawarah dalam segala urusan.
- g. Letak meunasah harus berbeda dengan letak rumah, supaya orang segera dapat mengetahui mana yang rumah atau meunasah dan mengetahui arah kiblat sholat.

Kerajaan Aceh telah menjalin suatu hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam terkemuka di Timur Tengah yaitu kerajaan Turki. Pada masa itu banyak pula ulama dan pujangga-pujangga dari berbagai negeri Islam yang datang ke Aceh. Para ulama dan pujangga ini mengajarkan ilmu agama Islam (Theologi Islam) dan berbagai ilmu pengetahuan serta menulis bermacam-macam kitab berisi ajaran agama. Karenanya pengajaran agama Islam di Aceh menjadi penting dan Aceh menjadi kerajaan Islam yang kuat di nusantara. Diantara para ulama dan pijangga yang pernah datang ke kerajaan Aceh antara lain Muhammad Azhari yang mengajar ilmu Metafisika, Syekh Abdul Khair Ibn Syekh Hajar ahli dalam bidang pogmatic dan

mistik, Muhammad Yamani ahli dalam bidang ilmu usul fikih dan Syekh Muhammad Jailani Ibn Hasan yang mengajar logika.

Tokoh pendidikan agama Islam lainnya yang berada di kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri. Ia merupakan seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf yang beraliran wujudiyah. Diantara karya-karya Hamzah Fansuri adalah *Asrar Al-Aufin*, *Syarab Al-Asyikin*, dan *Zuiat Al-Nuwahidin*. Sebagai seorang pujangga ia menghasilkan karya-karya, *Syair si burung pungguk*, *syair perahu*. Ulama penting lainnya adalah Syamsuddin As-Samathrani atau lebih dikenal dengan Syamsuddin Pasai. Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri yang mengembangkan paham wujudiyah di Aceh. Kitab yang ditulis, *Mir'atul al-Qulub*, *Miratul Mukmin* dan lainnya.

Ulama dan pujangga lain yang pernah datang ke kerajaan Aceh ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ia

menentang paham wujudiyah dan menulis banyak kitab mengenai agama Islam dalam bahasa Arab maupun Melayu klasik. Kitab yang terbesar dan tertinggi mutu dalam kesustraan Melayu klasik dan berisi tentang sejarah kerajaan Aceh adalah kitab *Bustanul Salatin*. Pada masa kejayaan kerajaan Aceh, masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) oleh Sultannya banyak didirikan masjid sebagai tempat beribadah umat Islam, salah satu masjid yang terkenal Masjid Baitul Rahman, yang juga dijadikan sebagai Perguruan Tinggi dan mempunyai 17 daras (fakultas).²⁵

B. Masa Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam

Faktor penyebab kemunduran Kerajaan Aceh antara lain:

²⁵ Muhammad Sabarudin, “Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan”, *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1, 2015, 144-145.

a. Kekalahan perang Aceh melawan Portugis di Malaka pada 1629 yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda (kapal-kapal) yang cukup besar.

b. Tidak seperti Iskandar Muda yang memerintah dengan tangan besi, penggantinya, Iskandar Tsani, bersikap lebih liberal, lembut dan adil. Pada masanya, Aceh terus berkembang untuk masa beberapa tahun. Pengetahuan agama maju dan pesat. Akan tetapi, kematiannya diikuti oleh masa-masa bencana. Tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgasana pada tahun 1641-1699, terpecah belah. Setelah itu, pemulihan kembali kesultanan tidak banyak bermanfaat, sehingga menjelang abad ke-18 M kesultanan Aceh merupakan bayangan belaka dari masa silam dirinya, tanpa kepemimpinan kekacauan beliau.²⁶

²⁶ Badri Yamin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.210.

c. Permusuhan antara kaum ulama penganut ajaran Syamsudin as Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin ar Raniri.

d. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintah pusat melepaskan diri dari Aceh seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau dan Siak.

e. Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa lain berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh yang berakibat perekonomian Aceh makin lemah.

C. Masa Kejayaan Kerajaan Demak

Wali songo memerintahkan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Tekad untuk mendirikan kerajaan Demak yang merdeka menjadi semakin bulat mengingat daerah Demak mempunyai

peluang untuk berkembang pesat menjadi kota besar dan pusat perdagangan.²⁷

Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan pelaksanaannya di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Disana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang Badal untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam.²⁸

Kitab keluaran Demak adalah Usul 6 Bis, yaitu kitab yang ditulis tangan berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, karangan ulama Sarkandi. Isinya tentang dasar-dasar ilmu agama Islam. Kitab lainnya adalah Tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin dan Jalaluddin as Suyuthi. Adapula kitab

²⁷ Binuko Amarseto, *Ensiklopedi Kerajaan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Media, 2015), h.110-111.

²⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan & Perkembangan*, (Jakarta, Rajawali Press, 1995), h.34.

agama Islam yang hingga kini masih dikenal, yaitu Primbon, berisi catatan tentang ilmu-ilmu agama, macam-macam doa, obat-obatan, ilmu gaib, bahkan wejangan para wali. Selain itu, dikenal pula kitab-kitab yang dikenal dengan nama Suluk Sunan Bonang, Suluk Sunan Kalijaga, Wasita Jati Sunan Geseng dan lain-lain. Dimana seluruh kitab tersebut berbentuk diktat dan ditulis tangan. Terlepas dari kitab-kitab agama di zaman Demak yang terbilang sedikit, dalam kenyataannya agama Islam berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan esatnya. Hal ini dikarenakan peranan para Sunan dan Kyai dalam melaksanakan pendidikan dan penyiaran Islam mengikuti sistem yang telah diajarkan nabi. Selain itu, dengan memberikan suri tauladan yang baik dalam perangai dan perbuatan nyata. Ada hubungan khusus yang terjalin antara

Kerajaan Demak dan Walisongo, dimana peranan walisongo di bidang dakwah sangatlah besar.²⁹

D. Masa Kemunduran Kerajaan Demak

Faktor kemunduran kerajaan Demak yaitu hubungan antara Penangsang dan Jaka Tingkir. Adapun pun faktor lain kemunduran kerajaan Demak yaitu peralihan aliran agama. Peralihan kekuasaan politik dari dinasti Jin Bun kepada sultan Pajang Adiwijaya diikuti oleh perubahan aliran agama Islam, dari Madzhab Hanafi menjadi aliran Syi'ah. Perubahan aliran agama ini dinyatakan dalam berita Tionghoa dari klenteng Talang dengan meminjam perkataan Fatahillah, bekas panglima tentara Demak, yang kemudian mendirikan kesultanan Cirebon pada tahun 1552.

²⁹ Muhammad Sabarudin, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan", *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1, 2015, h.146.

Pada masa pemerintahan Jin Bun, aliran Syi'ah tidak memperoleh pasaran di kalangan orang-orang Islam. Aliran Syi'ah dianggap sebagai ajaran yang sesat. Salah seorang wali penganut Islam Syi'ah pada masa pemerintahan Jin Bun, Bernama Syaikh Siti Jenar atau Syaikh Lemah Abang, dikenakan hukuman mati oleh para wali penganut aliran Hanafi. Seperti telah diuraikan di muka, aliran Syi'ah memang pernah berkembang di kesultanan Daya/Pasai dari tahun 1204 sampai 1285. Boleh dikatakan, justru aliran Syi'ah itulah yang mula-mula dikembangkan di Indonesia. Aliran Syi'ah yang banyak dianut oleh para ulama dari Gujarat, setelah kesultanan Daya/Pasai ditirunkan oleh Mara Silu, dibasmi. Kesultanan baru Samudera Pasai menganut aliran Syafi'i. Pada tahun 1299, setelah terbentuk kesultanan Aru/Barumun di bawah pimpinan Malikul Mansur aliran Syi'ah angin baru.³⁰

³⁰ Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di*

E Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon

Syarif Hidayatullah se. orang pendakwah Islam yang tidak pernah penat untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa Bahagian Barat. Penyebaran Dakwah Islam yang diamalkan Syarif Hidayatullah di Cirebon sebagai Sultan dan penguasa di Cirebon yang cukup lama, ternyata mengikuti jejak langkah yang telah diamalkan oleh Rasulullah s.a.w. seperti berdakwah dengan melalui perkahwinan, menyatukan para pemimpin yang mempunyai pengaruh yang besar di masyarakatnya, strategi perpolitikan, peperangan dan sebagainya. Dakwah Syarif Hidayatullah lebih menekankan “Dakwah bil Hal” yakni Syarif Hidayatullah lebih menekankan dengan praktik langsung bersama-sama masyarakat dan lebih menekankan “uswah” atau suri tauladan yang baik kepada masyarakat awam.

Nusantara, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2005), h.246-248.

Pesantren (Ma'had) di Cirebon tepatnya di Amparan Jati pertama kali ditumbuhkan oleh seorang ulama yang bernama Syaikh Datuk Kahfi atau yang dikenal dengan Syaikh Nur Jati. Pesantren yang ditumbuhkan oleh Syekh Nur Jati itu dijadikan olehnya untuk menerima para pelajar yang datang dari berbagai daerah yang mana mereka bermaksud untuk belajar agama Islam dan pesantren itu juga dijadikan oleh Syekh Nur Jati sebagai pusat pengembangan Islam di Cirebon. Pesantren itu berkembang pesat dan saat Syekh Nur Jati sudah lanjut usia lalu diteruskan oleh Raden Walangsungsang yang baru kembali dari Makkah.

Syarif Hidayatullah menjadi ulama (Kiyai) di Pesantren Amparan Jati, ia mengajar ilmu-ilmu agama (al-Qur'an, Hadis, Aqidah, Akhlak (tasawuf) dan fiqh). Ilmu fiqh yang diajarkan pada santri (pelajar) itu fiqh Madhab al-Shafi'i, sedangkan ilmu Tauhid (Aqidah) bermadhab al-Ash'ari. Selama beberapa tahun, Syarif

Hidayatullah mengajar di Pesantren itu sebelum ia kembali lagi di Tanah Palestin untuk menjemput ibunya yang masih tinggal bersama adiknya kerana ia sudah sangat lama meninggalkan ibunya. Sekembali dari Tanah Arab, ia bersama ibunya kembali ke Tanah Cirebon dan ibunya pun tidak mau duduk di Istana Pakungwati melainkan ia duduk bersama Syarif Hidayatullah di Pesantren Amparan Jati.³¹

F. Masa Kemunduran Kerajaan Cirebon

Kemunduran kerajaan Cirebon ditandai dengan pernikahan-pernikahan yang kerap terjadi antara keluarga kerajaan Cirebon dan Mataram, semenjak tahun 1615 pengaruh Mataram di Cirebon semakin menguat. Bertolak belakang dengan ayahnya, Sultan Agung yang anti-Belanda, Amangkurat I malah menjalin persahabatan dengan VOC yang jelas-jelas

³¹ Besta Besuki Kertawibawa, *Dinasti Raja Petapa II Syarif Hidayatullah Sang Pengembang Kerajaan Cirebon*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2009), h.104.

hendak melemahkan Mataram.³² Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya Kerajaan Cirebon, karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba VOC.

G. Masa Kejayaan Kerajaan Banten

Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama 18 tahun (1552-1570 M), ia telah memberikan andil terbesarnya dalam meletakkan fondasi Islam di nusantara sebagai salah seorang pendiri Kesultanan Banten. Keberhasilannya membangun istana yang selanjutnya dinamakan Surosowan dan menjadi ibu kota Kerajaan Banten sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Islam, semakin memperkuat Banten dengan

³² Ivan Taniputera, *Ensiklopedi Kerajaan-kerajaan Nusantara (Hikayat dan Sejarah)*, (Yogyakarta: Istana Media, 2015), h.42-43.

Islamnya, karena menjadi pusat pertemuan dan pembelajaran agama Islam.³³

Pada masa puncak perkembangannya, Kesultanan Banten semakin menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat pendidikan Islam. Banyak orang dari luar Banten belajar Islam ke berbagai pesantren di Banten. Salah satu pesantren besarnya adalah Kesunyatan yang memiliki masjid dianggap paling tua dari Masjid Agung Banten. Pada masa Maulana Muhammad yang terkenal sangat shaleh dan banyak menulis kitab sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan agama Islam dan kesinambungan pelaksanaan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tersebut semakin pesat perkembangannya pada abad ke 16-17 masehi,

³³ Muslimah, *Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 13, Nomor 1, Juni 2017, h.138.

terutama dalam masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1672).³⁴

Adapun bukti lainnya yaitu dengan kehadiran bangunan peribadatan berupa masjid dan sarana pendidikan Islam, seperti pesantren dan sekolah-sekolah Islam. Di samping itu, ia juga mengirim muballig ke berbagai daerah yang telah dikuasainya. Usaha yang telah dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam menyebarkan Islam dan membangun Kesultanan Banten kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya.³⁵

H. Masa Kemunduran Kerajaan Banten

Sejak pemerintahan dipimpin oleh Sultan Haji, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan rakyat Banten semakin menderita. Karena bantuan dan

³⁴ Muslimah, *Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 13, Nomor 1, Juni 2017, h.139.

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam 1*. Cet. 9, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 238.

dukungan VOC kepada Sultan Haji, akhirnya Sultan Haji memberikan wilayah Lampung kepada VOC sebagai bentuk kompensasi. Pada tahun 1687, Sultan Haji meninggal dunia dan VOC semakin mencengkeram Kesultanan Banten. Pemerintahan Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Abdul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin, pada pemerintahannya konflik internal kerajaan semakin memuncak. Rakyat Banten terus melakukan perlawanan hingga awal abad ke-19, yang akhirnya Sultan Banten meminta bantuan VOC dan kemudian sang Gubernur Jenderal Deandels menghapus Kesultanan Banten secara resmi pada 1813.

Pendidikan masyarakat Banten semakin terpuruk di bawah kekuasaan Belanda saat itu. Pendidikan yang didirikan Pemerintah Belanda tidak terjangkau oleh masyarakat pribumi. Selain jumlah yang sangat sedikit (hanya ada di kota-kota kewadanaan saja), juga syarat untuk dapat belajar sangat berat, dan cenderung sengaja

dipersulit dengan bermacam persyaratan. Karena memang tujuan sesungguhnya dari didirikannya sekolah oleh Belanda, hanyalah untuk memenuhi pekerja *ambtenar* yang jumlahnya tidak perlu banyak. Rakyat pribumi sebagian besar hanya dibutuhkan sebagai pekerja kasar yang tidak ada hubungannya dengan menuntut ilmu di sekolah, dalam arti penting asal memiliki tenaga yang kuat saja.³⁶

³⁶ Muslimah, *Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Volume 13, Nomor 1, Juni 2017, h.147-148.



BAB IV

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

A. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu yang terkenal dan kuat, dan merupakan salah satu kerajaan paling kuat di dunia pada saat itu. Dalam catatan sejarah kepulauan Indonesia, kerajaan Majapahit diyakini sebagai salah satu contoh paling awal dari perpaduan budaya antara Hindu dan Budha. Pada masa

kerajaan Majapahit, sejumlah prestasi tambahan diraih, salah satunya kemajuan dalam bidang agama. Ada dua tanda yang pasti dapat menggambarkan pertumbuhan komunitas spiritual di suatu tempat, dan indikator tersebut adalah institusi keagamaan yang ada dan keragaman agama yang dianut di daerah tersebut. Jumlah orang yang menganut agama tertentu dapat ditentukan dengan bantuan sumber tertulis yang mempublikasikan informasi tersebut. Fakta ini saja sudah cukup menjadi bukti untuk menggambarkan keberadaan berbagai agama dan, sebagai akibatnya, tingkat toleransi yang tinggi di antara kelompok-kelompok agama. Meskipun pengaruh Islam terhadap masyarakat Majapahit tidak sebesar pada masa kerajaan Islam, sisa-sisa keberadaannya masih tertanam kuat dalam budaya negara.

Kerajaan Majapahit adalah rumah bagi berbagai praktik dan kepercayaan agama. Menurut Santiko, ada beberapa agama yang berbeda; namun, aliran Buddha

Mahayana dan agama Siwa, yang keduanya berakar pada sekte Shivasiddhanta, adalah yang paling terkenal dari agama-agama ini. Selain Waisnawa, agama-agama lokal, dan berbagai agama lainnya, ada juga sejumlah agama Shiva Bhairawa lainnya. Agama-agama ini fokus pada pemujaan dewa Siwa dalam berbagai bentuk. Tidak hanya itu, agama Islam juga mulai berkembang pada masa Majapahit. Islam tidak meninggalkan banyak jejak di Majapahit, meskipun faktanya masih dianggap sebagai pencapaian besar sepanjang era Majapahit. Sisa-sisa ini cukup terlihat. Di Troloyo, Trowulan, yang berada di Kabupaten Mojokerto, terdapat sebuah pemakaman Islam kuno yang telah dilestarikan selama bertahun-tahun. Fakta bahwa ajaran agama ini ada di masa lalu dapat ditunjukkan dengan penggunaan bukti ini. Berdasarkan prasasti di batu nisan, makam ini diyakini dibangun antara tahun 1203 dan 1533 Saka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa kejayaan kerajaan

Majapahit, khususnya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, terdapat komunitas Muslim yang cukup banyak. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa makam ini berisi makam-makam umat Islam karena letak makam yang berdekatan dengan keraton. Muslim ini mungkin penduduk kota atau anggota keluarga kerajaan yang masuk Islam.³⁷

Sangat menarik untuk berpikir bahwa Islam berasal dari sebuah negara yang penduduknya telah memeluk agama mereka untuk waktu yang lama. Pendirian komunitas Islam di Majapahit tidak mengalami kesulitan. Karena sistem hukum Majapahit memang memasukkan peraturan-peraturan tentang aliran-aliran agama tertentu, dan ada pejabat yang mengawasi agar peraturan-peraturan itu dipatuhi. Pejabat khusus ini dapat disebut sebagai Dharma Upapatti atau Dharma Dikarana.³⁸ Menurut Wertheim yang dikutip dalam Amin dan Ananda (2018), salah satu ciri Islam yang

³⁷ Putri, R.H. *Majapahit Menguasai Daratan dan Lautan*. (Retrieved from <https://historia.id/kuno/articles/majapahit-menguasai-daratan-dan-lautan-vxJd8/page/1>.) 2019

³⁸ Pinuluh, E.D. *Pesona Majapahit*. (Yogyakarta: Buku Biru 2010)

menarik perhatian masyarakat nusantara adalah tidak adanya kasta. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang menerima Islam dan mengadopsinya sebagai agama pilihan.³⁹

1. Tokoh Besar Penyebar Agama Islam di Majapahit

Wali Songo tidak memiliki peran yang menentukan dalam setiap aspek pertumbuhan Islam pada masa Majapahit. Ada orang-orang yang menduduki posisi otoritas sebelum dakwah Wali Songo. Berikut ini adalah daftar orang-orang yang berperan penting dalam proses Islamisasi Kerajaan Majapahit.

a. Syekh Jumadil Kubro

Ada konsensus di antara para ahli bahwa Syekh Jumadil Kubro harus disebut sebagai kakek buyut para

³⁹ Amin, F., & Ananda, R. A. (2018). *Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Telaah Teoritik tentang Proses Islamisasi Nusantara*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 18(2), 67-100.

wali. Nama Syekh Jumadil Kubro sangat terkenal di seluruh Jawa karena beliau adalah ustadz pertama yang berpraktik di Jawa sebelum Wali Songo berdakwah. Ia umumnya dianggap sebagai orang yang memprakarsai paradigma pendidikan Islam yang digunakan di Jawa. Sebagai alternatif, orang bisa mencirikannya sebagai tokoh Islam awal yang hidup pada era Majapahit.

Penampakan Syekh Jumadil Kubro yang paling awal didokumentasikan di Jawa berasal dari abad ke-14. Begitu menginjakkan kaki di Kerajaan Majapahit, ia disambut dengan keadaan pergolakan politik. Ajaran agama yang bermula di Jawa pada waktu itu, terutama Buddha dan Hindu, masih dipraktikkan dengan giat di sana. Menurut Isno (2015), pendidikan Islam mendapat banyak perhatian pada masa pemerintahan Syekh Jumadil Kubro; namun, tidak ada sistem pesantren pada masa Syekh Jumadil Kubro berdakwah. Di sisi lain, pendidikan Islam dilakukan di tempat-tempat ibadah

dan rumah para ulama yang dikenal dengan sebutan ulama.⁴⁰

b. Sunan Gresik

Maulana Malik Ibrahim, juga dikenal sebagai Maulana Maghribi (Sunan Gresik), adalah seorang da'i yang hidup pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana dan berkhotbah pada masa itu (1389-1427). Selain menjadi yang pertama dari sembilan wali, Maulana Malik Ibrahim juga putra Syekh Jumadil Kubro, menjadikannya yang paling senior dari sembilan wali. Saat itu tahun 1391 ketika dia pertama kali datang ke Jawa. Yuliantini membeberkan fakta bahwa Maulana Malik Ibrahim memang adik dari ratu dinasti Majapahit kelahiran Campa. Ia mengklaim hal itu masih terjadi hingga saat ini. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya berdakwah kepada masyarakat umum, tetapi juga berdakwah

⁴⁰ Isno, I. *Pendidikan Islam Masa Majapahit Dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro*. (Jurnal Pendidikan Agama 2015)

kepada anggota keluarga kerajaan Majapahit, termasuk raja dan ratu. Namun, orang-orang biasa adalah target audiens utamanya.⁴¹ Yuliantini melanjutkan, Sunan Gresik mengawali kiprahnya sebagai pendakwah dengan mendirikan bisnis retail di awal karirnya. Selain itu, berkat pengetahuannya yang luas, ia mampu membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam bertani maupun mereka yang sakit dengan menggunakan komponen tradisional.

c. Sunan Ampel

Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat adalah nama lengkap Sunan Ampel. Ia lahir di Champa (sekarang bagian dari Kamboja) sekitar tahun 1401. Sebagai putra ulama terkenal Syekh Maulana Malik Ibrahim, ia adalah anggota keluarga bangsawan dan keturunan bangsawan. Karya dakwahnya dimulai

⁴¹ Yuliantini. *Islamisasi di Lingkungan Kerajaan Majapahit oleh Maulana Malik Ibrahim Tahun 1391-1419 M.* (thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Sleman, 2017)

ketika ia mendirikan Pesantren Ampeldenta. Di sana, ia menginstruksikan generasi berikutnya dari penginjil Islam. Di antara murid terkenal Sunan Ampel adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Drajat.

Sunan Ampel juga bertanggung jawab atas terciptanya jaringan dakwah dan kekerabatan melalui praktik mengatur pernikahan antara putra dan putri penyebar Islam dan penguasa kerajaan Majapahit. Selain itu, ia menaruh perhatian besar pada bidang budaya dan seni.⁴² Misalnya, Retna Panjawati, putri Arya Lembu Sura yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Putri Sunan Ampel, Mas Murtosimah, menikah dengan Raden Patah, juga dikenal sebagai Adipati Demak, dan seterusnya secara turun-temurun. Menurut Babad Tanah Jawa, Raden Rahmat adalah anak Makdum Ibrahim di Campa. Ia

⁴² Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, ((Jakarta : Bumi Aksara 1995), h. 140

juga keponakan dari putri Campa Dwarawati, Prabu Wijaya, yang menikah dengan paman Raden Mercy. Prabu Wijaya menikah dengan paman Raden Mercy.⁴³

Karena perkembangan masyarakat pada masa itu, sebagian besar dari mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan langsung dengan ajaran Islam. Beberapa contoh perilaku ini termasuk mempraktikkan animisme, mengonsumsi alkohol, bertaruh pada sabung ayam, dan dipenjara. Oleh karena itu, Sunan Ampel menekankan prinsip-prinsip Moh Limo berikut dalam khotbahnya: Moh Utama, yang berarti menghindari perjudian; Moh Ngombe, yang artinya menghindari mabuk; Moh Maling, yang artinya menghindari mencuri; Moh Madat, yang artinya tidak merokok candu; dan Moh Madon, yang artinya menghindari mencuri (tidak berzina).

⁴³ Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya negara-Negara Islam di Nusantara* (Lkis Printing Cemerlang, 2005) Hal. 95

2. Metode dakwah yang dilaksanakan dalam Penyebaran Islam

Gerakan dakwah Wali Songo merupakan upaya yang telah dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam melalui cara-cara damai. Hal ini dilakukan khususnya dengan berpegang pada konsep *maw izhatul hasanah wa mujdalam billati hiya ahsan*, yaitu metode penyebaran ajaran Islam melalui penggunaan bahasa dan bahasa yang baik. tata krama. Selama kurun waktu tersebut, para ulama Islam mengemas ajaran Islam dalam bentuk ajaran yang mudah. Ajaran tersebut terkait dengan paham Islam yang dianut oleh masyarakat setempat atau tujuan Islam “untuk berlabuh sesuai dengan norma budaya dan kepercayaan penduduk”. Pelaksanaan dakwah dengan cara ini memakan waktu yang cukup lama, namun dilakukan secara terorganisir dan damai.

Thomas W. Arnold berpendapat dalam bukunya "The Preaching of Islam," yang pertama kali

diterbitkan pada tahun 1977 dan berjudul "The Preaching of Islam," bahwa pertumbuhan dan perkembangan Islam yang damai lebih merupakan hasil langsung dari upaya mereka yang menyebarkan Islam daripada hasil langsung dari upaya mereka yang menyebarkan Islam. dari anggota pemerintah negara bagian.⁴⁴

Selain itu, metode dakwah yang dilakukan oleh para wali tidak lepas dari amanah yang diberikan oleh Sultan Turki Muhammad I ketika pertama kali membentuk tim yang dikirim ke Jawa pada tahun 1404 M. Hal ini dikarenakan para wali tersebut bertugas untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Sultan kepada mereka. Amanat ini lebih menekankan, bukan pada pengetahuan agama para anggota, melainkan pada pengalaman mereka di bidang administrasi negara dan masyarakat. Dalam arti yang lebih sempit, keputusan

⁴⁴ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo* (Depok: Pustaka Iman, 2017),159

untuk melaksanakan kebijakan ini dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih besar yang ada di pulau Jawa pada saat itu.

Selama periode ini, Walisongo menerapkan strategi-strategi berikut, yang kesemuanya sangat penting bagi keberhasilan organisasi dalam tujuannya menyebarkan pendidikan Islam di seluruh Jawa:

a. Jalur keluarga/perkawinan

Diriwayatkan dalam Babad Tanah Jawi bahwa Raden Rahmat, dalam upaya memperluas dakwah Islam, salah satu cara yang ditempuhnya adalah menjalin hubungan silsilah dengan tokoh-tokoh Islam muda yang mayoritas adalah anak-anaknya sendiri. . Ini adalah salah satu cara yang dia coba untuk memperluas dakwah Islam. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai tujuannya. Besar kemungkinan visi Raden Rahmat untuk menikahkan keturunannya akan menjadi keputusan penting dalam perkembangan Islam di Jawa

di tahun-tahun mendatang. Hal ini karena Raden Rahmat memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan. Dan pada tahun-tahun berikutnya, hampir semua penerus Raden Rahmat mencapai posisi penting dalam sejarah pemerintahan Jawa, yang menyebabkan penyebaran Islam dengan cepat ke seluruh wilayah.⁴⁵

b. Pesantren

Pendidikan Islam berupa pendidikan vihara dan asrama yang digunakan oleh para rahib dan pendeta untuk mengajar dan menuntut ilmu disebut dengan pendidikan Pesantren, yang dipelopori oleh Syeh Maulana Malik Ibrahim. Jenis pendidikan Islam ini digunakan oleh para rahib dan pendeta untuk mengajar dan belajar. Raden Rahmat dianggap paling berhasil mendidik ulama dan mendirikan pesantren, meskipun Syeh Maulana Malik Ibrahim di Gesik disebut-sebut sebagai orang pertama yang menyampaikan budaya

⁴⁵ Ridin Sofwan, *Islamisasi di Jawa*, (Pustaka Pelajar, 2000)

pra-Islam melalui sistem pendidikan pesantren. Dalam waktu yang relatif singkat, nama Ampel Denta menjadi terkenal karena perkembangan pesantren yang sejahtera.

c. Budaya

Walisongo memberikan pengaruh yang signifikan terhadap budaya Jawa melalui kontribusinya. Ini mencakup tidak hanya tindakan belajar dan memperoleh pengetahuan, tetapi juga kegiatan seperti kesenangan dan kesibukan, serta seni dan aspek budaya lainnya secara umum. Dalam hal ini, Sunan Bonang adalah orang yang bertanggung jawab atas prestasi akademik Adam. Prabu Hanyakra Kusuma adalah gelar yang disandangnya karena dianggap sebagai raja baik ilmu pengetahuan maupun agama. Ia mendapat bantuan dari Sunan Kalijaga dengan seni dan budayanya.

Filosofi bajak dan cangkul termasuk dalam beberapa karya Sunan Kalijaga yang berkaitan dengan pertanian. Untuk menarik perhatian dan kepatuhan

masyarakat terhadap ajakan Sunan Kalijaga dan para wali lainnya, pihaknya berencana meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat dengan memperkuat sarana dan prasarana.

d. Politik

Para wali bekerja dalam sistem politik untuk menyelesaikan misi mereka menyebarkan dakwah Islam di seluruh Jawa. Sunan Giri telah memantapkan dirinya sebagai otoritas terdepan Walisongo dalam segala hal yang berkaitan dengan politik negara. Selain itu, menerbitkan peraturan administrasi dan pedoman prosedur untuk pengadilan. Dalam hal ini, Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang ahli dalam bidang hukum, sistem hukum, dan peradilan.

B. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Sriwijaya

Sejarah masuknya Islam ke Palembang membawa seseorang pada kesimpulan bahwa menurut bukti-bukti

terbaru yang diperoleh para arkeolog melalui penemuan peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan Islam di Palembang, Islam masuk ke Palembang pada abad ketujuh Masehi oleh kaum Muslim yang melakukan perjalanan. adalah pedagang dan ingin terlibat dalam perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Kesimpulan ini dapat ditarik dari sejarah masuknya Islam ke Palembang. Dalam nada yang sama, baik perkembangan politik dan ekonomi Sriwijaya terus maju sampai abad ke-12 Masehi; namun, awal periode kemunduran tidak dimulai sampai akhir abad yang sama.⁴⁶

Sriwijaya bekerja sama dengan raja-raja Arab, khususnya di bawah Dinasti Umayyah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, terbukti dengan masuknya Islam di Palembang, yang dibawa oleh para pedagang dari Arab langsung pada abad ketujuh dan

⁴⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press 2008) h. 194

berlanjut pada abad kedelapan. Kemitraan ini terjadi di bawah pemerintahan Sriwijaya atas Palembang (717 M). Dalam upaya untuk saling menguntungkan hubungan bilateral mereka, kerajaan Sriwijaya Palembang dan dinasti Umayyah menjalin hubungan kerja yang baik. Dalam catatan lain disebutkan bahwa hubungan kerjasama tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lain, terbukti dengan kata-kata surat yang ditujukan oleh raja Sriwijaya kepada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang meminta pengiriman seorang pendeta ke Sriwijaya. Dalam surat ini, raja Sriwijaya meminta seorang pendeta untuk dikirim ke Sriwijaya. Data sejarah mengungkapkan bahwa ada hubungan yang menguntungkan antara keduanya, dan ini memunculkan atribut pribadi seorang penguasa, yang didasarkan pada keyakinan agama yang mereka anut. Raja-raja dinasti Umayyah beragama

Islam, sedangkan raja-raja kerajaan Sriwijaya beragama Buddha.⁴⁷

Karena Palembang adalah ibu kota kerajaan Buddha, tampaknya Islam tidak bisa langsung mendapat tempat di hati masyarakat Sriwijaya. Keadaan ini bertahan sampai hubungan Sriwijaya dengan dinasti Umayyah menguat dalam segala hal. Kehadiran saudagar muslim di Palembang tentunya membawa dampak yang baik bagi masyarakat.

Masuknya Islam ke Palembang, padahal jumlah penduduk muslim jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Sriwijaya. Jelas, kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dua raja antara

⁴⁷ Wandiyono, dkk. *Nilai – nilai Dealiktika Hubungan Sriwijaya dengan Dinasti Umayyah*, (Criksetra : Jurnal Pendidikan Sejarah, 2020) Vo.9 No.2 h. 163

dinasti Sriwijaya dan Uamayah pada abad kedelapan Masehi.⁴⁸

1. Peserta Didik/Murid. Para siswa dibagi menjadi dua kategori: mereka yang pewaris istana atau bangsawan, dan mereka yang rakyat jelata. Orang yang tinggal di luar keraton disebut rakyat jelata. Pekerjaan utama mereka adalah bertani dan melayani di istana. Pelajar yang bukan berasal dari daerah ini, juga dikenal sebagai pelajar yang datang untuk belajar dari berbagai negara dan daerah, biasanya adalah turis yang juga sedang menuntut ilmu, dan Sriwijaya menjadi salah satu destinasi yang mereka kunjungi.

2. Cara Pendidikan. Abad kedelapan hingga kedelapan berfungsi sebagai periode waktu yang tercakup dalam deskripsi sistem pendidikan tinggi ini. Para profesor besar Ulama tidak bisa lagi

⁴⁸ Wandiyono, dkk, *Hubungan Sriwijaya dengan Dinasti Umayyah terhadap Masuknya Agama Islam di Palembang Pada Abad VII Masehi* (SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah 2020) Vol.2 No.2 h. 33

mengomunikasikan sistem pendidikan kepada sejumlah besar siswa yang tinggal di asrama selama abad-abad terakhir sebelum runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Di padepokan, murid-murid tidak hanya diajari pengetahuan umum, tetapi juga pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai agama dan praktik spiritual. Selain itu, orang perlu memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

3. Organisasi Pendidikan. Pada saat itu, tidak mungkin untuk mengidentifikasi lembaga pendidikan dengan tingkat kepastian apa pun. Di sisi lain, ada banyak yang percaya bahwa keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dasar pada masa itu. Dalam konteks pengajaran teologi Islam, akademi-akademi monastik yang ada di Jawa Timur pada abad ke-10 dapat dipahami telah memenuhi peran madrasah. Pupuh Negarakertagama Menurut Pupuh 32 sampai 35, pada tahun 1339, Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke sebuah asrama siswa yang terletak di

tengah-tengah hutan lereng bukit. Menurut Dr. Pupuh Negarakertagama Pigeaud, asrama "Sagara" adalah sebuah mandala dan dulunya berfungsi sebagai pusat lingkaran suci pertapa desa yang tersebar. Pigeaud dapat mengkonfirmasi informasi ini setelah berkonsultasi dengan Dr. Pupuh Negarakertagama.⁴⁹

Selama masa Kerajaan Sriwijaya, rasa kewajiban seorang raja dapat diukur dari sejauh mana ia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Untuk menumbuhkan di antara penduduknya perasaan bahwa mereka adalah bagian integral dari kerajaan. Yang pada gilirannya mendorong rasa tanggung jawab untuk berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang damai dengan menjalani kehidupan yang toleran, adil, dan damai. Seperti yang dilakukan Raja Balaputradewa. Di bawah pemerintahannya pada abad ke-9 Masehi

⁴⁹ Anggar Kaswati, Dkk, *Analisis Sistem Pendidikan Pada Zaman Kerajaan Sriwijaya – Majapahit Dan Zaman Modern Dalam Kaitannya Dengan Peradaban Bangsa Indonesia*, (Akademika : Jurnal Ilmiah Dan Kependidikan, 2020) Vol. 19 No. 1. Hal. 70

kerajaan maritim Sriwijaya mencapai masa keemasannya dan mengalami perkembangan yang pesat. Karena raja sangat berdedikasi untuk memenuhi tanggung jawab dan komitmennya, ini ternyata hasilnya. Selama periode sejarah itu, sebagai kerajaan maritim yang berkembang pesat.⁵⁰

C. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Padjajaran

Kerajaan Pajajaran mencapai puncaknya ketika Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi memerintah. Dikatakan bahwa Sri Baduga Maharaja tidak hanya memimpin bangsanya ke puncak kemegahannya tetapi juga memiliki reputasi sebagai penguasa pluralis selama masa pemerintahannya. Dinyatakan bahwa agama Buddha dan Hindu, dua kepercayaan kuno orang

⁵⁰ Yeni Ratmelia, *Nilai Moral Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah : Analisis Terhadap Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas X*, (HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, P-Issn:2620-4789) H. 182

Sunda, memberikan pengaruh besar pada penduduk selama masa Kerajaan Pajajaran. Kedua agama ini dianggap berasal dari Sunda. Pajajaran, sebaliknya, menjadi saksi awal diterimanya agama baru, di samping dua agama utama yang menjadi mayoritas penduduk Sunda saat itu. Selama periode itu, Prabu Siliwangi tidak menyadari munculnya agama baru yang disebut Islam dan tidak menentang legitimasinya.

Karena Bratalegawa adalah satu-satunya bangsawan di Galuh yang pertama kali masuk Islam, ia diberi gelar kehormatan Haji Purwa Galuh. Dia diberi hadiah seorang putra melalui penyatuan pernikahannya dengan seorang putri Gujarat. Diyakini bahwa hubungan damai yang terjalin antara agama Buddha dan Islam akan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan setelah mengetahui bahwa Cirebon telah diubah menjadi kerajaan Islam, Sri Baduga Maharaja, juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi, tidak menunjukkan tandatanda kemarahan. Fakta bahwa

Prabu Siliwangi memiliki hubungan dengan Demak yang bisa disebut "cukup dekat" adalah akar kemarahannya. Bahkan, koalisi pejuang dari Demak dan Cirebon menyerang dan membunuh salah satu utusan Pajajaran bernama Tumenggung Jagabaya serta enam puluh pasukannya dalam serangan mendadak. Akibat langsung dari pertarungan ini, banyak pasukan Pajajaran yang kehilangan nyawa, dan Jagabaya akhirnya memilih menjadi Muslim karena pengalamannya.

Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, masyarakat Sunda dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi, negara-negara bawahan diberikan kesempatan untuk memilih jenis pemerintahan mereka sendiri, dan konflik serta perang sangat jarang terjadi. Kerajaan Pajajaran diperintah dengan adil bahkan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, dan rajanya adalah seorang pria yang jujur dan berpengetahuan. Selama

Kerajaan Sunda masih ada, kota-kota pelabuhan penting seperti Cirebon, Banten, dan Sunda Kalapa berperan penting dalam penyebaran Islam. Ketiganya menawarkan akses ke bursa bisnis negara lain, beberapa di antaranya termasuk Cina, Arab, dan India, antara lain.⁵¹ Seperti Sunda Kalapa, saat itu Karawang merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran yang dikomandani oleh Prabu Siliwangi. Selama raja menghabiskan waktu di pesantren Quro, ia mengembangkan perasaan terhadap seorang santri bernama Subang Larang.

Masuknya Islam ke Jawa merupakan proses panjang yang berlangsung selama beberapa abad. Secara umum diterima bahwa Jawa Timur adalah tempat pertama kali Islam datang dan berkembang, sebelum migrasinya ke Jawa Tengah dan Jawa Barat.

⁵¹ Nina Herlina.Lubbis, *dkk. th. Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*.

Syekh Quro, Kian Santang, Pangeran Syarif Lubang Buaya, Pangeran Papak, Dato

Tanjung Kait, Kumpo Datuk Depok, Dato Tonggara, Dato Ibrahim Condet, dan Dato Blue Rawabangke adalah beberapa tokoh sejarah yang muncul ketika menelusuri awal mula penyebaran Islam di Sunda, yang berlangsung antara 1418 dan 1527. Tokoh sejarah lainnya termasuk Dato Tonggara, Da Di antara orang-orang terkemuka lainnya yang terdaftar adalah Dato Tanjung Kait. Proses masuknya Islam ke daerah Sunda mengikuti lintasan yang sama dengan proses Islamisasi yang terjadi di seluruh Jawa. Sebagai taktik, kami menggunakan taktik yang tidak melibatkan kekerasan dan meyakinkan. Sejumlah budaya dan cara berpikir pra-Islam, seperti Sunda Wiwitan, lenyap selama perjalanan ekspansi Islam. Dan tanpa ada unsur paksaan atau paksaan untuk ikut serta.

Dakwah Islam, atau dakwah, berada di puncak efektivitas dan memiliki jumlah pengikut terbesar di Jawa di bawah pemerintahan Wali Songo, khususnya di kalangan Tatar Sunda. Di wilayah Tatar Sunda, dua anggota Wali Songo bernama Syarif Hidayatullah dan Sunan Gunung Jati menjadi terkenal sebagai penyebar Islam yang penting bahkan berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Kedua orang ini milik Wali Songo. Syarif Hidayatullah adalah tokoh penting dalam pembelajaran Islam dan pendukung yang sangat bersemangat untuk agama. Dia paling dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, yang dia terima di tahun-tahun terakhirnya. Karena Allah SWT memberinya izin dan berkah dengan nikmat-Nya, ia berhasil menyebarkan kepercayaan tauhid "Laa Ilaha Illallah" kepada masyarakat Cirebon, Jawa, dan seluruh Nusantara. Terserah dia untuk melaksanakan tanggung jawab yang datang dengan

perannya sebagai panatagama.⁵² Asas-asas dogmatis dan intelektual yang menopang usahanya menjadi dasar kewajiban yang ia laksanakan. Dalam perjuangan untuk mempromosikan agama Allah, adalah penting, antara lain, untuk menjaga komitmen teguh terhadap keyakinan agama seseorang dan melakukannya dengan cara yang jujur dan lugas.

Cucu Prabu Siliwangi, yang memerintah Kerajaan Pajajaran, dikreditkan dengan mendirikan praktik dakwah Islam sebagai upaya perintis. Asimilasi ke dalam budaya dominan adalah taktik yang digunakan. Taktik ini terbukti berhasil membuka tuntunan umat untuk beriman dan memeluk Islam secara damai dan rela.

Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam bukan melalui pemanfaatan budaya Arab melainkan melalui

⁵² Susilarini. *Mengenal Sembilan Wali (Wali Sanga)*. (Surakarta: Seti-Aji.2018)

pemanfaatan adat dan tradisi lokal melalui pemanfaatan seni lokal. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut. Sunan Gunung Jati berhasil membawa Islam ke provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta tanpa menggunakan kekerasan atau konflik sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini. Salah satu contohnya adalah penyebaran informasi tentang Islam kepada masyarakat luas melalui media gamelan sekaten, yang merupakan ansambel gamelan tradisional Indonesia. Sunan Gunung Jati akan memainkan gamelan sekaten setiap kali ada banyak orang di sekitar, terutama saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka yang telah hadir untuk keseluruhan pertunjukan gamelan adalah satu-satunya yang diminta untuk berpartisipasi. Pembayaran, di sisi lain, tidak berbentuk uang melainkan pembacaan dua kalimat dari syahadat. Dikutip dari Sultan, ungkapan syahadatain yang artinya "dua kalimat syahadat" itulah asal nama gamelan sekaten. Karena itu, gamelan sering disebut sebagai gamelan sekaten.

Sekitar tahun 1480 M, atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati, Sunan Gunung Jati dan Wali Sanga lainnya juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan syiar Islam. Sampai saat ini, struktur tersebut dipertahankan dengan cara yang sama seperti konstruksi awal. Sunan Gunung Jati, yang lahir sekitar tahun 1448 M, tidak hanya meraih sukses sebagai ulama tetapi juga sebagai raja dan pemimpin negara, mendapatkan gelar "Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Purba Wisesa Jati, Panetep Panata Gama Aulia Allahu Khalifatur Rosu lillahi Salallahu alaihiwasalam." Sunan Gunung Jato

Pada masa pemerintahannya, periode makmur yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Cirebon dimulai. Selama periode sejarah itu, Kesultanan Cirebon memerintah seluruh Jawa Barat serta Jakarta dan Banten. Domainnya sampai ke Banten. Dalam

menjalankan pemerintahan Sunan Gunung Jati akan selalu mengutamakan kegiatan yang bermanfaat dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan. Sangat penting bahwa, setiap saat, kepentingan masyarakat umum dan masyarakat umum didahulukan dari kepentingan keluarga atau individu tertentu.

Sebagai konsekuensinya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat Sundan menerima Islam, dan bahwa Islam disebarkan secara damai. Dengan kata lain, Sunan Gunung Djati menganut metode yang digunakan Nabi Muhammad (saw). Bimbingan Nabi, yang menyatakan bahwa dakwah harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu al-huluj balaghah (akal yang benar), al-asalibul Hakimah (suasana kata yang arif dan bijaksana), aladabus samiyah (suasana yang mulia). karakter), dan sebagai - siyasatul Hakimah (strategi mulia), tidak hanya Sunan Gunung Djati, tetapi semua Wali juga menggunakan metode yang sama.

BAB V

PERIODESASI SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Pendidikan Islam Pada Fase-Fase

1. Fase Datangnya Islam ke Indonesia

Sejak awal datangnya islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat muslim Indonesia. Islamisasi menjadi alasan utama melaksanakan pengajaran islam walau dengan cara yang sangat sederhana. Kebutuhan masyarakat islam dengan pendidikan mendorong masyarakat islam Indonesia mengadopsi dan menstransfer lembaga keagamaan dan

sosial yang sudah ada kedalam lembaga pendidikan islam di Indonesia. Di Jawa, umat islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu Budha menjadi pesantren. Umat Islam Minangkabau mengambil alih surau yang merupakan peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan islam dan di Aceh, meunasah ditransfer menjadi lembaga pendidikan islam.⁵³

Pendidikan pada fase ini diawali dengan masuknya islam ke Indonesia pada abad 7 M / 1 H yang disebarkan oleh para pedagang dan muballigh dari Arab dipantai barat pulau Sumatera, tepatnya didaerah baros. Interaksi penyebaran islam kepada penduduk local melalui kontak jual beli, perkawinan, dan dakwah baik secara individu maupun kolektif dari situlah pendidikan islam berjalan meskipun dalam bentuk sangat sederhana, tanpa terikat oleh formalitas waktu

⁵³ ⁵³ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta, Kalam Mulia, 2012) hlm. 219

dan tempat tertentu. Materi pelajarannya adalah kalimat syahadat sebab barang siapa yang sudah bersyahadat berarti telah masuk islam kemudian dikembangkan materi rukun iman, rukum islam lalu berlanjut tata cara melaksanakan sholat lima waktu dan seterusnya.

2. Fase Perkembangan Dengan Proses Adaptasi

Mahmud Yunus menggambarkan pendidikan islam pada proses ini ditandai dengan sistem langgar atau surau sebagai pusat kajian keislaman. Dengan dipandu oleh juru dakwah yang biasa dengan sebutan modin, pengajian Al-Qur'an dibedan menjadi dua

tingkatan. Pertama, tingkatan rendah atau pemula dengan materi pembelajaran pengenalan huruf dan bacaan al-Qur'an pada malam dan pagi hari sesudah sholat subuh. Kedua, tingkatan atas yaitu dengan penambahan beberapa pelajaran seperti lagu, berzanzi, qosidah dan tajwid. Metode yang digunakan dengan cara sorogan dan halaqoh.

B. Fase Berdiri Kerajaan Islam

Adanya islamisasi dan Pendidikan islam di Nusantara pada saat itu berhasil membentuk masyarakat islam mendorong lahirnya kerajaan islam di Nusantara. Beberapa kerajaan islam pada masa sebelum zaman penjajahan adalah : Kerajaan perlak, Kerajaan pasai, kerajaan aceh di Sumatera. Kerajaan demak, Kerajaan Panjang, dan Kerajaan Mataram di Jawa. Kerajaan Kembar Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan.

1. Kerajaan Islam di Sumatera

a. Kerajaan Perlak

Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama giat melaksanakan pengajian dan pendidikan islam. Materi pembelajaran dibagi menjadi dua tingkatan : Pertama yaitu tingkat dasar yang terdiri atas pelajaran membaca, menulis, Bahasa Arab, pengajian Al-Qur'an dan ibadah praktis. Kedua yaitu tingkatan yang lebih

tinggi dengan materi ilmu fikih, tasawuf, ilmu kalam dan ;lain-lain.⁵⁴

b. Kerajaan Pasai

Menurut keterangan Ibnu Batutah yang singgah dikerajaan pasai pada tahun 1345 M dalam misinya mengelilingi dunia dapat disimpulkan bahwa system pendidikan yang berlaku di Kerajaan Pasai adalah materi pendidikan dan pengajaran agamanya bermazhab syafi'i, system pendidikannya informal berupa majlis taklim dan halaqoh, tokoh pemerintahan merangkap ulama, biaya pendidikan bersumberdari negara.⁵⁵

c. Kerajaan Aceh Darussalam

Lembaga pendidikan yang merupakan pusat pengembangan pendidikan islam di Kerajaan Aceh

⁵⁴ Aisyah Nursyarif, "Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah", Jurnal Lentera Pendidikan Vol. 17 No. 2 Desember 2014 (Italic), hal 256

⁵⁵ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam:perubahan konsep,filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta,Kalam Mulia,2011) hlm.221

adalah : Balai Seutia Hukama, lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendikiawan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Kerajaan Islam di Jawa

a. Kerajaan Demak

Proses pendidikan Islam di Demak beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Djati. Para wali menggunakan masjid sebagai sarana pengembangan pendidikan Islam. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di pulau Jawa yang menjadi pusat dan lambang kerajaan.

b. Kerajaan Pajang

Perpindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang tidak membawa perubahan berarti terhadap sistem pengajaran dan pendidikan Islam

c. Kerajaan Mataram

Kerajaan Islam Mataram membuat beberapa ketentuan khusus seperti tiap desa menyediakan tempat mengaji Al-Qur'an. Di tempat itu diajarkan huruf hijaiyah, barzanji dan dasar-dasar keislaman seperti praktik ibadah, rukun iman dan rukun Islam. Selain itu penulisan dan penyalinan buku-buku agama Islam dari Bahasa Melayu ke Bahasa Makasar giat dilaksanakan.⁵⁶

3. Kerajaan Islam Gowa –Tallo di Sulawesi Selatan

Seperti halnya kerajaan Islam pada umumnya, masjid menjadi pusat pengembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-15, Sultan Malikussaid, tiap-tiap negeri memiliki masjid dan tiap-tiap kampung memiliki langgar. Selain tempat ibadah masjid dan langgar juga digunakan

⁵⁶ Mattulada, Latoa : *Satu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik orang Bugis. Ujung Pandang: Hasanudin University Press.1995, h.29*

sebagai tempat pengajian agama bagi anak-anak muda saat itu

C. Fase Kedatangan Orang Barat (belanda)

Pada masa kolonial belanda pendidikan islam disebut juga dengan pendidikan bumiputera,karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang Indonesia. Sistem Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam,yaitu: (1)Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam, (2) Sistem pendidikan surau (Langgar), dan sistem pendidikan pesantren.⁵⁷

Sebelum para penjajah barat datang sistem pendidikan islam diindonesia yang sudah berjalan adalah pesantren dan termasuk satu-satunya lembaga pendidikan formal di indonesia sebelum adanya colonial belanda. Pada masa belanda menjajah

⁵⁷ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam:perubahan konsep,filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara* (Jakarta,Kalam Mulia,2011) hlm.253

Indonesia mereka mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memeras tenaga sumber daya alam dan pembodohan terhadap penduduk bumi, mereka melakukan pembaruan pendidikan yaitu westernisasi, dan kristenisasi untuk kepentingan barat dan Nasrani. Dan mereka juga memperkenalkan sekolah-sekolah modern sesuai sistem persekolahan yang berkembang di dunia barat, dan hal ini sedikit mempengaruhi sistem pendidikan yang sudah berjalan yaitu pesantren. Dan pada abad 20 M dunia pendidikan di Indonesia terpecah menjadi 2 golongan:

1. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama (corak baru)

2. Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja (corak lama).⁵⁸

⁵⁸ Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, cet. ke 6 (Jakarta, Prenada Media Group, 2006) hal. 298

Dan pada fase ini ulama-ulama pendidikan islam melakukan pembaruan dalam pendidikan dengan merubah sistem pendidikan islam dari sistem pendidikan tradisio nal,pesantren,dan langgar ke siistem madrasah, beberapa alasan ulama-ulama islam melakukan pembaruan pada fase ini adalah:

1. Karena terpecahnya dunia pendidkan dengan dua corak,corak lama dan corak baru dari belanda,yang menyebabkan terancamnya sistem pendidikan pesantren karena sekolah-sekolah belanda yang dikelola belanda secara modern oleh belanda berisikan materi tentang keterampilan duniawi.

2. Sebagian masyarakat islam pada fase ini berpikir pendidikan pesantren memerlukan biaya hidup yang tinggi.

3. Pada sekolah-sekolah belanda hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan ,sehingga Sebagian masyarakat Indonesia ada yang

masih tidak bisa baca tulis,karena tidak mendapatkan kesempatan belajar.

4. Ulama-ulama pendidikan islam pada fase ini disatu sisi memandang perlu untuk belajar dan mengetahui perkembangan ilmu dunia luar teknologi,dan disisi lain tetap belajar memahami agama yang telah ditanamkan jauh hari sebelum belanda datang ke indonesia.

5. Munculnya kesadaran dari pendidikan islam ulama-ulama yang pada waktu fase ini dan menyadari bahwa sistem pendidikan tradisional yang berjalan disurau,dilanggar tidak lagi sesuai dengan iklim pada masa itu.⁵⁹

Akhirnya pada fase ini pun ada corak ketiga dalam pendidikan yaitu corak yang merupakan sintera dari corak lama dan corak baru dengan memasukan ilmu-ilmu pengetahuan barat yang sesuai dengan

⁵⁹ Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam,cet.ke 6 (Jakarta,prenada media group,2006)hal.299

pendidikan islam ke dalam kurikulum madrasaah. Dan corak ketiga muncul bersamaan dengan lahirnya madrasah-madrasah yang berkelas yang muncul sejak tahun 1909, yang diplopori oleh para pembaruan diindonesia.

Adapun madrasah-madrasah yang didirikan di Indonesia:

1. Madrasah Adabiyah school (didirikan oleh H.Abdullah pada tahun 1907,dipadang Panjang)

2. Madrasah Diniyah School (didirikan oleh Zainuddin Labia El-Yunisi pada tahun 1915 di Minangkabau)

3. Madrasah Muhammadiyah (KH.Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dipadang panjang)

4. Sumatera Thawalib/surau yang pertama kali memakai sistem kelas,kelas dalam proses belajar mengajar (yang dipimpin oleh syekh abdul karim amrullah pada tahun 1921 dipadang panjang)

5. Madrasah-madrasah yang berdiri diaceh :
madrasah sajadah adabiyah 1930,madrasah darul huda
1934.

6. Madrasah masruroh 1912,dan madrasah azizah
1918 M di Sumatra Timur.⁶⁰

D. Fase Penjajahan Jepang

Kehadiran Jepang menjajah Indonesia sangatlah singkat. Namun, Jepang tetap memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam. Salah satunya adalah umat Islam lebih leluasa mengembangkan pendidikannya karena peraturan pemerintah Belanda yang diskriminatif tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam saat itu masih sama dengan sistem zaman Belanda, yaitu di samping sistem pendidikan pesantren, juga terdapat sistem pendidikan klasikal, yaitu sistem

⁶⁰ Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam,cet.ke 6
(Jakarta,prenada media group,2006)hal.300-303

pendidikan Belanda yang memuat pelajaran agama.⁶¹ Pada awal penjajahan Jepang, pemerintah Jepang bahkan menampakan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, ini merupakan siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Mereka menempuh kebijakan di antaranya:

Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut *Kantoor Voor Islamistische Zaken* dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah menjadi *Sumubi* yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang;

1) Beberapa pondok pesantren besar sering dikunjungi Jepang dan mendapat bantuan;

2) Sekolah negeri mendapat pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran Islam.

⁶¹ Aisyah Nursyarif, "Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Lentera Pendidikan* Vol. 17 No. 2 Desember 2014 (Italic), hal 263

3) Jepang juga mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam.

4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H.

Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Bung Hatta.

5) Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta). Pembela Tanah Air inilah yang menjadi cikal bakal TNI saat ini.

6) Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia (MAI) yang bersifat kemasyarakatan.⁶²

Pada masa penjajahan jepang dunia pendidikan secara umum terbengkalai, setiap hari murid-murid hanya disuruh gerak badan, berbaris-baris, kerja

⁶² Zuhairini *et al.*, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 151

paksa(romusha),bernyanyi dan lain-lain. Keadaan pendidikan islam dimasa penjajahan sedikit beruntung karena madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan penjajahan jepang. Pendidikan dalam pesantren masih dapat berjalan dengan wajar,hanya saja para santri pun banyak yang meninggalkan pesantrennya karena kendala biaya,bahkan banyak pesantren yang tidak lagi mempunyai santri,seperti pesantren Kiyai Damanhuri di Kutoarjo.⁶³

E. Fase Kemerdekaan (1945-1965)

Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberi bantuan terhadap lembaga sebagaimana yang dianjurkan oleh

⁶³ Rohmadi, Lintas Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, cet. ke-1, (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018), hal 174

badan pekerja komite nasional pusat (BPKNP) 27 Desember 1945 menyebutkan bahwa: “*Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah salah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah*”⁶⁴

Meskipun Indonesia baru memproklamkan kemerdekaannya dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintahan Indonesia sudah berbenah terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan untuk itu dibentuklah kemitraan pendidikan pengajaran dan kebudayaan (PP dan K). dengan terbentuknya kemitraan pendidikan pengajaran dan kebudayaan tersebut, maka diadakanlah berbagai

⁶⁴ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Cet Ke 6* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 345

usaha terutama sistem pendidikan dan penyelesaiannya dengan keadaan yang baru⁶⁵

Setelah merdeka, pendidikan islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama disekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya digaji seperti guru umum dan usul pun diterima⁶⁶

Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar

⁶⁵ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Cet Ke 6* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 346

⁶⁶ Muhammad Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya, 1985), h. 125

disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.⁶⁷

Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30 % pelajaran agama dan 70 % pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajar enam tahun.

2. Nadrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar tiga tahun.

3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun⁶⁸

⁶⁷ Zuhairini. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara), h. 236

⁶⁸ Musyrifah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.128-129

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistik, yaitu 1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. 2) Sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat sendiri, baik yang bercorak isolatif-tradisional maupun yang bercorak sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya sebagaimana uraian tersebut di atas

Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan atas saja. Sedangkan yang kedua (sistem pendidikan dan pengajaran Islam)

tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat dan berurat berakar dalam masyarakat⁶⁹

Hal ini diakui oleh badan komite nasional Indonesia pusat (BP-KNIP) dalam usul rekomendasinya yang disampaikan kepada pemerintah, tentang pokok-pokok pendidikan dan pengajaran baru, pada tanggal 29 Desember 1945⁷⁰

Merdekanya bangsa Indonesia diharapkan bisa menggali segala potensi yang ada, sehingga dapat digunakan dan dikembangkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Harapan ini walaupun sudah lama dicanangkan, namun belum juga terwujud sampai sekarang. Keadaan lebih parah lagi dengan timbulnya gejala-gejala salah urus (mis management)⁷¹

⁶⁹ Sugarda Purbakawaca. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), h.39

⁷⁰ Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), h. 82

⁷¹ Djumhur. *Sejarah Pendidikan Islam*. (Bandung: PT Bina Ilmu, 1959), h.230

Akibatnya pada bidang pendidikan fasilitasnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Lagi pula politik dan usaha-usaha pendidikan tidak berhasil menjadikan sektor pendidikan sebagai faktor penunjang bagi suatu pendidikan. Perkembangan selanjutnya pendidikan hanya mengakibatkan benih-benih pengangguran. Lahirnya Orde Baru (ORBA) memungkinkan pendobrakan salah urus itu dalam segala bidang juga dalam pendidikan perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat pada khususnya sudah memasuki masyarakat informasi yang merupakan kelanjutan dari masyarakat modern dengan ciri-cirinya yang bersifat rasional, berorientasi ke masa depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif. Sedangkan masyarakat informasi di tinjau oleh penguasaan terhadap teknologi informasi, mampu bersaing, serba ingin tahu, imajinatif, mampu

mengubah tantangan menjadi peluang dan menguasai berbagai metode dalam memecahkan masalah.

F. Sejarah Pendidikan Islam Masa Pembangunan

Dibalik kebijakan pemerintah Orde Baru tentang pendidikan dengan segala dinamika dan fenomena yang menyelimuti tersebut, disatu sisi perkembangan pendidikan Islam masa Orde Baru mendapat tempat yang positif dimata pemerintah, setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958/1959 madrasah juga memiliki kewajiban melaksanakan wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban sama seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di

tahun 1965, berdasarkan rumusan Seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta disepakati di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti: pertanian dan pertukangan⁷²

Keadaan inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang

⁷² M. Syahrani Jailani dan Muhammad. Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *Innovation: Journal for Religious-Innovation Studies Vol. XIX, No. 1*, (January-June 2019), h.21-22

sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam. Munculnya reaksi keras umat Islam disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Keputusan Presiden dan Instruksi Presideen di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975. SKB ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian

lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.⁷³

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pembinaan terhadap pesantren melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Dana pembinaan pesantren diperoleh dari pemerintahan terkait, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Tahun 1975, muncul gagasan untuk mengembangkan pondok pesantren dengan model baru. Lahirlah Pondok Karya Pembangunan, Pondok Modern, Islamic Centre, dan Pondok Pesantren Pembangunan. Kemudian banyak pesantren yang mendirikan sekolah umum dengan kurikulum sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

⁷³ M. Syahrani Jailani dan Muhammad. Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *Innovation: Journal for Religious-Innovation Studies Vol. XIX, No. 1*, (January-June 2019), h.22

Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1975, menetapkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sebanyak 70 % dari seluruh kurikulum madrasah. Banyak juga madrasah yang mendirikan perguruan tinggi seperti Pesantren Al-Syafi'iyah dan Pesantren Al-Tahiriyah. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.¹⁴ Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru sebagai lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama⁷⁴

⁷⁴ M. Syahrani Jailani dan Muhammad. Kilas Balik

Secara garis besar isi SKB tersebut mengizinkan lulusan madrasah unstuck melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di sekolah umum. TAP MPR No. II/TAP/MPR/1983 menyatakan diperlukannya penyesuaian sistem pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan sumber daya manusia dan perkembangan iptek. Untuk itulah perubahan kurikulum sangat diperlukan sebagai upaya unstuck memperbaiki penyelenggaraan pendidikan baik di sekolah umum maupun sekolah madrasah. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah:

1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966).

2. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum.

Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *Innovation: Journal for Religious-Innovation Studies* Vol. XIX, No. 1, (January-June 2019), h. 23

3. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan.

4. Pemerintah memberi izin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.

5. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

6. Penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI.

7. Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri. Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor.

8. Berdirinya Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai lokomotif perubahan lahirnya kelas menengah umat Islam Indonesia⁷⁵

⁷⁵ M. Syahrhan Jailani dan Muhammad. Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *Innovation: Journal for Religious-Innovation Studies* Vol. XIX, No. 1, (January-June 2019), h. 24-25

BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DALAM ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM



A. Sistem Pendidikan Islam dalam organisasi Muhammadiyah

Sejak awal Muhammadiyah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana untuk mencapai tujuannya baik dalam peranannya sebagai gerakan Islam, dakwah, maupun tajdid (pembaruan).⁷⁶ Mengenai system pendidikan Islam dalam organisasi Muhammadiyah berikut ini:

1. Sistem Pendidikan Non Formal/Tradisional

⁷⁶ Putra Mahendra dkk, *PENDIDIKAN ISLAM ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KASUS MUHAMMADIYAH*, Al Mahyra, Volume 02 Nomor 01, April 2021, h. 32

Dalam system Pendidikan tradisonal, Muhammadiyah tetap melaksanakan Pendidikan berbasis pesantren sebagai Lembaga Pendidikan tertua di nusantara. System pesantren tidak lepas dari kiyai dan santri. Kurikulum yang dianut dalam Pendidikan pesantren dalam system Pendidikan Muhammadiyah mengadopsi kurikulum atau materi Pendidikan terdahulu yang focus mengkaji ilmu agama dari sumber kitab-kitab klasik dengan materi aqidah, fiqih, akhlak, Al-qur'an dan Hadits. Adapun pembelajaran di pesantren yang metode yang diterapkan ialah metode sorogan dan wetonan / bendungan.⁷⁷

Pendidik atau guru yang mengajarkan siswa dalam Pendidikan secara non formal yaitu pesantren yaitu kiyai atau ustadz yang berkompeten di bidangnya dengan menguasai Bahasa Arab sebagai alat untuk mehamai kitab-kitab kuning. Bagi kiyai atau ustadz

⁷⁷ Mahmud, *Muhammadiyah dan Dualisme Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: Azkia Pustaka Utama, 2004), h. 50-55

kerap kali menetap di lingkungan pesantren. Adapun peserta didik pada Pendidikan non formal atau tradisional dinamakan santri dan tidak ada Batasan umur dalam menempuh pendidikannya. Evaluasi atau penilaian yang dilakukan dalam Pendidikan non formal berbasis pesantren yaitu kiyai menilai sejauh mana kemampuan santri dalam membaca dan memahami kitab kuning sesuai dengan tingkatan kitab dan cabang ilmunya.

2. Sistem Pendidikan Formal/Modern

Dalam system Pendidikan formal K.H. Ahmad Dahlan melakukan pembaruan dibidang kurikulum dan metode pendidikan, K.H Ahmad Dahlan memasukan mata pelajaran umum ke dalam pendidikan lembaga pendidikan Islam. Selain mengadopsi sistim kurikulum Belanda, didalam sekolah muhammadiyah juga mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Kurikulum yang dicetuskan Muhammadiyah yang mengambil kurikulum pendidikan yang dibuat

pemerintah kemudian menambah kewajiban mengikuti:

- a. Pendidikan agama Islam: Ilmu dan penghayatan agama Islam
- b. Pendidikan kemuhammadiyah: pengertian, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, disamping keorganisasian Muhammadiyah
- c. Pancasila/UUD 1945.

Metode belajar juga menggunakan metode klasikal dengan materi belajar terstruktur sesuai dengan jenjang masing-masing kelas, dalam mengajarkan agama K.H Ahmad Dahlan membuka wawasan dengan metode tanya jawab dan kebasan mengajukan pertanyaan. Selain itu banyak metode yang diterapkan seperti; pembiasaan, keteladanan, pemberian nasihat dan merangsang berfikir.⁷⁸

Sekolah-sekolah yang dikelola Muhammadiyah meski bersifat umum, mengajarkan pelajaran eksakta, sains dan teknologi, tetapi memasukkan pelajaran

⁷⁸ Mahmud, *Muhammadiyah dan Dualisme Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: Azkia Pustaka Utama, 2004), h. 50-55

agama Islam, kombinasi kedua disiplin ilmu ini, telah berlangsung semenjak zaman penjajahan Belanda, zaman kemerdekaan, hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah yakni terbentuknya suasana ideal telah mengalami perkembangan yang dinamis, yaitu mampu mengiringi dan mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman.⁷⁹

Pada Zaman Kemerdekaan, sekolah-sekolah Muhammadiyah makin berkembang ada 4 jenis yaitu : Sekolah umum dibawah naungan depdikbud yaitu : SD, SMTP, SMTA, SPG, SMEA, SKKA dan sebagainya. Pada sekolah-sekolah ini diajarkan pelajaran sebanyak 6 jam perminggu. Adapun Madrasah dibawah asuhan Dep. Agama yaitu MI, MTs, MA Jenis Sekolah/Madrasah khusus Muhammadiyah yaitu Mu'alimin, mu'allimat, Sekolah Tablegh, dan Pondok

⁷⁹ Malik Fajar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. (Jakarta, Lembaga Pembelajaran Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998), h. 13- 14

Pesantren Muhammadiyah ⁸⁰ Dari Data yang di himpun Muhammadiyah Memiliki 12.000 sekolah, 180 Universitas, 107 Rumah sakit dan 10 Fakultas Kedokteran yang melahirkan 700 dokter tiap tahun.

Dalam Pendidikan formal seperti di sekolah jenis penilaian yang dilakukan secara terstruktur dalam bentuk ujian baik tulis maupun lisan yang berjenjang sesuai tingkatan kelasnya.

3. Perpaduan Sistem Pendidikan Non Formal dan Formal

Upaya pembaharuan yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan dalam bidang pendidik, ialah dengan mentransformasikan dan memadukan Pendidikan tradisonal dengan Pendidikan modern dengan melahirkan suatu madrasah atau pesantren modern. K.H Ahmad Dahlan memasukan mata pelajaran umum ke

⁸⁰ Nur Rohmah Yati, *Kiprah Ormas Islam di Bidang Pendidikan*, h. 38

dalam pendidikan lembaga pendidikan Islam. Selain mengadopsi sistem kurikulum Pendidikan modern Belanda, di dalam sekolah atau madrasah Muhammadiyah juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ahmad Dahlan hendak membuat satu model pendidikan yang mengintegrasikan model pesantren dan model Belanda. Inilah salah satu cikal bakal lahirnya sekolah-sekolah Islam integratif dengan berbagai penamaannya misalnya; sekolah Islam terpadu, sekolah plus, dan lain-lain.⁸¹

Kurikulum yang dicetuskan Muhammadiyah yang mengambil kurikulum pendidikan yang dibuat pemerintah kemudian menambah kewajiban mengikuti:

- a. Pendidikan agama Islam: Ilmu dan penghayatan agama Islam
- b. Pendidikan kemuhammadiyah: pengertian, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, disamping

⁸¹ Abdul Mu'thi, *KH.Ahmad Dahlan 1868-1923*, (Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 2015), h. 26-27

keorganisasian Muhammadiyah c. Pancasila/UUD 1945.⁸² Metode belajar juga menggunakan metode klasikal dengan materi belajar terstruktur sesuai dengan jenjang masing-masing kelas, dalam mengajarkan agama K.H Ahmad Dahlan membuka wawasan dengan metode tanya jawab dan kebasan mengajukan pertanyaan. Selain itu banyak metode yang diterapkan seperti; pembiasaan, keteladanan, pemberian nasihat dan merangsang berfikir.⁸³

Pendidik atau guru yang ada pada lingkungan sekolah tidak menetap dan harus memiliki kompetensi di bidangnya. Sedangkan pada pesantren modern pendidik bertempat tinggal tidak jauh dari lingkungan pesantren. Adapun siswa yang belajar memiliki

⁸² Rusli Karim, *Pendidikan Muhammadiyah dilihat dari Persepektif Islam*. dalam Yunan Yusuf. *Cita dan Citra Muhammadiyah*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 94

⁸³ Mahmud, *Muhammadiyah dan Dualisme Pendidikan di Indonesia*, (Bandung: Azkia Pustaka Utama, 2004), h. 50-55

persyaratan khusus dengan Batasan umur pada jenjang Pendidikan yang ditempuh.

Faktor penting yang melatarbelakangi Muhammadiyah membangun madrasah, pertama adanya pandangan yang menyatakan bahwa Selain pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme itulah Muhammadiyah memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pendirian Madrasah.⁸⁴

Karena tidak mungkin menghapus sama sekali sistem sekolah umum dan sistem pesantren, maka Muhammadiyah mendirikan pendidikan formal dengan menempuh usaha perpaduan antara keduanya, yaitu dengan:

⁸⁴ Armai Arief, Reformulasi Pendidikan Islam. (Ciputat: Ciputat Press Group. 2007), h. 58-59

- 1) Sekolah-Sekolah Umum dari mulai tingkat TK, SD (yang lamanya 6 tahun)
- 2) SMP, (Lamanya Pendidikan 3 tahun)
- 3) SMA, (Lamanya Pendidikan 3 tahun)
- 4) Mendirikan Perguruan Tinggi/Universitas dengan memasukkan pula didalamnya Ruh pergerakan Al-Islam dan Muhammadiyah pada jurusan non agama.

Madrasah yang didirikan Muhammadiyah adalah termasuk jenis dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, terdiri dari Madrasah budaiyah disingkat (MI), Madrasah Tsanawiyah disingkat (MTS), Madrasah Aliyah Muhammadiyah di singkat (MA), dari beberapa pendidikan khusus berbentuk Madrasah Muallimin dan Muallimar, Madrasah Diniyah dan Madrasah Muballighin/Muballighot.⁸⁵ Dalam madrasah, jenis penilaian yang dilakukan secara terstruktur dalam

⁸⁵ Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah (Jakarta:1997), h.8-9

bentuk ujian baik tulis maupun lisan yang berjenjang sesuai tingkatan kelasnya.

1. Sistem Pendidikan Islam dalam organisasi Nahdhatul ‘Ulama

Kiprah NU dalam Pendidikan secara umum bertujuan untuk menyebarluaskan ajaran Islam di seluruh penjuru nusantara. Adapun secara khusus tujuan Pendidikan yang dibawa oleh NU ialah berpegang teguh terhadap ajaran ahlussunnah wal jama’ah dengan mempertahankan tradisi.⁸⁶ Mengenai system pendidikan Islam dalam organisasi Nahdatul Ulama berikut ini:

a. Sistem Pendidikan Non Formal/Tradisonal

Metode yang digunakan dalam Pendidikan NU yang berbasis tradisonal yaitu pesantren suatu lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan dan mewariskan ajaran ahlusunnah waljama’ah (aswaja)

⁸⁶ Muhammad Salik, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*), h. 82

dengan penekanan pada metode pendidikan tradisional berupa pengulangan dan memorisasi sumber-sumber ajaran agama yang menjadi standarnya.⁸⁷. seperti: metode Sorogan, metode Bandungan atau wetonan, diskusi/Mudzikaroh, bahtsul Masaa'il.

Pendidik yang mengajarkan santri atau siswanya dikalangan pesantren dalam Pendidikan NU yaitu kiyai dan ustadz yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan syarat lulusan pondok pesantren yang mahir dalam menguasai Bahasa arab dan literatur-literatur kitab kuning. Adapun peserta didik pada Pendidikan non formal atau tradisional dinamakan santri dan tidak ada Batasan umur dalam menempuh pendidikannya.

karakteristik Pendidikan non formal berbasis tradisional yaitu pesantren yaitu *salafiyah*. Pola pembelajarannya mengedepankan kitab kuning tanpa

⁸⁷ Ahmad Ainun Najib, *KONSEP DASAR PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA KH. HASYIM ASY'ARI*, h, 74

terlalu menekan adanya Lembaga Pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah..⁸⁸

Evaluasi atau penilaian yang dilakukan dalam Pendidikan non formal berbasis pesantren yaitu kiyai menilai sejauh mana kemampuan santri dalam membaca dan memahami kitab kuning sesuai dengan tingkatan kitan dan cabang ilmunya.

b. Sistem Pendidikan Formal/Modern

Seiring dengan adanya pembaharuan Pendidikan modern dikalangan NU, dimasukkannya mata pelajaran umum ke pesantren Tebu Ireng oleh Moh. Ilyas atas persetujuan K.H. Hasyim Asya'ry, yakni menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah dan Bahasa melayu.⁸⁹ Hal ini merupakan bentuk respon atas Pendidikan yang

⁸⁸ Muhammad Najib Azca, dkk., *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi* (Jogjakarta : Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, 2019), h. 184

⁸⁹ Usiono dan Ahmad Syukri Sitorus. *Kontribusi Ormas Islam Dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan di Abad 21*. (Medan: Perdana Publishing, 2015). h. 18

diselenggarakan Belanda dengan system modern, dan akhirnya untuk menumbuhkan semangat Pendidikan di lingkungan pesantren NU berupaya menyisipkan mata pelajaran umum ke dalam pesantren.

Adapun pada basis Pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah, metode yang digunakan sudah mengikuti perkembangan modern sesuai kebutuhan kondisi dalam pembelajaran. Metode itu antara lain adalah hafalan, metode ceramah, metode diskusi, metode Tanya jawab dan metode Tahdzib wa targhib (menasihati dan menegur).⁹⁰

Dalam Pendidikan modern seperti sekolah atau madrasah, pendidik harus memiliki kompetensi dalam bidang Pendidikan. Adapun dalam Pendidikan madrasah siswa sudah diklasifikasikan dalam jenjang Pendidikan dengan system klasikal sesuai dengan kategori usianya. Pendidikan formal yang

⁹⁰ Ahmad Ainun Najib, *KONSEP DASAR PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA KH. HASYIM ASY'ARI*. h, 77

diselenggarakan seperti sekolah/madrasah cukup banyak dan berkembang dengan tahapan jenjang Pendidikan yang ditempuh. Corak yang dimilikinya Pendidikan Islam yang menekankan pada Pendidikan formal tetapi tetap mengaji kitab-kitab berbahasa Arab.⁹¹ Di Madrasah, materi keilmuan yang diajarkan pada awalnya adalah sama dengan yang ada di pesantren, bedanya kiai tidak berada dalam lingkup madrasah.⁹²

Pada akhir tahun 1356 H. (1938 M) Komisi Perguruan NU telah mengeluarkan reglement tentang susunan madrasah-madrasah NU yang harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharram 1357 H. Susunan madrasah-madrasah umum NU itu sebagai berikut :

⁹¹ Muhammad Najib Azca, dkk., *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi* (Jogjakarta : Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, 2019), h. 184

⁹² Muhammad Najib Azca, dkk., *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi* (Jogjakarta : Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, 2019). Hlm.183

- 1) Madrasah Awaliyah, lama belajar 2 tahun
- 2) Madrasah Ibtidaiyah, lama belajar 3 tahun
- 3) Madrasah Tsanawiyah, lama belajar 3 tahun
- 4) Madrasah Mu'allimin Wusta, lama belajar 2 tahun
- 5) Madrasah Mu'allimin 'Ulya, lama belajar 3 tahun⁹³

Dalam salah satu keputusan Kenferensi Besar Al-Ma'arif NU seluruh Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-26 Februari 1954, ditetapkan susunan sekolah/madrasah Nahdlatul Ulama, yaitu :

- 1) Raudatul-Atfal (Taman Kanak-kanak) lamanya 3 tahun
- 2) SR (Sekolah Rendah)/SD – sekarang, lamanya 6 tahun
- 3) SMP NU lamanya 3 tahun

⁹³ Zuhairini, *Sejarah pendidikan Islam* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), h. 182

- 4) SMA NU lamanya 3 tahun
- 5) SGB (Sekolah Guru Bawah) NU lamanya 4 tahun
- 6) SGA (Sekolah Guru Atas) NU (SPG – sekarang) lamanya 3 tahun
- 7) MMP NU (Madrasah Menengah Pertama) lamanya 3 tahun
- 8) MMA NU (Madrasah Menengah Atas) lamanya 3 tahun⁹⁴

Dalam Pendidikan formal seperti di sekolah/madrasah jenis penilaian yang dilakukan secara terstruktur dalam bentuk tes tulis dan lisan bagi siswa yang berjenjang sesuai tingkatan kelasnya.

c. Perpaduan Sistem Pendidikan Formal dan Non Formal

Bentuk respon NU terhadap Pendidikan modern yang diprakarsai oleh penjajah dalam Pendidikan

⁹⁴ Zuhairini, *Sejarah pendidikan Islam* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013). Hlm.184

dengan system modern, NU berinisiatif agar Pendidikan pesantren tidak tertinggal dan tertindas akhirnya untuk menumbuhkan semangat Pendidikan di lingkungan pesantren NU berupaya menyisipkan mata pelajaran umum ke dalam pesantren yakni menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah dan Bahasa melayu.⁹⁵ Pada awalnya pesantren-pesantren Nahdhatul Ulama hanya menyelenggarakan pendidikan non formal setelah lulus tidak mendapatkan ijazah, namun sesuai dengan perkembangan zaman, pesantren-pesantren tersebut menyelenggarakan pendidikan formal sehingga di sebut Perpaduan antara sekolah formal dan non formal.⁹⁶

Jenis pesantren inilah yang sekarang mendominasi karakter pesantren di berbagai penjuru

⁹⁵ Usiono dan Ahmad Syukri Sitorus. *Kontribusi Ormas Islam Dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan di Abad 21*. (Medan: Perdana Publishing, 2015). h. 18

⁹⁶ Bisyri Abdul Karim, *Strategi Pembelajaran Kitab Kuning Transformasi Penguatan Sistem Subkultur Pondok Pesantren Indonesia*. (Makasar : LPP Unismuh Makassar, 2020). Hlm : 24

Indonesia. Biasanya santri harus bersekolah dua kali dalam sehari, misalnya sekolah formal pada pagi hari dan sekolah non formal pada malam hari. Porsi terbesar pembelajaran yang diberikan di sekolah non formal adalah kitab kuning, sedangkan untuk sekolah formal adalah materi-materi umum atau kitab-kitab pelajaran berbahasa Arab Kontemporer, baik karangan ulama Indonesia atau ulama Timur Tengah. Diantara pesantren yang menggunakan perpaduan system pendidikan formal dan non formal, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin (Suci Manyar Gresik) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Metode yang digunakan antara lain adalah hafalan, metode ceramah, metode diskusi, metode Tanya jawab dan metode Tahdzib wa targhib (menasihati dan menegur).⁹⁷ Dalam Pendidikan

⁹⁷ Ahmad Ainun Najib, *KONSEP DASAR PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA KH. HASYIM ASY'ARI*, h, 77

madrasah, pendidik harus memiliki kompetensi dalam bidang Pendidikan. Adapun dalam Pendidikan madrasah siswa sudah diklasifikasikan dalam jenjang Pendidikan dengan system klasikal sesuai dengan kategori usianya.

2. Sistem Pendidikan Islam dalam organisasi Persis

Dalam bidang Pendidikan Persatuan Islam (Persis) berusaha membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, mengembalikan umat Islam kepada kepemimpinan langsung pada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menghidupkan jihad dan ijtihad serta membentuk kader melalui pesantren dan sekolah.⁹⁸ Mengenai system pendidikan Islam dalam organisasi Persis berikut ini:

a. Sistem Pendidikan Non Formal/Tradisonal

⁹⁸ Mughni, Syafiq. *Warisan Islam A Hasan dalam Arus Pemikiran Islam di Indonesia*. dalam Endang Saifuddin Anshari dan Amin Rais. Pak Natsir 80 Tahun. (Jakarta: Media Dakwah, 1988), h. 95

Pelajaran yang diberikan di Pesantren Persatuan Islam itu antara lain berbagai ilmu agama yang perlu dikuasai oleh seorang muballig Persis yakni seorang muballig yang menyampaikan ajaran Al-Qur'an, tajwid, sharaf, nahwu, tarikh, tafsir, hadits, khat, ushul fiqih, akhlak, bayan, badie, ma'ani, manthiq, bahasa Arab, serta ilmu-ilmu lainnya di luar ilmu agama seperti bahasa Melayu, ilmu hisab, ilmu alam, ilmu jurnalistik, serta berbagai ilmu pengetahuan yang dianggap perlu.

Kurikulum yang telah dipakai pesantren Persis awal ini memang lebih banyak menekankan pada kebijaksanaan kalangan anggota Persis sendiri yang disesuaikan dengan keperluan pada saat itu. Sedangkan bila kurikulum yang ada sekarang ini dilihat maka tentu telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya di Indonesia. Namun pelajaran-pelajaran tertentu yang bercirikan agama tidak begitu banyak berubah. Bahkan

bentuk kelembagaan pendidikannya pada saat sekarang juga berubah.⁹⁹

Pada Pendidikan pesantren metode belajar juga menggunakan metode sorogan dan wetonan / bendungan. Bagi pendidik pada Pendidikan non formal seperti pesantren pendidiknya disebut kiyai yang keilmuannya tidak diragukan dan menguasai Bahasa Arab dan pemahaman kitab-kitab klasik dari berbagai cabang ilmu kitab kuning dan kiyai yang mengajar di pesantren menetap dengan disediakan rumah yang berada di lingkungan pesantren. Adapun peserta didik pada Pendidikan tradisonal pesantren peserta didik yang turut belajar di dalamnya tidak dibatasi oleh usia dan waktu. Evaluasi atau penliaian yang dilakukan dalam Pendidikan non formal berbasis pesantren yaitu kiyai menilai sejauh mana kemampuan santri dalam

⁹⁹ Choirunniswah, *ORGANISASI ISLAM DAN PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*, TA'DIB, Vol. XVIII, No. 01, Edisi Juni 2013, h. 71

membaca dan memahami kitab kuning sesuai dengan tingkatan kitab dan cabang ilmunya.

b. Sistem Pendidikan Formal/Modern

Kurikulum yang berlaku di samping diberikan pelajaran umum sebagaimana lazimnya sekolah-sekolah yang sama yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, juga diberikan pelajaran keislaman. Adanya mata pelajaran agama dapat dimengerti karena didirikannya sekolah-sekolah tersebut mempunyai kaitan dengan adanya keprihatinan. M. Natsir terhadap sekolah-sekolah yang ada di Bandung yang tidak diberikan pelajaran agama.¹⁰⁰ Pendidikan formal yang mengikuti kurikulum modern dengan mentransformasikan metode barat seperti diskusi dan tanya jawab serta metode\atau model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa sesuai kelasnya.

¹⁰⁰ Choirunniswah, *ORGANISASI ISLAM DAN PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*, h. 67

Sekolah yang didirikan Persis pada bidang formal adalah Taman Kanak-kanak, HIS (sama dengan SD sekarang) tahun 1930, Sekolah MULO (setara dengan SMP sekarang) tahun 1931 dan sebuah sekolah guru tahun 1932.¹⁰¹ Adapun dalam Pendidikan formal seperti di sekolah jenis penilaian yang dilakukan secara terstruktur dalam bentuk tes tulis atau lisan yang berjenjang sesuai tingkatan kelasnya.

c. Perpaduan sistem Pendidikan Formal dan Non Formal

Kurikulum yang diajarkan pada semua tingkatan pendidikan Persis dalam Pendidikan formal yang dipadukan dengan system Pendidikan tradisonal seperti madrasah adalah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk dapat mencetak santri menjadi muballigh Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, yang mencakup matapelajaran tauhid, fikih, baca al-Qur'an, tajwid,

¹⁰¹ Choirunniswah, *ORGANISASI ISLAM DAN PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*, h. 67

sharaf, nahwu, tarikh, tafsir, hadis, khat, ushul fiqih, bacaan, badi', ma'ani, mantiq, bahasa Melayu, dan ilmu-ilmu umum yang meliputi ilmu hisab, ilmu alam, ilmu jurnalistik, dan ilmu-ilmu lain yang dipandang perlu. Semua kurikulum ini disajikan kepada santri dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantarnya, dan bahasa Arab sebagai penunjang yang digunakan dalam waktu-waktu tertentu. Metode yang digunakan dalam madrasah sebagai perpaduan Pendidikan pesantren dan sekolah ialah menggunakan metode modern yang mengikuti perkembangan kondisi dan situasi zaman dengan menerapkan tanya jawab, diskusi, hafalan, ceramah, percakapan.

Guru yang ada pada lingkungan madrasah harus berkompeten pada bidang Pendidikan . Sedangkan pada Pendidikan formal seperti sekolah, murid yang diterima di sekolah-sekolah tersebut disaring melalui proses seleksi; membaca kalimah syahadat dan

bersumpah untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang dikenakan pada murid-murid sekolah tersebut.¹⁰²

Adapun konsep jenjang yang Persis kembangkan sesuai dengan bobotnya adalah :¹⁰³

- 1) Tingkat prasekolah disebut Raudhatul Athfal (berisi 80% pelajaran agama dan 20% pelajaran umum)
- 2) Tingkat dasar terdiri dari:
 - a) Ibtidaiyyah (60% pelajaran agama dan 40% pelajaran umum)
 - b) Diniyah Ula (10% pelajaran agama)
- 3) Tingkat peralihan disebut Tajhiziyah (berisi 80% pelajaran agama dan 20% pelajaran umum)
- 4) Tingkat menengah terdiri dari:

¹⁰² Choirunniswah, *ORGANISASI ISLAM DAN PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*, h. 67

¹⁰³ Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*, Fataba Press, h. 8-9

- a) Tsanawiyah (60% pelajaran agama dan 40% pelajaran umum)
- b) Diniyah Wustha (100% pelajaran agama)
- 5) Tingkat menengah atas disebut Mualimien (55% pelajaran agama dan 45% pelajaran umum)
- 6) Tingkat tinggi atau pesantren tinggi persatuan Islam (55% pelajaran agama dan 45% pelajaran umum)

Adapun dalam Pendidikan formal seperti di sekolah jenis penilaian yang dilakukan secara terstruktur dalam bentuk tes tulis atau lisan yang berjenjang sesuai tingkatan kelasnya.

BAB VII

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

A. Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Pada masa kolonial belanda pendidikan islam disebut juga dengan pendidikan bumi putera, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang Indonesia. Sistem Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam,yaitu: (1)Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam, (2) Sistem pendidikan surau (Langgar), dan sistem pendidikan pesantren.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam:perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta,Kalam Mulia,2011) hlm.253

1. Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam

Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Dengan kata lain, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yaitu 1) sistem keraton, yaitu dalam sistem ini pendidikan Islam dengan cara guru mendatangi murid-muridnya, yang menjadi muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. 2) sistem pertapa, yaitu para muridnya mendatangi guru ke tempat pertapaannya, dan muridnya tidak terbatas anak bangsawan dan keraton tapi juga termasuk rakyat jelata.

2. Sistem pendidikan surau (Langgar)

a. Asal usul Surau

Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara seperti Sumatra Selatan, semenanjung Malaya, Patani (Thailand) secara Bahasa surau artinya “tempat” atau tempat penyembahan. Dengan kedatangan Islam di Minangkabau, proses pendidikan Islam dimulai

oleh syeikh Burhanuddin di Lembaga surau, dan disurau ini anak laki-laki pada umumnya tinggal, dan hal ini memudahkan syeikh untuk menyampaikn pengajaran pendidikan islam.¹⁰⁵

b. Struktur Lembaga Pendidikan Surau

Dalam Lembaga pendidikan surau tidak mengenal birokrasi formal, tidak seperti dalam pendidikan modern, aturan didalamnya dipengaruhi oleh hubungan antar individu yang terlibat.

Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya. Murid diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Proses pembelajarannya murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning yang merupakan sumber utama dalam

¹⁰⁵ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta, Kalam Mulia, 2011) hlm.254

pembelajaran. Metode utama di pendidikan islam surau adalah metode ceramah, membaca dan menghafal.

Mahmud Yunus membagi susunan pendidikan islam di surau kepada dua kelompok.

a. Pengajian Al-quran (lama belajarnya 2,3 atau 4 tahun) Materinya : huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran, Ibadah (praktek perukunan, keimanan (sifat 20), akhlak dengan metode kisah.

b. Pengajian kitab (lamanya tidak ditentukan ada yang 15 tahun). Materinya : ilmu Sharaf, ilmu nahwu, ilmu fikih, dan ilmu tafsir dan lain-lainnya.

3. Sistem Pendidikan Pesantren

Pesantren adalah Lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren sudah menjadi milik umat islam setelah melalui proses islamisasi dalam sejarah perkembangannya. Peneliti sejarah mengatakan pada abad ke-15 pesantren pertama sudah berdiri di Jawa Timur, atas inisiatif para wali penganjur Islam. Maulana

Malik Ibrahim dipandang sebagai pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia, sedangkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dianggap sebagai Pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur.¹⁰⁶

Prof.Dr.H.Ramayulis mengatakan Klasifikasi pesantren menurut sikap mereka terhadap tradisi terbagi menjadi 3 :1) pesantren salafi, 2) pesantren khalafi, 3) pesantren modern.

Metode yang digunakan dipesantren adalah metode sorogan atau layanan individual, metode Wetonan dan Bandongan, atau layanan kolektif, metode musyawarah. Pesantren memiliki unsur-unsur penting diantaranya : pondok, masjid, santri, kyai, dan kitab klasik.

Kurikulum pesantren menurut peneliti Van Den Berg semua kitab-kitab yang digunakan dipesantren hamper semuanya berasal dari zaman pertengahan

¹⁰⁶ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam:perubahan konsep,filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta,Kalam Mulia,2011) hlm.263-264

dunia Islam. dan kitab-kitab ini melalui seleksi dulu terutama kitab-kitab fikih dan tasawuf, karena walaupun kitab-kitab yang masuk ke Jawa berbau Sufi tapi kedudukan tasawuf sangat lemah dari daftar buku yang masuk. Dan pada akhir abad 19 profil pesantren terkenal dengan studi fikih dan tata Bahasa Arab.

Pada masa Belanda menjajah Indonesia mereka mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memeras tenaga sumber daya alam dan pembodohan terhadap penduduk bumi, mereka melakukan pembaruan pendidikan yaitu westernisasi, dan kristenisasi untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dan mereka juga memperkenalkan sekolah-sekolah modern sesuai sistem persekolahan yang berkembang di dunia Barat, dan hal ini sedikit mempengaruhi sistem pendidikan yang sudah berjalan yaitu pesantren. Dan pada abad 20 M dunia pendidikan di Indonesia terpecah menjadi 2 golongan:

a. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama (corak baru)

b. Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja (corak lama).¹⁰⁷

Dan pada masa ini ulama-ulama pendidikan islam melakukan pembaruan dalam pendidikan dengan merubah sistem pendidikan islam dari sistem pendidikan tradisional,pesantren,dan langgar ke sistem madrasah,beberapa alasan ulama-ulama islam melakukan pembaruan pada fase ini adalah:

1) Karena terpecahnya dunia pendidikan dengan dua corak,corak lama dan corak baru dari belanda,yang menyebabkan terancamnya sistem pendidikan pesantren karena sekolah-sekolah belanda yang

¹⁰⁷ Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam,cet.ke 6 (Jakarta,prenada media group,2006)hal.298

dikelola belanda secara modern oleh belanda berisikan materi tentang keterampilan duniawi.

2) Sebagian masyarakat islam pada fase ini berpikir pendidikan pesantren memerlukan biaya hidup yang tinggi.

3) Pada sekolah-sekolah belanda hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan ,sehingga Sebagian masyarakat Indonesia ada yang masih tidak bisa baca tulis,karena tidak mendapatkan kesempatan belajar.

4) Ulama-ulama pendidikan islam pada fase ini disatu sisi memandang perlu untuk belajar dan mengetahui perkembangan ilmu dunia luar teknologi,dan disisi lain tetap belajar memahami agama yang telah ditanamkan jauh hari sebelum belanda datang ke indonsia.

5) Munculnya kesadaran dari pendidikan islam ulama-ulama yang pada waktu fase ini dan menyadari bahwa sistem pendidikan tradisional yang berjalan

disurau,dilanggar tidak lagi sesuai dengan iklim pada masa itu.¹⁰⁸

Akhirnya pada masa penjajahan belanda pun ada corak ketiga dalam pendidikan yaitu corak yang merupakan sintera dari corak lama dan corak baru dengan memasukan ilmu-ilmu pengetahuan barat yang sesuai dengan pendidikan islam ke dalam kurikulum madrasaah. Dan corak ketiga muncul bersamaan dengan lahirnya madrasah-madrasah yang berkelas yang muncul sejak tahun 1909, yang diplopori oleh para pembaruan di indonesia. Atas dasar ini didirikanlah lembaga pendidikan islam yang mengadopsi sekolah belanda ala sekolah: Adabiyah school , diniyah school, sumatera thawalib,dll.¹⁰⁹

4. Pengaruh Kebijakan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam.

¹⁰⁸ Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam,cet.ke 6 (Jakarta,prenada media group,2006)hal.299

¹⁰⁹ Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam,cet.ke 6 (Jakarta,prenada media group,2006)hal.299

Semenjak ulama-ulama islam melakukan pembaruan dengan ide-ide mendirikan Lembaga-lembaga islam dan ide-ide Nasionalisme,pemerintahan kolonial belanda mulai khawatir,awalnya belanda membiarkan kehidupan islam pada batas0batas tertentu,sepanjang tidak mengganggu kehadiran Belanda,sambal mengembangkan sistem persekolahan pada pengetahuan dan keterampilan duniawi,yaitu pendidikan umum.tetapi setelah melihat berkembangnya Lembaga-lembaga pendidikan islam dan meningkatnya jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta,pemerintah belanda mulai hati-hati dan menghilangkan sikap netral,dan mengeluarkan kebijakan dan peraturan diantaranya:

a. Pada tahun 1882 pemerintah belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi beragama dan pendidikan islam yang mereka sebut Resterraden. Maka pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang

isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran dan pengajian agama islam harys terlebih dahulu kepada pemerintah belanda.

b. Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama islam yaitu bahwa tidak semua orang kiyai boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Belanda.¹¹⁰

c. ordonansi,pada tanggal 28 maret 1923,berupa pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta. Pada awalnya ordonansi diperuntukan bagi seluruh sekolah swasta,tetapi dalam prakteknya sasaran yang dituju adalah madrasah dan sekolah-sekolah islam. Arah sasaran semakin jelas dengan bertambah jelas dengan kasus pungutan pajak bagi guru. Dampak ordonansi ini sangat terasa berat khususnya oleh sekolah-sekolah islam yang memiliki

¹¹⁰ Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam,cet.ke 6 (Jakarta,prenada media group,2006)hal.307-308

keterbatasan dalam berbagai bidang,dengan kata lain sekolah-sekolah islam sangat terpukul oleh adanya ordonansi itu. Apa lagi tujuan ordonansi itu untuk menekankan Agama Islam.¹¹¹

Belanda cukup banyak mewarnai perjalanan sejarah Islam di Indoneisa. Cukup banyak peristiwa dan pengalaman yang dicatat Belanda sejak awal kedatangannya di Indonesia, baik sebagai pedagang perseorangan ataupun ketika diorganisasikan dalam bentuk kongsi dagang yang bernama VOC, atau juga sebagai aparat pemerintah yang berkuasa dan menjajah. Kedatangan bangsa Barat di satu pihak membawa dampak pada kemajuan teknologi, kendati kemajuan tersebut tidak dinikmati oleh pribumi. Tujuannya hanyalah meningkatkan hasil penjahannya. Begitu pula dengan Pendidikan mereka

¹¹¹ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam:perubahan konsep,filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta,Kalam Mulia,2011) hlm.286-289

telah memperkenalkan sistem Pendidikan dan metodologi baru dan tentu saja lebih efektif namun itu semua hanya sekedar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah sekali dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat.

1) Pendidikan Islam sebelum tahun 1900

Pendidikan Islam pada masa ini bercirikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pelajaran diberikan satu demi satu
- b) Pelajaran ilmu Sharaf didahulukan dari ilmu Nahwu
- c) Buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa daerah setempat
- d) Kitab yang digunakan pada umumnya ditulis tangan

- e) Pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan dalam satu macam buku saja
- f) Took belum ada yang ada hanyalah menyalin buku dengan tulisan.

2) Pendidikan Islam pada masa peralihan (1900-1908)

Adapun pelajaran agama Islam pada masa peralihan ini bercirikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pelajaran untuk dua sampai enam ilmu dihimpun secara sekaligus
- b) Pelajaran ilmu nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu Sharaf
- c) Semua buku pelajaran merupakan karangan ulama Islam kuno dan dalam Bahasa Arab
- d) Semua buku dicetak
- e) Suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku, rendah, menengah, dan tinggi
- f) Telah ada took buku yang memesan buku-buku dari Mesir atau Mekah

- g) Ilmu agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan
- h) Aliran baru dalam Islam seperti yang dibawa oleh Majalah *Al-Manar* di Mesir mulai lahir.

3) Pendidikan Islam sesudah tahun 1909

Sistem Madrasah baru dikenal pada permulaan abad ke 20. Sistem ini membawa pembaharuan antara lain:

- a) Perubahan sistem pengajaran dari perseorangan atau sorogan menjadi klasikal
- b) Pengajaran pengetahuan umum disamping pengetahuan agama dan Bahasa Arab.¹¹²

B. Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Jepang

Kehadiran Jepang menjajah Indonesia sangatlah singkat. Namun, Jepang tetap memberikan pengaruh

¹¹² . Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia. Bandung, Pustaka Setia, 2006, hlm.58-60

terhadap perkembangan pendidikan Islam. Salah satunya adalah umat Islam lebih leluasa mengembangkan pendidikannya karena peraturan pemerintah Belanda yang diskriminatif tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam saat itu masih sama dengan sistem zaman Belanda, yaitu di samping sistem pendidikan pesantren, juga terdapat sistem pendidikan klasikal, yaitu sistem pendidikan Belanda yang memuat pelajaran agama.¹¹³ Sikap penjajahan Jepang terhadap Pendidikan islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan islam lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan islam untuk berkembang.¹¹⁴

¹¹³ Aisyah Nursyarif, "Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Lentera Pendidikan* Vol. 17 No. 2 Desember 2014 (Italic), hal 263

¹¹⁴ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara* (Jakarta, Kalam Mulia, 2011) hlm.344

Perkembangan dan keadaan sistem pendidikan islam pada masa penjajahan jepang diantaranya:

1. Madrasah

Awal pendudukan jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Selagi ada angin segar yang diberikan oleh Jepang, namun kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja dan umat islam Indonesia memanfaatkannya dengan sebaiknyabaiknya. Dan madrasah yang berjalan difase penjajahan jepang adalah madrasah Awaliah dibawah pimpinan Majlis Islam Tertinggi. Madrasah Awaliah tersebut diadakan sore hari lebih kurang satu setengah jam lamanya, materi yang diajarkan adalah membaca Al-Quran, ibadah,akhlak, dan keimanan sebagai latihan pelajaran agama yang dilakukan di sekolah Rakyat pagi hari.¹¹⁵

2. Pendidikan agama di sekolah

¹¹⁵ Mahmud Yunus,*Sejarah Pendidikan Islam*,(Jakarta,Hidakarya Agung,1996,) hlm.121-123

Sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan bagi para guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajaran agama.¹¹⁶ Mahmud Yunus sebagai wakil ketua di majlis tertinggi islam dengan usahanya penjajahan jepang dapat menerima usulan untuk memasukan pelajaran agama islam ke sekolah-sekolah pemerintahan sejak dari sekolah desa (Sekolah Rakyat). Untuk melancarkan program pengajaran ini majlis mengadakan pelatihan guru-guru lalu disebar ke seluruh Minangkabau, tapi sayangnya, pemerintahan penjajah tidak menyediakan anggaran belanja untuk para guru sehingga mereka tidak mendapatkan gaji, akhirnya Sebagian dari mereka tidak sanggup meneruskan

¹¹⁶ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta, Kalam Mulia, 2011) hlm.344

program pengajaran agama islam disekolah-sekolah pemerintah penjajahan Jepang.¹¹⁷

3. Perguruan Tinggi Islam

Pemerintahan Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH.Wahid Hasyim,Kahar Muzakkir , dan bung Hatta.¹¹⁸

C. Kebijakan-kebijakan pemerintahan jepang pada pendidikan islam

Di tahun-tahun awal penjajahannya, Jepang bahkan menampakkan diri seolaholah membela kepentingan Islam. Ini merupakan siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Mereka menempuh kebijakan di antaranya:

1. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut Kantoor Voor Islamistische Zaken

¹¹⁷ Mahmud Yunus,*Sejarah Pendidikan Islam*,(Jakarta,Hidakarya Agung,1996,) hlm.122

¹¹⁸ Zuhairini *et al.*, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 151

dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, diubah menjadi Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dari Jombang;

2. Beberapa pondok pesantren besar sering dikunjungi Jepang dan mendapat bantuan;
3. Sekolah negeri mendapat pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran Islam;
4. Jepang juga mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam;
5. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Bung Hatta;
6. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta). Pembela Tanah Air inilah yang menjadi cikal bakal TNI saat ini;

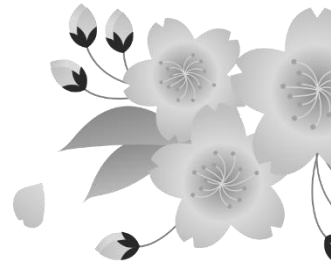
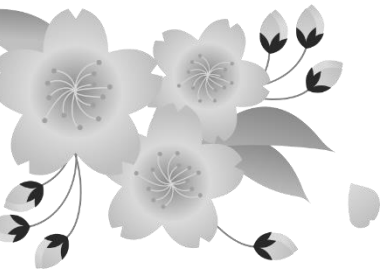
7. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia (MAI) yang bersifat kemasyarakatan.¹¹⁹

Walaupun Jepang berusaha mengambil hati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan praktik agama dan mengembangkan pendidikan, ulama tidak semudah itu tunduk kepada pemerintah Jepang apabila hal tersebut bertolak belakang dengan akidah Islam. Misalnya perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan para santri dalam menentang kebijakan kufur pemerintah Jepang yang memerintahkan setiap orang untuk menghadap ke Tokyo setiap pukul 07.00 untuk menghormati kaisar Jepang yang mereka anggap keturunan Dewa

¹¹⁹ Zuhairini *et al.*, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 151

Matahari. Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan Jepang selama 8 bulan.¹²⁰

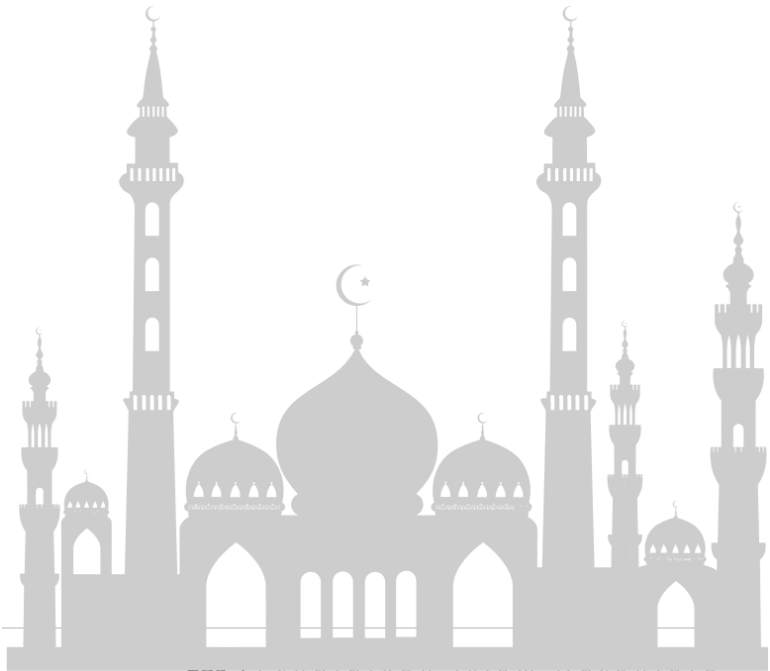
¹²⁰ Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam: perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara (Jakarta, Kalam Mulia, 2011) hlm.345



BAB VIII

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA AWAL

KEMERDEKAAN DAN ORDE BARU



A. Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Dan Orde Baru

1. Pendidikan Islam pada Masa Awal Kemerdekaan

Perkembangan pendidikan sejak Indonesia mencapai kemerdekaan memberikan gambaran yang penuh dengan kesulitan. Pada masa ini, usaha penting dari pemerintah Indonesia pada permulaan adalah tokoh pendidik yang telah berjasa dalam zaman kolonial menjadi menteri pengajaran. Dalam kongres pendidikan, Menteri Pengajaran dan Pendidikan tersebut membentuk panitia perancang RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Dimaksudkan untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan pada ideologi Bangsa Indonesia sendiri.¹²¹

¹²¹ Syaharuddin, & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. In Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (Vol. 53, Issue 9).

Perhatian yang dilakukan BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) yang mengusulkan agar dibentuk Kementerian Agama untuk menangani urusan-urusan agama.¹²² Usulan ini selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk Kementerian Agama melalui Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946. Selain usulan pembentukan Kementerian Agama, BP KNIP dalam sidangnya tanggal 27 Desember 1945 juga merekomendasikan kepada Kementerian PP&K, agar secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru yang telah disusun BP KNIP. Di antara rencana pokok tersebut juga mengatur tentang pendidikan agama di sekolah negeri, yang menyatakan “*Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang*

¹²² Azyumardi Azra dan Saiful Umam, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS-PPIM-Badan Litbang Agama Departemen Agama, 1998), 5.

teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya.”

Menindaklanjuti usulan BP KNIP tersebut, pada tanggal 1 Maret 1946 Menteri PP&K melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O membentuk sebuah komisi khusus bernama Panitia Penyelidik Pengajaran yang diketuai Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja sebagai sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelidik membuat seksi-seksi sebanyak delapan seksi sesuai permasalahan yang dibahas. Kerja keras Panitia Penyelidik menghasilkan sejumlah hal penting. Tentang pendidikan agama, laporan Panitia Penyelidik (tanggal 2 Juli 1946) menyampaikan hal-hal berikut:

- a. Hendaknya agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran;
- b. Guru agama dibayar oleh pemerintah;

- c. Di S.R (Sekolah Rakyat) pelajaran agama dimulai kelas IV;
- d. Guru agama diangkat oleh Kementerian Agama;
- e. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum;
- f. Buku-buku dalam agama diadakan oleh Pemerintah;
- g. Harus ada pendidikan guru agama;
- h. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya; dan
- i. Tidak perlu bahasa Arab.

Meskipun beberapa tokoh telah merekomendasikan pentingnya pendidikan agama di sekolah, pada tataran praktis, mata pelajaran agama belum dimasukkan dalam kurikulum. Hal ini terlihat pada kurikulum SMA 1946 (yang disusun dengan SK Menteri PP&K tanggal 19/11/1946 No. 1153/Bhg.A) yang tidak memasukkan mata pelajaran agama.

Pada saat itu, mata pelajaran agama belum terintegrasi ke dalam struktur kurikulum, karena minat para tokoh akan pentingnya pendidikan agama di sekolah masih dalam bentuk insentif, usulan, belum menjadi bentuk formal yang mengikat. Untuk itu, setelah berdirinya Kementerian Agama, lembaga tersebut segera mengambil langkah serius dan sistematis untuk memastikan pendidikan agama di sekolah-sekolah, seperti yang direkomendasikan oleh Panitia Penyelidik Pengajaran. Langkah awal yang dilakukan Menteri Agama antara lain pembentukan unit khusus di lingkungan Kementerian Agama, yaitu Zona C, yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Agama No. 1185/K.J. 20 November. , 1946. Tugas Bagian C adalah mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan; (a) masalah pendidikan dan pelajaran Islam dan Kristen, (b) masalah pengangkatan guru agama, dan (c) masalah pengawasan pendidikan agama. Sebagai langkah selanjutnya, Menteri Agama dan

Menteri PP&K menandatangani kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Kesepakatan ini tertuang dalam Peraturan Menteri PP&K dan Peraturan Menteri Agama No. 1142/Bhg. A (Pengajaran) Jakarta tanggal 2 Desember 1946 dan No. 1285/K7 (Agama) Yogyakarta tanggal 12 Desember 1946, mengatur bahwa pendidikan agama di sekolah dasar diberikan mulai kelas 4 dan berlaku efektif, selain itu untuk memperkuat perencanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana telah diputuskan, pemerintah pada tahun 1947 membentuk suatu badan penasehat yang disebut Majelis Pertimbangan Pengajaran Pendidikan Agama Islam yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara (dari Kementerian PP&K) dan Dr. Abdullah Sigit (dari Kementerian Agama)

Kemudian, pada tanggal 2 April 1950 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Perlu diketahui bahwa rencana membuat undang-

undang pendidikan telah dimulai sejak tahun 1948. Rencana Undang-Undang (RUU) dapat diselesaikan pada tahun itu juga, dan segera akan diajukan kepada BP KNIP. Namun rencana ini terhalang oleh Agresi Belanda II (19 Desember 1948). Setelah situasi kondusif dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta pada 6 Agustus 1949, maka naskah RUU diajukan ke BP KNIP oleh Menteri PP&K S. Mangunsarkoro. Selanjutnya RUU tersebut disepakati BP KNIP dan kelak disahkan sebagai undang-undang pada tanggal 2 April 1950 oleh Pemangku Jabatan Sementara Presiden RI Mr. Asaat dan Menteri PP&K S. Mangunsarkoro, dan diundangkan pada tanggal 5 April 1950 oleh Menteri Kehakiman AG. Pringgodigdo.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan peraturan lama (Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama tahun 1946) dengan isi Undang-Undang No. 4/1950, maka pada tahun 1951 dibuat Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama tentang Peraturan

Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Beberapa point penting dari isi peraturan bersama ini adalah:

- a. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pendidikan agama;
- b. Pasal 2 ayat (1): Di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam dalam 1 (satu) minggu;
- c. Pasal 2 ayat (2): Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lain-lain lingkungan.
- d. Pasal 3: “di sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah vak, diberi

pendidikan agama 2 (dua) jam dalam tiap-tiap minggu.”

- e. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2): Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3): Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.
- f. Pasal Penutup (I): Peraturan-peraturan ini berlaku pula buat sekolah-sekolah partikular yang mendapat subsidi atau sokongan dari pemerintah.¹²³

¹²³ Kosim, Mohammad K. *"Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama."* *Karsa*, vol. 22, no. 1, 2014.

Keputusan bersama di atas semakin mengukuhkan posisi pendidikan agama di sekolah umum, dari yang sebelumnya hanya diajarkan di sekolah dasar menjadi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas baik di sekolah umum maupun kejuruan. Namun karena kedudukan pendidikan agama bukanlah pendidikan wajib, maka siswa yang belum mendapat restu dari orang tuanya tidak dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama. Siswa dewasa juga dapat memutuskan sendiri apakah akan mengikuti kelas pendidikan agama. Mata pelajaran agama tidak diwajibkan, sehingga mata pelajaran tersebut akan dikelompokkan ke dalam kelompok mata pelajaran pelengkap ketika kurikulum diterapkan. Hal ini terlihat dari struktur kurikulum SMA 1952 yang membagi mata pelajaran menjadi empat kelompok. Utama, penting dan pelengkap.

Pada tanggal 12 Maret 1954 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12/1954 tentang

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4/1950 dari RI Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, ketika UU No. 4/1950 disahkan, Negara RI masih merupakan bagian dari Negara RIS (Republik Indonesia Serikat), sehingga undang-undang tersebut hanya berlaku di wilayah RI di Yogyakarta. Sejak Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 sampai 4 tahun kemudian, Indonesia belum memiliki undang-undang pendidikan. Maka muncullah inisiatif untuk memberlakukan undang-undang pendidikan yang ada ke seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12/1954. Inilah undang-undang pendidikan pertama yang menjadi payung dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia.¹²⁴

¹²⁴ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. (UIN

Pada tanggal 12 Maret 1954 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12/1954 mengenai Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4/1950 berdasarkan RI Dahulu mengenai Dasar-Dasar Pendidikan pada Sekolah bagi Seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat UU No. 4/1950 disahkan, Negara RI masih adalah bagian berdasarkan Negara RIS (Republik Indonesia Serikat), sebagai akibatnya undang-undang tadi hanya berlaku pada daerah RI pada Yogyakarta. Sejak Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950 hingga 4 tahun kemudian, Indonesia belum mempunyai undang-undang pendidikan. Maka muncullah inisiatif agar memberlakukan undang-undang pendidikan ke seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12/1954. Inilah undang-undang pendidikan pertama yg sebagai payung & panduan bagi aplikasi pendidikan pada indonesia.

Jakarta Press, 2009), 187.

Oleh karena itu, lahirnya undang-undang ini bukan hanya penegasan atas berlakunya UU No 4 Tahun 1950, tetapi perluasan ruang lingkup UU No 4 Tahun 1950 yang dari awalnya hanya berlaku di Yogyakarta meluas ke seluruh wilayah NKRI. Adapun tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tidak hanya mengukuhkan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah, tetapi juga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Orde Baru ialah masa pemerintahan di Indonesia semenjak 11 Maret 1966 sampai terbentuknya peralihan kepresidenan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi pergantian strategi politik serta kebijakan pembelajaran nasional. Orde Baru membagikan corak baru untuk kebijakan

pendidikan Agama Islam, sebab beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila lewat rencana pembangunan nasional berkepanjangan.¹²⁵

Pada awal masa pemerintahan orde baru, pendidikan di madrasah memakai kurikulum-kurikulum yang belum terstandar, mempunyai struktur yang tidak seragam, serta kurang terpantaunya manajemen madrasah oleh pemerintah. Mengalami realitas tersebut, langkah awal dalam melaksanakan pembaruan ini merupakan dengan dikeluarkannya kebijakan Menteri Agama Tahun 1967 selaku reaksi terhadap TAP MPRS Nomor. XXVII Tahun 1966 dengan melaksanakan formalisasi serta strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh dengan menegerikan beberapa madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah selain mendirikan madrasah-madrasah yang baru. Sebaliknya strukturisasi dicoba dengan mengendalikan

¹²⁵ Anas Salahudin, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 232.

perjenjangan serta merumuskan kurikulum sekolah-sekolah yang terletak dibawah Depdikbud. Salah satunya tercantum dalam pasal 1 TAP MPRS Nomor. XXVII Tahun 1966 “menetapkan pendidikan agama jadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar hingga ke universitas-universitas negeri.”¹²⁶

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dibesarkan agar menguatkan keberadaannya, tetapi diawal- awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Memandang aspirasi rakyat yang keberatan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, hingga pemerintah menyikapinya dengan mengadakan persidangan kabinet terbatas bertepatan pada 26 november 1974 yang disepakati 3 menteri (kementrian agama, kementrian

¹²⁶ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 361.

pendidikan dan kebudayaan, serta kementerian dalam negeri) yang diketahui dengan “SKB 3 Menteri” tahun 1975. Konvensi 3 menteri itu menimpa “peningkatan mutu pendidikan madrasah”.

Secara universal SKB 3 Menteri membuat sebagian syarat yang meliputi kelembagaan, kurikulum serta pengajaran. Keputusan yang diartikan merupakan, jika madrasah merupakan lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam selaku mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum.

Sebagian pasal yang lumayan strategis dalam menguatkan posisi madrasah untuk menampilkan kesetaraan dengan sekolah antara lain, 1) Dalam Bab 1 pasal 1 ayat 2 berbunyi: a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Bawah; b) Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Awal; serta c) Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas. Untuk tingkatan kualitas

pendidikan, diupayakan materi atau modul pendidikan madrasah setingkat dengan mata pelajaran umum di sekolah guna memberi pengaruh pada pengakuan ijazah, lulusan serta status siswa madrasah. 2) Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan: a) ijazah madrasah bisa memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; b) lulusan madrasah bisa melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi; serta c) siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat.¹²⁷

Pada dasarnya segala kebijakan yang lahir pada era Orde Baru, tercantum dalam bidang pembelajaran, ditunjukkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi. Kebijakan tersebut ialah sebagai berikut:¹²⁸

¹²⁷ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 363.

¹²⁸ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 334-336.

1. Masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem pembelajaran nasional diawali dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri(SKB 3 Menteri), ialah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. Di dalam SKB 3 Menteri tersebut antara lain dinyatakan jika lulusan madrasah bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan umum serta kebalikannya, berhak memperoleh dorongan fasilitas prasarana, bayaran, serta diakui ijazahnya. Tidak hanya itu, lahir pula Undang- Undang No 2 Tahun 1989 yang memasukkan pendidikan Islam mulai dari tingkatan kanak- anak sampai perguruan tinggi selaku bagian dari sistem pendidikan nasional yang berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam bidang regulasi, dorongan keuangan, serta SDM.

2. Pembaruan madrasah serta pesantren, baik pada aspek raga ataupun nonfisik. Pada aspek raga pembaruan di jalani pada kenaikan serta peralatan infrastruktur, fasilitas prasarana, serta sarana, semacam

buku, perpustakaan, serta perlengkapan laboratorium. Ada pula pada aspek nonfisik meliputi pembaruan bidang kelembagaan, manajemen pengelolaan, kurikulum, kualitas SDM, proses belajar mengajar, jaringan information technology (IT), serta lain sebagainya.

3. Pemberdayaan pembelajaran Islam nonformal. Pembelajaran Islam nonformal tersebut antara lain dalam wujud majelis taklim, baik golongan warga Islam kelompok, warga biasa, atau pun warga menengah ke atas.

Sehabis SKB 3 Menteri, berikutnya dikeluarkannya SKB Menteri P&K Nomor. 299/ U/ 1984 dengan Menteri Agama Nomor 45 tahun 1984, tentang pengaturan pembaruan kurikulum sekolah umum serta kurikulum madrasah yang isinya antara lain mengizinkan kepada lulusan madrasah agar melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Upaya dalam pengaturan serta pembaruan

kurikulum madrasah diluaskan dengan menyusun kurikulum sesuai konsensus yang ada. Khusus Madrasah Aliyah, waktu tiap mata pelajaran berlangsung 45 menit serta mengenakan semester. Sedangkan itu, tipe program pembelajaran dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti serta program pilihan. Pengembangan kedua program kurikulum ini dibagi menjadi 2 bagian, ialah: a) pendidikan agama, terdiri dari: Al- Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, serta Bahasa Arab; serta b) pendidikan dasar umum yang terdiri dari: PMP, PSPB, Bahasa serta Sastra Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia, Pengetahuan Sosial, Sains, Olahraga serta Kesehatan, Matematika, Pembelajaran Seni, Pembelajaran Keahlian, Bahasa Inggris (MTs serta MA), Ekonomi (MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) serta Kimia (MA).¹²⁹

¹²⁹ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*,

Di antara rumusan kurikulum 1984 muat perihal strategis berikut: 1) Program aktivitas kurikulum madrasah (MI, MTS serta MA) tahun 1984 dicoba lewat aktivitas interkurikuler, kokuler, serta ekstrakurikuler, baik dalam program inti ataupun program opsi. 2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memerhatikan keserasian antara metode seorang belajar dengan apa yang dipelajarinya. 3) Evaluasi dicoba secara berkesinambungan serta merata buat kenaikan proses serta hasil belajar, dan pengelolaan program.

Secara resmi, madrasah telah jadi sekolah universal yang menjadikan agama selaku karakteristik khas kelembagaannya. Di satu pihak modul pengetahuan universal untuk madrasah secara kuantitas serta mutu hadapi kenaikan, namun di pihak lain kemampuan murid terhadap pengetahuan agama jadi serba tanggung. Menyadari keadaan semacam itu

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 366.

timbul kemauan pemerintah buat mendirikan MA yang bertabiat khusus yang setelah itu diketahui dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang didasari pada Keputusan Menteri Agama Nomor. 73 Tahun 1987 dengan perbandingan 70% agama serta 30% umum. Dengan diberlakukannya kurikulum 1994 yang ialah konsekuensi UUSPN No 2 tahun 1989, MAPK ditukar namanya jadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).¹³⁰

¹³⁰ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 367-368.



BAB IX

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA

REFORMASI



A. Pendahuluan

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru Mei 1998 hingga saat ini, pendidikan Islam masih mencari bentuk, sebab program reformasi secara total dan menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Oleh sebab itu dua hal yang dihadapi pendidikan Islam, yaitu :

Berkaitan dengan peralatan kembali seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain menuju cara yang lebih demokratis, transparan, jujur, amanah, manusiawi dan modern melalui konsep masyarakat madani. Dengan

cara demikian praktek KKN dapat dihadapi. Dalam upaya melakukan penataan Kembali, maka konsep masyarakat madani. Harus diterapkan. Seiring dengan reformasi dan penerapan masyarakat madani tersebut maka berbagai produk perundang-undangan juga mengalami perubahan. Dua diantara perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan (reformasi) Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 ke Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan perubahan sistem Pemerintah dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik melalui munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perkembangan Keuangan antara pusat daerah.

Berkaitang dengan masalah tersebut, pendidikan Islam ditantang agar mampu menghasilkan lulusan yang dapat menghadapi tantangan globalisasi tersebut dan merubah menjadi peluang. Maka seluruh komponen pendidikan Islam harus direvitalisasi, revisi dan tinjau ulang agar sesuai dengan zaman. Oleh sebab

itu kebijakan pemerintah pada era reformasi sebagai kebijakan yang tanggap terhadap UU No. 20 Tahun 2003.

Pendidikan Islam pada masa reformasi banyak mengalami tantangan, oleh karna itu pendidikan Isla, mampu mengikuti perkembangan zama jika tidak ia akan tetap tertinggal. Pada masa reformasi pendidikan Islam berusaha memperluas cakupan ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam dengan dibukanya jurusan-jurusan umum dalam madrasah dan IAIN/STAIN dan munculnya wacana ingin mengembalikan pengelolaan pendidikan ke Departemen Pendidikan Nasional sampai lahirnya UIN.¹³¹

B. Kurikulum Pendidikan Pada Masa Reformasi

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan

¹³¹ Samsul Bahri, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Indramayu : Penerbit Adab, 2020), h. 87-89.

pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang

didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”.

Pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa.¹³²

¹³² Syaharuddin dan Heri susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nursantara Sampai Reformasi*, cet. ke-1, (Banjarasin : Universitas Lambung Mangkurat, 2019), h. 122-123.

C. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Pada Masa Reformasi

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan Nasional, yang dibagi tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (value).

Untuk meletakkan duduknya pendidikan Islam dalam system pendidikan Nasional perlu diklasifikasikan kepada tiga hal :

Pendidikan Islam sebagai lembaga

a. Pendidikan dasar (Pasal 17) menyebutkan :

Pendidikan dasar terbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan menengah (Pasal 18) menyebutkan :

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah KEjuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

c. Pendidikan tinggi (Pasal 20) menyebutkan :

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas.

d. Lembaga pendidikan nonformal (Pasal 26).

Suatu pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majlis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

e. Lembaga pendidikan informal (Pasal 27).

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

f. Pendidikan usia dini (Pasal 28)

Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran

- a. Peningkatan iman dan takwa.
- b. Peningkatan akhlak mulia.
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.¹³³

D. Pesantren Pada Masa Reformasi

Sejak munculnya USPN No. 2 tahun 2003 (awal reformasi), perkembangan pesantren bertambah pesat dengan jumlah pesantren sebanyak 16 ribu pesantren baik tradisional maupun modern. Ini artinya bahwa

¹³³ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2012), h. 12-14.

pendidikan di negeri ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan. Kebijakan semacam ini telah mengarahkan perhatian kepada penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dalam arti pendidikan diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

Reformasi kelembagaan pesantren setelah keluar USPN No. 20 tahun 2003 diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pertumbuhan dan perkembangan pesantren semakin tidak terbendung, dalam kurun waktu 10 tahun perkembangan kelembagaan pesantren berdasarkan

Pendataan	Pondok	Pesantren
-----------	--------	-----------

tahun 2011-2012 berhasil mendata 27.230 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.¹³⁴

Secara umum, kurikulum pondok pesantren dapat dipilah menjadi dua, yakni kurikulum studi keagamaan dan kurikulum studi umum. Dalam pondok pesantren tradisional, ada pemisahan antara kurikulum pesantren dan kurikulum sekolah dan/atau madrasah. Kurikulum pesantren merupakan kurikulum khas pesantren berupa ilmu-ilmu keagamaan yang terdiri dari sembilan bidang ilmu, yakni yakni: tauhid, fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, tasawuf, nahwu/sharaf, dan akhlak serta sirah (sejarah) nabi. Sementara kurikulum sekolah merupakan kurikulum yang berasal dari kementerian pendidikan nasional, jika pesantren tersebut memiliki sekolah semisal SMP dan SMU. Selanjutnya jika pesantren memiliki madrasah semisal Tsanawiyah dan Aliyah, maka ia menggunakan kurikulum yang berasal

¹³⁴ Murdianto, Reformasi Kelembagaan Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Tasâmuh*, Vol. 14, 2017, h. 191-192.

dari Kementerian Agama. Sementara dalam pesantren modern, pada umumnya menggunakan kurikulum terpadu, yakni tidak memisahkan antara kurikulum pesantren yang berupa kurikulum studi keagamaan dan kurikulum sekolah/madrasah yang berupa studi umum. Untuk meningkatkan kemampuan santri di bidang-bidang tertentu, selain materi-materi agama, diajarkan juga materi keterampilan khusus yang disesuaikan dengan tujuan dan orientasi pesantren, seperti yang dilaksanakan Pesantren Gontor dengan materi muhadlarah (ceramah), bahasa Arab, dan Inggris.¹³⁵

E. Perkembangan perguruan tinggi Islam pada masa reformasi

IAIN didirikan tahun 1960, lembaga ini telah berkembang ke berbagai kota di Indonesia, yang

¹³⁵ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuh, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, (Jakarta : Pusat, Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi P3DI) h. 21.

akhirnya IAIN-IAIN tersebut yang pada mulanya merupakan cabang dari IAIN Yogyakarta atau Jakarta menjadi IAIN telah tercatat sejumlah 14 buah diseluruh Indonesia.

Fakultas-fakultas daerah yang memiliki lebih dari satu fakultas di suatu kota digabung menjadi satu dan menjadi STAIN di kota tersebut. Apakah beda IAIN dna STAIN? Bila mengacu kepada PP No. 30 Tahun 1990 sekarang berubah menjadi PP No. 60 Tahun 1999 bahwa Institut adalah penyelenggara program akademik dan atau professional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang sejenis.¹³⁶

Pada abad ke-21, sejumlah IAIN berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), karena memiliki fakultas dan jurusan di luar studi keislaman. IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta adalah IAIN yang

¹³⁶ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia Historis dan Eksistensinya*, (Jakarta : Kencana), h. 189.

pertama kali berubah nama menjadi UIN. Jika pada tahun 2000 tercatat masih terdapat 14 IAIN di Indonesia, saat ini 6 di antaranya telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Berikut adalah daftar UIN di Indonesia, dahulu berstatus IAIN dan STAIN²⁹, yaitu :

- 1) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
- 2) UIN Sulthan Syarif Qasim, Pekanbaru,
- 3) UIN Sunan Gunung Jati Bandung,
- 4) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
- 5) UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang,
- 6) UIN Sultan Alauddin Makassar.¹³⁷

¹³⁷ Murdianto, Reformasi Kelembagaan Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Tasâmuh*, Vol. 14, 2017, h. 191-192.

Pairin, Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Sautut Tarbiyah*, 2015, h. 129.

BAB X

PENDIDIKAN ISLAM DARI SATU DEKADE PASCA REFORMASI



A. Pendidikan Islam Pasca Reformasi

Berangkat dari pemikiran bahwa suatu usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Ibarat seseorang yang bepergian tak tentu arah maka hasilnya adalah tak lebih dari pengalaman selama perjalanan. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha yang dilakukan sehingga dalam

penerapannya ia tak kehilangan arah dan pijakan. Namun sebelum masuk pada pembahasan mengenai fungsi dan tujuan Pendidikan Islam terlebih dahulu perlu dijelaskan apa pengertian Pendidikan Islam.

Pengertian pendidikan Islam yaitu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun ruhaniyah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Alla, manusia dengan alam semesta.¹³⁸

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa pengertian pendidikan Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya : beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-qur'an dan As-sunnah, maka tujuan dan konteks ini

¹³⁸ Daulay, P. Haidar. Kapita Selekta : Pendidikan Islam di Indonesia. (Medan: Perdana Publishing. 2012) hal. 1

terciptanya manusia seutuhnya “Insan Kamil”, setelah proses pendidikan berakhir.

Dalam artian bahwa pendidikan Islam adalah proses penciptaan manusia yang memiliki kepribadian serta berakhlakul karimah “Akhlak Mulia” sebagai makhluk pengemban amanah di bumi.

Maka Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mampu menyiapkan kader-kader *khalifah*, sehingga secara fungsional keberadaannya menjadi pemeran utama terwujudnya tatanan dunia yang *rahmatan lil-‘alamin*. Ditambahkan lagi bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan yang utuh dan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif.

B. Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Reformasi

Sejalan dengan adanya berbagai perbaikan politik tersebut di atas, telah menimbulkan keadaan pendidikan islam era reformasi keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pemerintah era Orde Baru. Karena dibentuknya kebijakan-kebijakan pendidikan islam era reformasi, kebijakan itu antara lain:

Pertama, kebijakan tentang pemantapan pendidikan islam sebagai bagian dari System pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Jika pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk dalam system pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan pesantren, ma'had Ali, Roudhotul Athfal (Taman Kanak-Kanak) dan Majelis Ta'lim

termasuk dalam system pendidikan nasional.¹³⁹ Dengan masuknya pesantren, ma'had Ali, Roudhotul Athfal (Taman Kank-Kanak) dan Majelis Ta'lim ke dalam system pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan islam semakin diakui, juga menghilangkan kesan dikotomi dan diskriminasi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang-undangan dan peraturan tentang standar nasional pendidikan tentang srtifikasi Guru dan Dosen, bukan hanya mengatur tentang Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga tentang

¹³⁹ Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat kekurangan atau kelemahan pada UU No 2 Tahun 1989, yaitu: (1) Sistem Pendidikan Nasional yang bersifat sentralistik; (2) belum menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan bersaing dengan negara lain; (3) belum mengemban misi pendidikan untuk semua; (4) belum dapat mendukung lahirnya peserta didik yang berakhlak mulia; (5) belum memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan multikultural; (6) belum dilaksanakan secara profesional.

Standar Pendidikan, Sertifikasi Guru dan Dosen yang berada di bawah Kementerian Agama.

Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan islam 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji Guru dan Dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pengadaan buku gratis, infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan adanya anggaran pendidikan yang cukup besar ini, pendidikan saat ini mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan keadaan pendidikan sebelumnya, termasuk keadaan pendidikan islam.

Ketiga, program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama.

Keempat, penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Nasional (SBN), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan, bagi sekolah yang akan ditetapkan menjadi SBI harus terlebih dahulu mencapai sekolah bertaraf SBN. Sekolah yang bertaraf nasional dan internasional ini bukan hanya terdapat pada sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan

Nasional, melainkan juga pada sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama.

Kelima, kebijakan sertifikasi bagi semua Guru dan Dosen baik Negeri maupun Swasta, baik umum maupun Guru agama, baik Guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun Guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Program ini terkait erat dengan peningkatan mutu tenaga Guru dan Dosen sebagai tenaga pengajar yang profesional. Pemerintah sangat mendukung adanya program sertifikasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang sertifikasi Guru dan Dosen, -juga mengalokasikan anggaran biayanya sebesar 20% dari APBN. Melalui program sertifikasi tersebut, maka kompetensi akademik, kompetensi pedagogik (teaching skill), kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial para Guru dan Dosen ditingkatkan.

Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006). Melalui kurikulum ini para peserta didik tidak hanya dituntut menguasai mata pelajaran (subject matter) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1995, melainkan juga dituntut memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, memecahkan masalah dan menganalisis. Dengan cara demikian para peserta didik diharapkan akan memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengemukakan pendapat, kritis, inovatif, kreatif dan mandiri. Peserta didik yang demikian itulah yang diharapkan akan dapat menjawab tantangan era globalisasi, serta dapat merebut berbagai peluang yang terdapat di masyarakat.

Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada (*teacher*

centris) melalui kegiatan *teaching*, melainkan juga berpusat pada murid (*student centris*) melalui kegiatan *learnig* (belajar) dan *research* (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar bukan hanya ceramah, seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan dan penemuan. Pendekatan proses belajar mengajar ini juga harus didasarkan pada asas demokratis, humanis dan adil, dengan cara menjadikan peserta didik bukan hanya menjadi objek pendidikan melainkan juga sebagai subjek pendidikan yang berhak mengajukan saran dan masukan tentang pendekatan dan metode pendidikan. Agar pendekatan dapat diwujudkan, maka perlu adanya perubahan metode belajar mengajar pada pendekatan kita, yaitu: (1) mengubah cara belajar dari model warisan menjadi memecahkan masalah; (2) dari hafalan ke dialog; (3) dari pasif ke heuristics; (4) dari strategi

menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat.

Kedelapan, penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang naik dan memuaskan (*to give good service and satisfaction for all customers*). Dengan pandangan bahwa pendidikan adalah sebuah komoditas yang diperdagangkan, agar komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi. Standar tersebut harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang unggul, dilakukan perbaikan terus menerus, dan dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan ini, maka di zaman reformasi ini telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021

tentang Standar Nasional Pendidikan¹⁴⁰ (SNP) yang meliputi :

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian Pendidikan;
5. Standar Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana Dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan; Dan
8. Standar Pembiayaan

Kesembilan, kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini, maka madrasah menjadi sekolah umum plus. Karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) ini, selain para siswa memperoleh pelajaran umum yang terdapat pada sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMU. Dengan adanya kebijakan tersebut,

¹⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2005, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional) Bab II, Pasl 3

maka tidaklah mustahil jika suatu saat madrasah akan menjadi pilihan utama masyarakat.

Seiring dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional telah disambut positif dan penuh optimisme oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengelola pendidikan. Berbagai inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan komponen-komponen pendidikan telah banyak bermunculan di lembaga pendidikan. Melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberi peluang bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan putra putrinya. Melalui program sertifikasi Guru dan Dosen telah menimbulkan perhatian kepada para Guru dan Dosen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Melalui program Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah melahirkan suasana akademik dan proses belajar mengajar yang lebih kreatif, inovatif dan mandiri.

Demikian juga dengan adanya Standar Nasional Pendidikan telah timbul kesadaran bagi kalangan para pengelola pendidikan untuk melakukan akreditasi terhadap program studi yang dilaksanakan.

Kini bangsa Indonesia hidup di era globalisasi dan reformasi yang keadaannya jauh berbeda dengan keadaan dimasa lampau. Berbagai perubahan yang terjadi di era globalisasi dan era reformasi tersebut telah mempengaruhi pada seluruh komponen pendidikan. Berbagai komponen pendidikan telah memiliki paradigma baru yang keadaannya berbeda dengan paradigma pendidikan di masa lalu. Dalam keadaan demikian, lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ingin tetap eksis dan memiliki kontribusi bagi penyiapan masa depan bangsa, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan

berbagai perubahan dan paradigma baru pendidikan tersebut.¹⁴¹

Menurut Tilaar reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan yang menyeluruh dari suatu sistem pendidikan kehidupan dalam aspek politik, ekonomik, hukum, sosial, dan tentu saja bisa diterapkan dalam bidang pendidikan.¹⁴²

Pendidikan adalah salah satu bidang yang diotonomkan dari sekian banyak bidang lainnya. Gelombang demokratisasi dalam pendidikan menuntut adanya desentralisasi pengelolaan pendidikan, beberapa dampak dari sentralisasi pendidikan telah muncul di

¹⁴¹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta : Kencana Prenada media, 2009, hal. 15

¹⁴² Zainnuddin, *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, hal. 31.

Indonesia uniformitas. Uniformitas ini mematikan inisiatif dan kreativisme serta inovasi perorangan maupun masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia sangat perlu pula dihargai adanya sisi perbedaan yang tidak mesti seragam, karena keberadaan masyarakat majemuk itu menuntut adanya berbagai perbedaan yang merangsang untuk tumbuhnya kreativitas dan inovasi.

Sejarah telah mencatat bahwa bergantinya rezim maka akan berdampak pada perubahan kebijakan yang berlaku. Era reformasi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, nyatanya telah pula berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Kurikulum di era reformasi juga telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya:

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006

Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan.

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri Agama mendatangi PERMENAG no. 2 tahun 2008, menyangkut standard kompetensi lulusan dan standard isi PAI.

2. Kurikulum 2013

Berikut ini adalah cirri-ciri yang melekat dalam K-13 (Kurikulum 2013, sebatas yang penulis ketahui), yaitu:

- a. Mewujudkan pendidikan yang berkarakter

Pendidikan berkarakter sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya. Dimana dalam kurikulum tersebut dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral dan mmiliki budi pekerti yang baik. Namun pada implementasi kurikulum ini masih terdapat berbagai kekurangan sehingga menuaiberbagai kritik. sehingga kurikulum

berbasis kompetensi ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Menciptakan Pendidikan yang Berwawasan Lokal

Wawasan lokal merupakan satu hal yang sangat penting. Namun pada kenyataan yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal seakan terabaikan dan tergerus oleh tingginya pengaruh budaya modern. Budaya yang cenderung membawa masyarakat untuk melupakan cita-cita luhur nenek moyang dan potensi yang dimilikinya dari dalam jiwa. Hal itulah yang mendorong bagaimana penanaman budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini akan diterapkan dalam konsep sistem pendidikan kurikulum 2013. Sistem yang dapat lebih mengentalkan budaya lokal yang selama ini dilupakan dan seakan diacuhkan. Olehnya itu dengan sistem pendidikan kurikulum 2013 diharapkan pilar budaya lokal dapat kembali menjadi

inspirasi dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan budaya lokal dapat menjadi ciri penting dan menjadi raja di negeri sendiri dan tidak punah ditelan zaman.

c. Menciptakan Pendidikan yang ceria dan Bersahabat

Pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran. Tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan tempat untuk menggali seluruh potensi dalam diri. Olehnya itu, dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013 nantinya akan diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik restasi akademik maupun non akademik. Maka dengan begitu pada kurikulum 2013 nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik dan berkompeten. Sehingga dengan cara tersebut diharapkan seluruh potensi dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat tereksplorasi secara cepat dan tepat.

Kurikulum Merdeka Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan.¹⁴³ Kurikulum ini mulai diberlakukan serentak pada tanggal 1 Januari 2022 di mulai dari Sekolah Penggerak terlebih dahulu. Kurikulum ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Dan untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mempunyai alokasi Intrakurikuler

¹⁴³ Dhini Fatmi, Dhini, Dirjo DKK. Buku Saku Merdeka Belajar: Prinsip dan implementasi pada jenjang SMA (Jakarta: Direktorat SMA. 2020) hal. 7

perminggu sebanyak 3 jam, Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun 36 Jam dengan jumlah keseluruhan jamnya adalah 144 jam.¹⁴⁴

Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti, Rasional Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama Islam serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti secara umum harus mengarahkan peserta didik kepada (1) kecenderungan kepada kebaikan (al-hanīfiyyah), (2) sikap memperkenankan (al-samḥah),

¹⁴⁴ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran

(3) akhlak mulia (makārim al-akhlāq), dan (4) kasih sayang untuk alam semesta (rahmat li al-ālamīn). Dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dasar-dasar tersebut kemudian diterapkan oleh peserta didik dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., menjaga diri, peduli atas kemanusiaan dan lingkungan alam. Deskripsi dari penerapan ini akan tampak dalam beberapa elemen Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terutama dalam akhlak pribadi dan sosial, akidah, syari'at dan sejarah peradaban Islam.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bisa menjadi pedoman bagi peserta didik dalam menjaga diri dan menerapkan akhlak mulia setiap hari. Berbagai persoalan di masyarakat seperti krisis akhlak, radikalisme dan krisis lingkungan hidup dan lain-lain mempunyai jawaban dalam tradisi agama Islam. Dengan mempelajari dan menghayati Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, peserta didik mampu

menghindari segala perubahan negatif yang terjadi di dunia sehingga tidak mengganggu perkembangan dirinya baik dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama warga negara, sesama manusia, maupun alam semesta.

Dengan konteks Indonesia pada abad 21 yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang agama sangat dibutuhkan, terutama dalam menghormati dan menghargai perbedaan. Pelajaran agama tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), namun juga hubungan dengan diri sendiri, sesama warga negara, sesama manusia (*ḥabl min al-nās*) dan alam semesta. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang beragam dalam proses belajar agama yang tidak hanya berupa ceramah, namun juga diskusi-interaktif, proses belajar yang bertumpu pada keingintahuan dan penemuan (*inquiry and discovery learning*), proses belajar yang berpihak pada anak (*student-centered learning*), proses belajar

yang berbasis pada pemecahan masalah (problem based learning), pembelajaran berbasis proyek nyata dalam kehidupan (project based learning), dan proses belajar yang kolaboratif (collaborative learning). Berbagai pendekatan ini memberi ruang bagi tumbuhnya keterampilan yang berharga seperti budaya berpikir kritis, kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan menjadi peserta didik yang kreatif.

Melalui muatan materi yang disajikannya dalam 5 (lima) elemen keilmuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti antara lain al- Quran dan hadis, akidah, akhlak, fiqih, dan sejarah peradaban Islam, pelajaran agama Islam dapat berkontribusi dan menguatkan terbentuknya profil pelajar pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat (min al-mahdi ila al-laḥdi) yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, menyadari dirinya bagian dari penduduk dunia dengan berkepribadian dan punya kompetensi global, mandiri, kreatif, kritis, dan bergotong royong.

Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Pada praktiknya, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ditujukan untuk:

1) memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mantap spiritual, berakhlak mulia, selalu menjadikan kasih sayang dan sikap toleran sebagai landasan dalam hidupnya;

2) membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang memahami dengan baik prinsip-prinsip agama Islam terkait akhlak mulia, akidah yang benar ('aqīdah ṣaḥīḥah) berdasar paham ahlu sunnah wal jamā'ah, syariat, dan perkembangan sejarah peradaban Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hubungannya dengan sang pencipta, diri sendiri, sesama warga negara, sesama manusia, maupun lingkungan alamnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3) membimbing peserta didik agar mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berfikir sehingga benar, tepat, dan arif dalam menyimpulkan sesuatu dan mengambil keputusan;

4) mengkonstruksi kemampuan nalar kritis peserta didik dalam menganalisa perbedaan pendapat sehingga berperilaku moderat (wasatiyyah) dan terhindar dari radikalisme ataupun liberalisme;

5) membimbing peserta didik agar menyayangi lingkungan alam sekitarnya dan menumbuhkan rasa tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di bumi. Dengan demikian dia aktif dalam mewujudkan upaya-upaya melestarikan dan merawat lingkungan sekitarnya; dan

6) membentuk peserta didik yang menjunjung tinggi nilai persatuan sehingga dengan demikian dapat menguatkan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah), persaudaraan seagama (ukhuwwah Islāmiyyah), dan juga persaudaraan sebangsa dan

senegara (ukhuwwah wataniyyah) dengan segenap kebinekaan agama, suku dan budayanya.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, ebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka. Hal.46

BAB XI

PENUTUP



Telah penulis paparkan dinamika sejarah pendidikan Islam di Nusantara, mulai dari masa kerajaan awal, pada masa pertengahan dan masa awal kemerdekaan, kemerdekaan dan keadaan pendidikan Islam di masa reformasi. Sudah jelas apa yang penulis uraikan tentang pendidikan Islam dari masa ke masa itu masih jauh dari kesempurnaan, tentu di sana sini masih ada kekurangan, ketidaklengkapan data dan sumber informasi mengenai fakta yang telah terjadi.

Oleh karena itu penulis sadari hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan, wawasan yang dimiliki penulis dan kemiskinan khazanah keilmuan yang dialami, dan fakirnya pengalaman petualangan interaksi kesejarahan. Hanyalah hasrat, keinginan dan

semangat yang dimiliki, yang memotivasi lahirnya tulisan ini. Karenanya kepada peminat, pembaca sejarah dalam hal ini sejarah yang terkait dengan Pendidikan Islam di Nusantara(PIN), jangan puas dengan beberapa sumber bacaan yang dimilikinya, akan tetapi harus banyak referensi yang bisa distudy bandingkan antara sumber sejarah dari satu subyek sejarah dengan subyek lain, bahkan interpretasi yang dibangun dari sumber sejarahpun senantiasa harus menjadi pertimbangan, di saat kita akan menyimpulkan suatu fakta sejarah yang terjadi pada suatu kondisi dan situasi dimaksud, sehingga keadaan sejarah tidak serta merta kaku dan beku, melainkan bisa terbuka menerima perbedaan tafsir sejarah yang sering kali ada perbedaan. Wallahu A'lam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. *Sejarah Umat Islam Indonesia*.
Jakarta: MUI. 1992

Ahmad Ma'ruf, *Kebijakan Politik Kelembagaan
Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa
Reformasi, Jurnal al-Murabbi*, Vol.1, 2011

Ainun Ahmad Najib. *KONSEP DASAR PENDIDIKAN
NAHDLATUL ULAMA KH. HASYIM ASY'ARI*.
Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam Volume 5
nomor 1, 2020

Aisyah Nursyarif, 2014. "*Pendidikan Islam di
Indonesia dalam Lintasan Sejarah*", Jurnal
Lentera Pendidikan Vol. 17 No. 2 Desember
2014

Amarseto, Binuko. 2015. *Ensiklopedi Kerajaan Islam
di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media

Amin, & Ananda. (2018). *Kedatangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara: Telaah Teoritik tentang Proses Islamisasi Nusantara*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 18(2),

Arief, Armai, *Reformulasi Pendidikan Islam*. Ciptat: Ciptat Press Group. 2007

Arki Auliahadi Dan Doni Nofra, "*Tumbuh Dan Berkembangnya Kerajaan Kerajaan Islam Di Sumatera Dan Jawa*", Majalah Ilmiah Tabuah, Vol. 23. No. 1 (Januari-Juni 2019)

Azra, A. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan 1994.

Azra, Azyumardi, Saiful Umam. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS-PPIM-Badan Litbang Agama Departemen Agama, 1998.

Badri Yatim, 2017. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

Bahri Samsul, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Indramayu : Penerbit Adab, 2020).

B. Bashori. 2018. *Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam di Indonesia*. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(1), 92-112. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/insania.v23i1>.

Binuko Amarseto, “*Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Istana Media, 2015

Choirunniswah, *ORGANISASI ISLAM DAN PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*, TA'DIB, Vol. XVIII, No. 01, 2013

Daulay Haidar Putra, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2012

Daulay, P. Haidar. *Kapita Selekta : Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2012

Dhini Fatmi, Dhini, Dirjo DKK. *Buku Saku Merdeka Belajar: Prinsip dan implementasi pada jenjang SMA*, Jakarta: Direktorat SMA. 2020

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam* 1. Cet. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.

Djumhur. 1959. *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT Bina Ilmu

Ensiklopedia Bebas, Wikipedia. *Sejarah Nusantara Pada Era Kerajaan Islam*.

Enung K Rukiati dan Fenti H, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung, Pustaka Setia, 2006

Fahham Achmad Muchaddam, *Pendidikan Pesantren Pola Pengasuh, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, (Jakarta : Pusat, Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi P3DI) h. 21.

Fajar Malik. *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*. Jakarta, Lembaga Pembelajaran Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia LP3NI. 1998

Getteng, Rahman *Pendidikan Islam dalam Pembangunan: moral, remaja, wanita, pembangunan* (Ujung)

Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia Historis dan Eksistensinya*, (Jakarta : Kencana).

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan & Perkembangan*. Jakarta, Rajawali Press. 1995

Husaeni, Adian. Pendidikan Islam "Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045". (Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa, 2018)

<https://arifinhamz.blogspot.com/2010/09/pendidikan-islam-pada-masa-kemerdekaan.html> diakses pada 31 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Ternate, pada tanggal 13 februari 2022, pukul 05.36

<https://repository.uin-banten.ac.id>. Bab. IV Pandangan Azyumardi Azra Tentang Sejarah Islam Nusantara

<https://tirto.id/perbedaan-dan-ragam-versi-masuknya-islam-ke-nusantara.cq4R>.

<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-perkembangan-islam-di-indonesia>

<https://historia.id/kuno/articles/majapahit-menguasai-daratan-dan-lautan-vxJd8/page/1>.) 2019

Isno, I. *Pendidikan Islam Masa Majapahit Dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro*. (Jurnal Pendidikan Agama Islam 2015) Vol. 3 No.1.

Jajat Burhanudin, "*Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 1*" (Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2015)

Jailani, M. Syahrani dan Muhammad. Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *Innovation: Journal for Religious-Innovation Studies Vol. XIX, No. 1*, (January-June 2019): 15-26

Jumadi, Labib Ulinuha, Ahmad Suradi, Heriadi, Ahmad Mufit Anwari. *Pembaharuan Pendidikan*

islam di Indonesia. Tasikmalaya: Edupulisher.
2021

Kaswati, Anggar Dkk, *Analisis Sistem Pendidikan Pada Zaman Kerajaan Sriwijaya – Majapahit Dan Zaman Modern Dalam Kaitannya Dengan Peradaban Bangsa Indonesia*, (Akademika : Jurnal Ilmiah Dan Kependidikan, 2020) Vol. 19 No. 1.

Kertawibawa, Besta Besuki. *Dinasti Raja Petapa II Syarif Hidayatullah Sang Pengembang Kerajaan Cirebon*. Bandung: Kiblat Buku Utama. 2009.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.

Kodir Abdul.. *Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Reformasi di Indonesia* cet I. Bandung: Pustaka Setia, 2015

Kosim, Mohammad K. "*Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Pada Masa Orde Lama.*" *Karsa*, vol. 22, no. 1, 2014.

M. Fuad Nasar, Al-Qur'an Tegaskan Persamaan Derajat Manusia,
<https://www.kemenag.go.id/reed/al-uur-an-tegaskan-persanaan-derajat-manusia-orupy>

M. Rosyiq Daffa Haq, “*Mengenal Perjalanan Islam Menjelajahi Tanah Jawa*”, di akses dari <https://retizen.republika.co.id/posts/17016/mengenal-perjalanan-islam-menjelajahi-tanah-jawa>, diakses pada tanggal 26 November 2021, pukul 09.23.

Mahendra Putra dkk., *PENDIDIKAN ISLAM ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KASUS MUHAMMADIYAH*, Al Mahyra, Volume 02 Nomor 01,2021

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung. 1996

Mahmud, *Muhammadiyah dan Dualisme Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Azkia Pustaka Utama, 2004

Majlis Dikdasmen PP Muhammadiyah, *Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah*. Jakarta, 1997

Mochtar, Buchori. *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Pendidikan Budaya Politik di Indonesia*, dalam buku *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000

Mu'thi Abdul, *KH.Ahmad Dahlan 1868-1923*. Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: Pustaka Pelajar. 2003.

Muljana, Slamet. *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang. 2005.

Muljana, Slamet, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya negara-Negara Islam di Nusantara* (Lkis Printing Cemerlang, 2005)

Murdianto, *Reformasi Kelembagaan Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Tasâmuh, Vol. 14, 2017

Muslimah. “Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 13, Nomor 1, Juni., 2017

Najib Muhammad Azca, dkk, *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. Jogjakarta : Pusat Studi, 2019

Nasution, F. *Kedatangan dan Perkembangan Islam di Indonesia*. *Mawa'izh*, . (2020). 11(1),26-46.

Nata Abuddin, *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta : Kencana Prenada media, 2009

- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011
- Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Nata, Abudin. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta; Kencana, Devisi Prenada Media Group, 2014
- Nina,.Lubbis, dkk. th. Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat.*
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam*, cet.ke 6, Prenada Media Group, 2006
- Nursyarif, A, Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan keguruan*, 17(02), 263.
<https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n2a8>, 2014
- Pairin, *Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam*, Sautut Tarbiyah, 2015

Pamungkas, M.F. *Empat Penyebar Islam Pra Wali Songo*. 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2005, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional)

Perdana Publishing PP Muhammadiyah, *AD dan ART Muhammadiyah*, hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang: 2005

Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat kekurangan atau kelemahan pada UU No 2 Tahun 1989, yaitu: (1) Sistem Pendidikan Nasional yang bersifat sentralistik; (2) belum menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan bersaing dengan negara lain; (3) belum mengemban misi pendidikan untuk semua; (4) belum dapat mendukung lahirnya peserta didik

yang berakhlak mulia; (5) belum memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan multikultural; (6) belum dilaksanakan secara profesional.

Pinuluh. *Pesona Majapahit*. (Yogyakarta: Buku Biru 2010)

Purbakawaca, Sugarda. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung. 1970

Putri, R.H. *Majapahit Menguasai Daratan dan Lautan*. (Retrieved from)

Rahmat, Hidayat. Ilmu Pendidikan Islam "Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia". Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan, 2016

Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan konsep, filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW*

sampai ulama Nusantara, Jakarta : Kalam Mulia,
2011

Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam:perubahan konsep,filsafat dan metodologi dan era Nabi SAW sampai ulama Nusantara* Jakarta,Kalam Mulia, 2011.

Ratmelia, Yeni, *Nilai Moral Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah : Analisis Terhadap Buku Teks*

Rohmadi, "*Lintasan Sejarah Islam Indonesia*",
(Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018)

Rohmadi,. *Lintas Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*,
cet. ke-1, (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia, 2018)

Rusdiyanto, "*Kesultanan Ternate Dan Tidore*",
(Manado:Institut islam agama negeri IAIN
Manado,Indonesia)

- Salahudin, Anas, dkk.. *Sejarah Pendidikan Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019
- Salik Muhammad. *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang : Literindo Berkah Jaya, 2020
- Samantho, Ahmad Yanuana, *Pakuan Pajajaran dan Bogor dalam Pusaran Sejarah Dunia*, (Bogor : Bayt Al Hikmah Institute, 2005)
- Samsul Nizar,. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, prenada media group. 2006
- Santiko. *Agama Dan Pendidikan Agama Pada Masa Majapahit*. (AMERTA, 2012) Vol.2. No.30.
- Sejarah Indonesia Kelas X*, (HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, P-Issn:26204789) H. 182
- Sholeh Dimyathi dan Feisal Ghozali, “*Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*”, (Jakarta:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2018)

Sofwan, Ridin, *Islamisasi di Jawa*, (Pustaka Pelajar,
2000)

Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia
Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi
dan Identitas*. UIN Jakarta Press. 2009.

Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam
Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
2005

Sunyoto, Agus , *Atlas Wali Songo* (Depok: Pustaka
Iman, 2017)

Susilarini. *Mengenal Sembilan Wali (Wali Sanga)*.
(Surakarta: Seti-Aji.2018)

Susmihara. (2013). Pendidikan Islam Masa Penjajahan
Belanda Dan Jepang. *Rihlah : Jurnal Sejarah
dan Kebudayaan*, 1 (01), 106-107.

<https://doi.org/10.24252/rihlah.v1i01.654>

Syafiq Mughni, *Warisan Islam A Hasan dalam Arus Pemikiran Islam di Indonesia*. dalam Endang Saifuddin Anshari dan Amin Rais. Pak Natsir 80 Tahun. Jakarta: Media Dakwah, 1988

Syahrudin dan Heri susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nursantara Sampai Reformasi*, cet. ke-1, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2019

Syukur Abdul Abu Bakar, *Sistem Pendidikan Islam*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni, 2020

Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik Pengalaman Pesantren Persatuan Islam*, Fataba Press

Usiono dan Ahmad Syukri Sitorus. *Kontribusi Ormas Islam Dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan di Abad 21*. Medan: Perdana Publishing PP Muhammadiyah, AD dan ART Muhammadiyah, hasil Mukhtamar

Muhammadiyah ke 45 di (Malang: 2005), Bab I pasal 2, dan Bab II pasal 4. 2015

Usman Tholib, “*Sejarah Masuknya Islam Di Maluku*”, (Maluku Utara: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 2011

Wandiyo, dkk, *Hubungan Sriwijaya dengan Dinasti Umayyah terhadap Masuknya Agama Islam di Palembang Pada Abad VII Masehi* (SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah 2020) Vol.2 No.2

Wandiyo, dkk. *Nilai – nilai Dealiktika Hubungan Sriwijaya dengan Dinasti Umayyah*, (Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 2020) Vo.9 No.2

Yatim, Badri , *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press 2008) h. 194

Yuliantini. *Islamisasi di Lingkungan Kerajaan Majapahit oleh Maulana Malik Ibrahim Tahun*

Yunus, Muhammad. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya, 1985.

Zainnuddin, Reformasi Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Zuhairini *et al.* *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara.2013

Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1994)